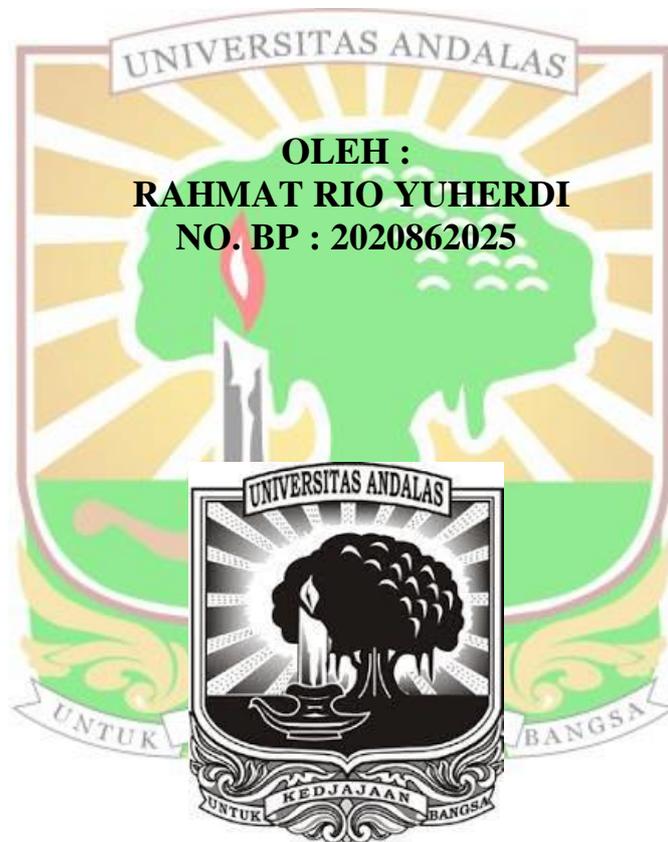


**ISU KEAGAMAAN DALAM PEMBINGKAIAN MEDIA**

**(Analisis *Framing* Model Robert N. Entman terhadap Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan Republika *Online*)**

**TESIS**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

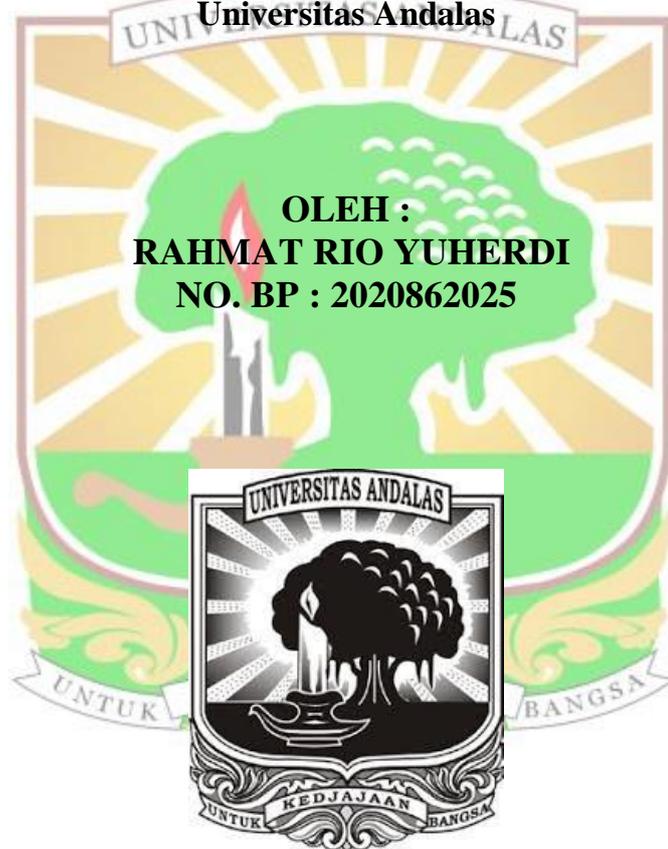
**ISU KEAGAMAAN DALAM PEMBINGKAIAN MEDIA**

**(Analisis *Framing* Model Robert N. Entman terhadap Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan Republika *Online*)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Andalas**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN

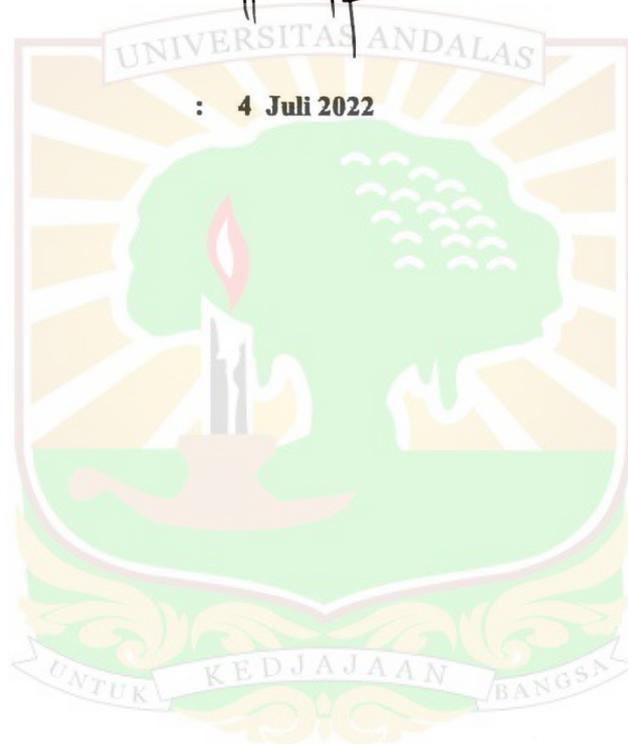
**Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Rahmat Rio Yuherdi**

**No. BP : 2020862025**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 4 Juli 2022**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**ISU KEAGAMAAN DALAM PEMBINGKAIAN MEDIA**  
(Analisis *Framing* Model Robert N. Entman terhadap Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan Republika Online)

NAMA MAHASISWA : RAHMAT RIO YUHERDI  
NIM : 2020862025

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Kelayakan Tesis  
Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas

Tanggal : 1 Agustus 2022

**DEWAN PENGUJI**

Dr. Ernita Arif, M.Si	Ketua/Pembimbing I/ Koordinator Magister Ilmu Komunikasi	
Dr. Sarmiati, M.Si	Pembimbing II	
Dr. Rahmi Surya Dewi, M.Si,	Penguji	
Dr. Elva Romaning Roem, M.Si	Penguji	
Dr. Aidinil Zetra, MA	Penguji	

Padang, Agustus 2022  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas  
Dekan,

  
**Dr. Azwar, M.Si**  
NIP. 196712261993031001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Isu Keagamaan dalam Pembingkai Media (Analisis *Framing Model* Robert N. Entman terhadap Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan *Republika Online*)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Shalawat dan Salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa bagi umat manusia.

Selama studi dan penyusunan tesis ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Azwar, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan para Wakil Dekan beserta segenap jajaran, atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam menempuh studi hingga tuntasnya penyusunan tesis ini.
2. Ibu Sarmiati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi masukan, dan saran selama penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr. Ernita Arif, M.Si selaku Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberi masukan dan nasehat selama penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Rahmi Surya Dewi, M.Si, Ibu Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si dan Bpk. Dr. Aidinil Zetra, MA, selaku Tim Penguji Ujian Kolokium yang telah memberikan masukan, arahan, kritik dan saran untuk penulisan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas yang telah membantu mengarahkan serta berbagi ilmu dengan penulis selama mengikuti studi pada Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai pemberi beasiswa pada Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang telah memberikan penulis kesempatan mendapatkan beasiswa dan mengikuti Program Studi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas. *Mbak Anes* beserta jajarannya, terimakasih atas bantuan, kerjasama dan kemudahan yang diberikan.
7. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Solok, yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk mengikuti proses Tugas Belajar. *Uni Mardahayati, SH, M.AP, Aggun, dkk*, terimakasih atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan.
8. *Buk Cici (Istiqah Sari, S.Si)* dan *Pak Rendi Putra Atriadi, S.Kom*, pejuang Sekretariat yang telah membantu dan memudahkan penulis serta memberikan informasi dengan sabar terkait prosedur administrasi akademik sehingga proses perkuliahan dan penulisan tesis ini terlaksana dengan baik.
9. Ayahanda *Edi Fatri, S.Pd* dan Ibunda *Ermawati Ali*, yang do'a-nya selalu mengiringi perjalanan dan perjuangan penulis.
10. Istriku *Mia Arniati* dan Anak-anakku : *Bening Puti Kinanty* yang sama-sama masuk ke bangku sekolah bersama Papi-nya di saat Pandemi Covid-19 serta mengikuti pembelajaran secara *Online*, dan *Syahilla Hafizah Ufairah* yang telah hadir ke dunia di saat penulis melanjutkan Studi S2 pada Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Terimakasih telah sabar dan memahami serta mengiringi perjalanan dan perjuangan penulis dalam penyelesaian studi Magister Ilmu Komunikasi ini.
11. *Bang Rinaldi, S.Sos, M.Ikom* yang telah berkenan menerima penulis dan meluangkan waktunya ditengah-tengah aktivitas dan kesibukannya, untuk berdiskusi, memberikan arahan, masukan dan meminjamkan Skripsi

mahasiswanya serta memotivasi dan mengingatkan penulis untuk bisa menyelesaikan studi sesuai jadwal.

12. Febrian yang telah bersedia penulis wawancarai serta mempertemukan penulis dengan Bang John Nedi Kambang.
13. Bang John Nedy Kambang yang telah bersedia penulis wawancarai disela-sela aktivitas dan kesibukannya.
14. *Pak* Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA, yang telah membantu dan memudahkan jalan penulis untuk mendapatkan Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Komunikasi di Universitas Andalas.
15. Ibu Leni Marsih yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam meminjamkan buku di Perpustakaan Universitas Andalas.
16. Teman-teman se-Angkatan dan seperjuangan, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas Angkatan 2020 : semoga sukses selalu, saat ini dan di masa depan.
17. Teman-teman seperjuangan sama-sama Ujian Kolokium : Dio Putra, Prof. Arliman, Nesthy, Uni Leni dan Pak Dafrizal. Tetap semangat dan mari kita sama-sama lagi.
18. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Solok, 4 Juli 2022

Rahmat Rio Yuherdi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Andalas, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Rio Yuherdi  
No. BP : 2020862025  
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada FISIP Universitas Andalas Hak Bebas Royalti Noneklusif (**Non-exlucive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ISU KEAGAMAAN DALAM PEMBINGKAIAN MEDIA  
(Analisis *Framing* Model Robert N. Entman terhadap Berita Polemik Jilbab  
di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan Republika *Online*)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non Ekklusif ini FISIP Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Solok

Pada tanggal : 4 Juli 2022

Yang menyatakan,



Rahmat Rio Yuherdi

## ABSTRAK

Nama : Rahmat Rio Yuherdi  
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi  
Judul : Isu Keagamaan dalam Pembingkai Media (Analisis *Framing* Model Robert N. Entman terhadap Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan *Republika Online*)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembingkai berita polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan *Republika Online* serta menganalisis level yang paling mempengaruhi pembingkai tersebut jika dikaitkan dengan Teori Hierarki Pengaruh Isi Media Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis *framing* serta paradigma konstruksionis. Adapun model *framing* yang digunakan adalah model Robert N. Entman, yang terdiri dari empat elemen perangkat *framing* yakni *Define Problems* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral) dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Detik.com memberikan *frame* kasus polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang sebagai bentuk intoleransi, merupakan bentuk pemaksaan pemakaian jilbab bagi siswi nonmuslim, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (tidak pancasilais) dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara *Republika Online*, memberikan *frame* salah interpretasi, miskomunikasi, bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, tidak ada unsur paksaan dan isu aturan jilbab di SMKN 2 Padang dibesar-besarkan. Jika dikaitkan dengan Teori Hierarki Pengaruh Isi Media Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, level ekstra media yaitu sumber penghasilan media dan pangsa pasar merupakan level yang paling mempengaruhi *framing* Detik.com, dimana motif dibalik *framing* lebih banyak kepada motif ekonomi. Sedangkan pada *Republika Online*, level yang paling mempengaruhi *framing* adalah level ideologi.

**Kata Kunci :** Media, *framing*, Jilbab, SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

## **ABSTRACT**

Name : Rahmat Rio Yuherdi  
Study Program : Master in Communication Science  
Title : Religious Issues in Media Framing (Analysis of Robert N. Entman's Framing Model of the Hijab Polemic News at SMK Negeri 2 Padang on Detik.com and Republika Online)

*This study aims to analyze the framing of the hijab polemic news at SMK Negeri 2 Padang on Detik.com and Republika Online, and analyze most influences level the framing based on Hierarchy Theory of Influence on Media Content Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese. This study used a qualitative method with a constructionist paradigm. The framing analysis model used is the Robert N. Entman model, which consists of four elements of the framing device: define problems, diagnose causes, make a moral judgment, and treatment recommendations. The results of this study indicate that Detik.com framed this as a form of intolerance, which is forcing the wearing of hijab for non-Muslim students, not under the values of Pancasila, and a violation of human rights. Meanwhile, Republika Online provides a frame of misinterpretation, miscommunication, and a form of respect for local wisdom; there is no element of coercion, and the issue of the hijab rule at SMKN 2 Padang is exaggerated. If it is associated with the Hierarchy Theory of Media Content Influence Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese, the extra-media level, which is the source of media income and market share, is that has level that most influences level on framing Detik.com. The motive behind framing is more of an economic motive. And for Republika Online the most influential frame is the level of media ideology.*

**Keywords :** Media, framing, hijab, SMK Negeri 2 Padang, West Sumatra.



## DAFTAR ISI

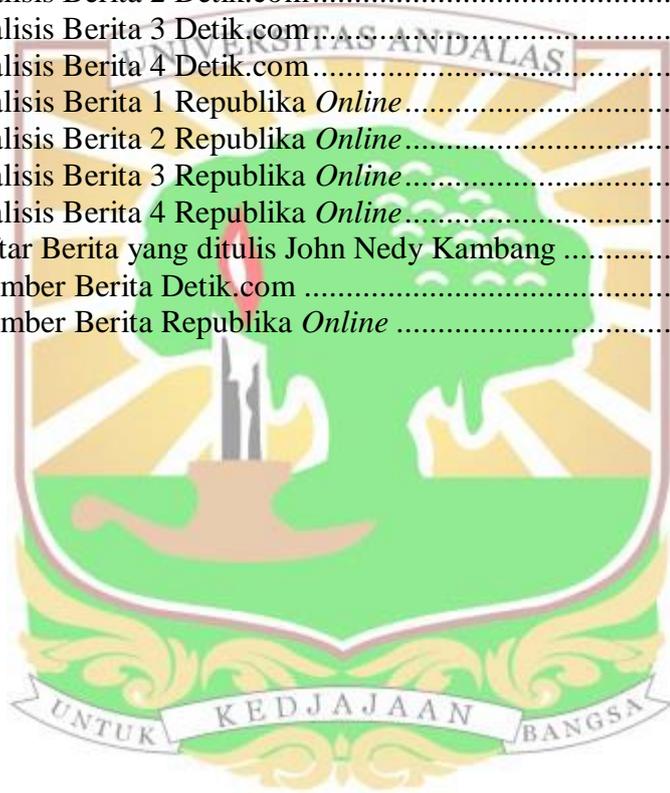
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRCT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat .....	10
1.4.1 Manfaat Akademis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Kajian Terdahulu .....	11
2.2 Kerangka Konseptual .....	19
2.2.1 Peran Media.....	19
2.2.2 Media <i>Online</i> .....	20
2.2.3 Karakteristik Berita pada Media <i>Online</i> .....	21
2.2.4 Nilai Berita .....	21
2.2.5 <i>Kliktbait</i> .....	22
2.3 Kerangka Teori.....	24
2.3.1 Teori <i>Framing</i> .....	24
2.3.2 Model <i>Framing</i> Robert N. Entman.....	26
2.3.3 Teori Hirarki Pengaruh Isi Media .....	29
2.3.4 Komodifikasi .....	31
2.4 Kerangka Berfikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3 Informan.....	37
3.4 Data Penelitian .....	37
3.5 Metode Analisis Data .....	39
3.6 Tahapan Penelitian .....	40
3.7 Keterbatasan Penelitian .....	42
3.8 Keabsahan Data.....	43
<b>BAB IV DESKRIPSI UMUM PENELITIAN</b> .....	44
4.1 Profil Detik.com .....	44
4.1.1 Sejarah.....	44
4.1.2 Visi dan Misi .....	45
4.1.3 Kepemilikan .....	45
4.1.4 Ideologi .....	45

4.2 Profil Republika <i>Online</i> .....	46
4.2.1 Sejarah.....	46
4.2.2 Visi dan Misi .....	47
4.2.3 Kepemilikan .....	48
4.2.4 Ideologi .....	48
4.3 Deskripsi Pemberitaan Kasus Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang	49
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	55
5.1.1 Analisis <i>Framing</i> Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan Republika <i>Online</i> .....	55
5.1.2 Pembingkaiian Detik.com dan Republika <i>Online</i> dikaitkan dengan dikaitkan dengan 5 (Lima) Level Pengaruh Isi Media.....	77
5.2 Pembahasan.....	85
5.2.1 Pembingkaiian Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang : <i>Frame</i> Detik.com dan Republika <i>Online</i> .....	85
5.2.3 Analisis level yang paling mempengaruhi pembingkaiian Detik.com dan Republika <i>Online</i> dikaitkan dengan 5 (Lima) level pengaruh isi media .....	92
5.2.4 Media dan Isu Keagamaan .....	100
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>106</b>
6.1 Kesimpulan .....	106
6.2 Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>112</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
Tabel 2. 2 Dua Unsur <i>Framing</i> Media Versi Entman.....	26
Tabel 2. 3 Empat Elemen Perangkat <i>Framing</i> Entman .....	28
Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....	37
Tabel 3. 2 Berita Detik.com sebagai Objek Penelitian .....	38
Tabel 3. 3 Berita Republika <i>Online</i> sebagai Objek Penelitian .....	39
Tabel 4. 1 Berita Detik.com .....	50
Tabel 4. 2 Berita Republika <i>Online</i> .....	52
Tabel 5. 1 Analisis Berita 1 Detik.com.....	55
Tabel 5. 2 Analisis Berita 2 Detik.com.....	60
Tabel 5. 3 Analisis Berita 3 Detik.com.....	62
Tabel 5. 4 Analisis Berita 4 Detik.com.....	64
Tabel 5. 5 Analisis Berita 1 Republika <i>Online</i> .....	65
Tabel 5. 6 Analisis Berita 2 Republika <i>Online</i> .....	68
Tabel 5. 7 Analisis Berita 3 Republika <i>Online</i> .....	70
Tabel 5. 8 Analisis Berita 4 Republika <i>Online</i> .....	73
Tabel 5. 9 Daftar Berita yang ditulis John Nedy Kambang .....	92
Tabel 5. 10 Sumber Berita Detik.com .....	95
Tabel 5. 11 Sumber Berita Republika <i>Online</i> .....	97



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Teori Hirarki Pengaruh Isi Media.....	29
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir .....	33
Gambar 4. 1 Logo Detik.com.....	44
Gambar 4. 2 Logo Republika <i>Online</i> (ROL).....	47
Gambar 5. 1 Alur Pengolahan Berita Detik.com.....	79
Gambar 5. 2 Alur Pengolahan Berita Republika <i>Online</i> .....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus jilbab siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang menimbulkan polemik pada awal tahun 2021. Polemik ini menjadi sorotan dan menyita perhatian banyak kalangan. Tidak hanya menjadi sorotan di tingkat lokal Sumatera Barat, tetapi juga menuai respon banyak pihak pada skala nasional.

Kasus ini bermula dari postingan Ayah siswi bernama Jeni Cahyani Hia, yang mengunggah video siaran langsung di akun *facebook* bernama Elianu Hia pada tanggal 21 Januari 2021. Dalam video yang sempat viral tersebut, terjadi perdebatan dan adu argumen antara Elianu dengan pihak sekolah. Elianu mempertanyakan dasar aturan menggunakan kerudung dan merasa keberatan jika anaknya memakai pakaian tersebut karena non muslim.

Peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra yang mengundang tanggapan dari berbagai tokoh, politisi dan pejabat lembaga Negara baik di daerah maupun di tingkat pusat. Tidak hanya itu, polemik ini bahkan sampai menyebabkan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI, yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri, Nomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021 dan 219 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. SKB ini mengatur Pemerintah Daerah dan Sekolah agar memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut, tanpa kekhasan agama tertentu serta tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Secara garis besar, ada dua pandangan yang berkembang seputar kasus ini. *Pertama*, pihak yang menyatakan kasus ini sebagai bentuk dan upaya pemaksaan pemakaian jilbab bagi siswi non muslim, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, tidak menghargai keberagaman, tidak pancasilais, bentuk intoleransi dan sebagai wujud anti-kebhinekaan. *Kedua*, pihak yang berpandangan bahwa kasus

ini adalah masalah miskomunikasi antara pihak guru dan wali murid, aturan berjilbab bagi siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang hanya berupa imbauan dan sifatnya menyesuaikan bagi siswi nonmuslim (bukan pemaksaan), dan berkaitan dengan kultur, kebiasaan dan kearifan lokal di Sumatera Barat dimana agama dan tradisi sudah menyatu sesuai dengan filosofi “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”.

Meluasnya eskalasi kasus ini, tidak terlepas dari adanya peran media. Kasus ini seolah di besar-besarkan sehingga mengundang tanggapan tokoh, politisi, dan pejabat lembaga Negara di “Jakarta”. Penilaian yang diberikan cenderung merugikan dan mendiskreditkan Sumatera Barat karena seolah ditarik ke ranah yang lebih luas sehingga bukan hanya perkara di SMK saja, akan tetapi ditujukan ke Sumatera Barat secara umum, sehingga memberi kesan bahwa Sumatera Barat intoleran, anti-kebhinekaan dan tidak pancasilais. Permasalahan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, ditanggapi dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Jika dilihat ke belakang, peristiwa ini bukanlah kejadian pertama yang ditujukan kepada Sumatera Barat terkait isu serupa. Sebelumnya pada medio September 2020 tepatnya pada tanggal 2 September, dalam suasana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Puan Maharani menyinggung soal Pancasila dan Sumatera Barat saat mengumumkan calon Kepala Daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pada acara tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ini awalnya mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan oleh PDIP untuk maju pada Pemilihan Gubernur 2020 Sumatera Barat yaitu politikus Partai Demokrat Mulyadi dan mantan Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Ali Mukhni. Setelah mengumumkan rekomendasi itu, dalam pidatonya Puan menyatakan “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila”(Tempo.co, 5/09/2020). Kalimat bernada harapan ini akhirnya memicu polemik dan menimbulkan kontroversi. Buntut pernyataan tersebut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mulyadi-Ali Mukhni akhirnya mengembalikan dukungan dari PDIP serta Puan Maharani dilaporkan oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang ke polisi karena

dianggap menghina masyarakat Sumatera Barat akibat ucapan dan pernyataan tersebut (Tempo.co, 5/09/2020).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sebelumnya sempat “curhat” dan menyinggung soal Sumatera Barat dalam pidatonya di acara itu. Ia mengaku bertanya-tanya soal penyebab PDIP sulit menang di Sumatera Barat dan sepertinya rakyat di Sumatera Barat belum menyukai PDI Perjuangan. Padahal jika melihat sejarah bangsa, banyak tokoh asal Sumatera Barat yang menjadi nasionalis. Ia mencontohkan Bung Hatta yang bersama ayahnya, Bung Karno, menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia (Tempo.co, 5/09/2020).

Pernyataan Megawati tersebut mengindikasikan bahwa isu-isu seperti intoleran dan tidak pancasilais yang diarahkan ke Sumatera Barat ini tidak bisa dilepaskan dari faktor politis yaitu kekalahan, tidak pernah menang atau tidak mendapat tempatnya PDIP di hati masyarakat Sumatera Barat. Kemenangan PDIP di level nasional tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh di Sumatera Barat (Afriandi, 2021:134). Padahal sejak periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDIP, Jokowi cukup sering bersafari dan berkunjung ke Sumatera Barat. Anggaran Pemerintah Pusat pun (APBN) cukup banyak dialokasikan ke Provinsi Sumatera Barat, melalui proyek pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, kereta api Bandar Udara Minangkabau, dan revitalisasi seribu rumah gadang (Tagar.id, 24/04/2019). Selain itu ada beberapa proyek prioritas Jokowi di Sumatera Barat seperti jalan penghubung Solok Selatan dengan Tanah Datar, akses jalan ke wisata Mandeh, dan proyek jalan Trans Mentawai (Detik.com, 16/10/2018). Jokowi juga melakukan pendekatan kepada rakyat Sumatera Barat dengan cara lain seperti Shalat Idul Fitri di Masjid Raya Sumatera Barat pada tahun 2016 (Kompas.com, 06/07/2016). Ibu Negara Iriana juga menarik perhatian dengan mengenakan pakaian khas Minangkabau pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2017 dan 2018 (Liputan6.com, 17/07/2018). Namun semua upaya tersebut tidak menarik mayoritas masyarakat Sumatera Barat mendukung dan memilih PDIP serta Jokowi (Afriandi, 2021:135).

Peristiwa dan isu-su seperti ini, menjadi santapan empuk untuk ‘digoreng’ dan dibesar-besarkan oleh media demi menarik keuntungan secara finansial, sehingga pada tahap tertentu, isu-isu seperti ini merugikan dan dapat

mendiskreditkan Sumatera Barat. Sebagaimana yang dikatakan U Thant bahwa pers selalu *overemphasized*, melebih-lebihkan dan beritanya selalu *overdramatized*, selalu mendramatisir dan terkadang didistorsikan agar laku dan menarik perhatian orang (Kusumaningrat, 2014:67).

Media dalam pandangan kaum konstruksionis bukanlah saluran yang bebas dan berita merupakan hasil konstruksi dari realitas. Berita yang hadir di hadapan khalayak merupakan hasil kemas dan pemingkaian oleh media. Inilah yang dinamakan dengan *framing*. Analisis *framing* berangkat dari pemikiran bahwa berita merupakan hasil konstruksi realitas yang dilakukan oleh wartawan dan/atau redaksi media (Sobur, 2018:162). Karena merupakan hasil konstruksi, maka berita yang hadir belum tentu 100 persen sama dengan realitas yang ada.

Analisis *framing* dalam perspektif komunikasi dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta (Sobur, 2018:162). Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2018:162). Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2018:162). Cara pandang atau perspektif tersebut akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 2012: 221).

Ruang pemberitaan (*newsroom*) tidak dipandang sebagai ruang hampa, netral dan seakan-akan hanya menyalurkan informasi yang didapat, tanpa dikurangi dan dilebihkan (Sudiby, 2001:7). Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembentukan berita. Hal ini disebabkan karena banyak kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, sehingga akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam presentasi media (Sudiby, 2001:7). Dalam hal ini media dimaknai sebagai arena pertarungan wacana. Apa yang disajikan media pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam (Sudiby, 2001:7).

Jurnalis yang bertugas di lapangan bukanlah 'pemain' tunggal media dalam mengkonstruksi berita. Pemingkaian berita juga dikontrol oleh organisasi media. Berbagai kebijakan redaksi akan mendorong penyeleksian isu mana yang

akan disuguhkan kepada khalayak. Penyajian isi media kepada khalayak dipengaruhi oleh level intra media dan ekstra media. Proses pembingkai dalam instansi media melibatkan faktor individu pekerja media, media rutin dan organisasi media. Sementara pada level ekstra media, ada pengaruh yang terdapat dari sumber berita, sumber penghasilan media, pangsa pasar dan tentunya pemerintah, dimana semuanya itu berpedoman kepada nilai serta ideologi yang dianut oleh media tersebut.

Pemberitaan tentang polemik pemakaian jilbab bagi siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang, menarik bagi peneliti untuk dikaji dan dianalisis secara *framing*. Alasannya karena peneliti ingin melihat bagaimana media mengemas, membingkai atau mem-*framing* peristiwa tersebut. Adapun yang diteliti dalam hal ini bukanlah mengenai kasus yang berbau SARA-nya, akan tetapi bagaimana media mengemas berita peristiwa dimaksud, dalam arti bagaimana perspektif media dalam menyajikan peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini kepada khalayak.

Berita mengenai konflik terutama yang berbau dengan SARA, menjadi isu yang 'seksi' bagi para wartawan dan media untuk diliput dan diberitakan. Karena isunya berbau kontroversial dan merupakan peristiwa yang tidak biasa. Secara nilai berita, mempunyai nilai berita yang cukup tinggi dan menarik bagi khalayak untuk diikuti. Oleh karena itu, pers maupun media berkewajiban untuk menyeleksi setiap kejadian dan konflik. Karena fakta-fakta menunjukkan bahwa isu agama merupakan isu sensitif yang dapat memicu konflik bahkan perpecahan bangsa (Moenawar, 2017: 103).

Pentingnya penelitian dilakukan ini karena kasus yang diangkat tergolong unik dalam pandangan peneliti karena kewajiban pemakaian jilbab bagi siswi nonmuslim ini terjadi di sebuah sekolah tingkat SMK di Kota Padang, namun menuai sorotan luas secara nasional dan bahkan sampai mendapat respon dari Pemerintah Pusat melalui kebijakan berupa SKB Tiga Menteri. Padahal kasus intoleransi dan berbau keagamaan di sekolah bukanlah kasus yang baru, pertama kali terjadi. Dalam catatan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), sebelumnya pernah ada kasus pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019 serta jauh sebelumnya pada tahun 2014 juga

sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali (Jawapos.com, 25/01/2021). Namun tidak sampai mendapat respon dari Pemerintah Pusat melalui sebuah kebijakan.

Walaupun polemik ini akhirnya disudahi seiring dengan dibatalkannya kekuatan hukum SKB Tiga Menteri oleh Mahkamah Agung dengan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil nomor perkara 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai pemohon, yang diketok palu pada tanggal 3 Mei 2021, dan telah berlalu selang setahun yang lalu, namun secara akademis menyisakan ruang untuk dikaji. Permasalahan yang akan dikaji melalui analisis *framing* ini, termasuk ke dalam cakupan riset komunikasi yakni studi mengenai isi pesan media pada tingkatan atau konteks komunikasi massa. Artinya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu komunikasi terutama dalam bidang kajian atau studi media tentang pemahaman pesan yang dikemas melalui analisis *framing*.

Secara teoretis jika dilihat dari kajian terdahulu, penelitian analisis *framing* untuk melihat pembingkai media terhadap sebuah isu memang telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah penelitian oleh Devi Ambarsari dan Amalia Rosyadi Putri (2021), Aisyah Fadhilah dan Yuli Candrasari (2021), Rifa Yanas (2020), Retno Sari Handayani (2020), Uky Firmansyah (2019), Regia Fiorentina, Mayasari dan Fajar Hariyanto (2018) dan Silvina Mayasari (2017). Namun kebanyakan dari penelitian tersebut hanya menggunakan teori dan model *framing*, serta hanya menyingkap faktor ideologi dibalik *framing* media, seperti penelitian yang dilakukan oleh Regia Fiorentina, Mayasari dan Fajar Hariyanto (2018). Selain itu dalam menjelaskan isi media, kebanyakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi-politik (*political-economy approach*) sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Devi Ambarsari dan Amalia Rosyadi Putri (2021) dan pendekatan organisasi (*organizational approach*) sebagaimana penelitian Retno Sari Handayani (2020), yang menggunakan *framing* sebagai analisis institusional media. Sementara Rifa Yanas (2020), menggunakan penelitian *framing* untuk mengungkap keberpihakan media terhadap isu yang diteliti.

Penelitian ini selain menggunakan teori dan model *framing*, juga menggunakan Teori Hirarki Pengaruh Isi Media dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi *framing* media dimana terdapat level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level ekstra media, dan level ideologi, yang mempengaruhi isi media. Artinya, dalam menjelaskan isi media (studi media), penelitian ini lebih bersifat komperhensif karena menggunakan pendekatan kulturalis (*culturalist approach*) yang merupakan gabungan antara pendekatan ekonomi politik dan pendekatan organisasi (Sudiby, 2001: 4). Dalam pendekatan kulturalis, proses produksi media dilihat sebagai mekanisme yang melibatkan faktor internal media sekaligus juga faktor eksternal di luar diri media. Media pada dasarnya memang mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik di luar diri media (Sudiby, 2001:4).

Pendekatan kulturalis ini lebih memadai untuk menjelaskan perkembangan pers pasca Orde Baru. Secara empiris, perubahan signifikan pada corak pemberitaan pers Indonesia pasca Orde Baru secara umum dapat dilihat sebagai hasil dari tindakan-tindakan para pengelola media yang mencoba melepaskan diri dari batasan-batasan yang membelenggu kinerja mereka. Namun dinamika internal redaksi media tetap tidak bisa sepenuhnya menjadi identitas yang otonom, karena ada kekuatan-kekuatan ekonomi baru yang turut mempengaruhinya.

Uraian dan penjelasan diatas merupakan *state of the arts* yang mengidentifikasi *knowledge gaps* (kesenjangan-kesenjangan pengetahuan) serta sekaligus menjadi *novelty* (kebaruan) dan potensi *knoweldge contribution* penelitian ini. Hal ini yang membedakan dan menjadi kelebihan penelitian ini dari penelitian-penelitian yang sudah ada.

Adapun model analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Robert N. Entman, yang terdiri dari 4 (empat) elemen perangkat *framing*, yaitu : *Define Problems* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral) dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian).

Jenis media yang diteliti adalah media *online*. Dipilihnya media *online* karena berdasarkan riset AC Nielsen, sebuah perusahaan informasi dan pengukuran global, bahwa di Indonesia saat ini jumlah pembaca media *online* digital sudah lebih banyak dibandingkan media cetak. Sejak empat tahun terakhir, jumlah pembeli koran terus merosot karena masyarakat beranggapan bahwa informasi seharusnya bisa didapat secara gratis. Data survey Nielsen pada bulan Agustus tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah pembaca media *online* di Indonesia mencapai 6 juta orang, sedangkan pembaca media cetak yang hanya sebanyak 4,5 juta orang. Media cetak saat ini hanya menjadi pilihan kelima masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan penetrasi sebesar 8%. Urutan pertama ditempati televisi dengan 96%, diikuti papan iklan di jalanan 52%, penggunaan internet sebesar 43% dan radio sebanyak 37%. Masyarakat kebanyakan membaca koran di kantor, sekolah dan perpustakaan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Sedangkan media *online* dapat diakses melalui *smartphone* kapan saja dimana saja dan tentunya dapat diperoleh secara gratis, yang merupakan suatu kemudahan dan daya tarik tersendiri bagi khalayak pembaca. Pemberitaan media *online* saat ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembentukan opini dan penafsiran atau pemaknaan berita dan informasi (Hakim, 2020:11).

Media *online* yang dipilih sebagai subjek penelitian adalah Detik.com dan Republika *Online* (Republika.co.id) yang disingkat *ROL*. Pengambilan Detik.com sebagai subjek penelitian karena menurut Similarweb.com, Detik.com termasuk situs berita terpopuler di Indonesia dan merupakan situs yang menduduki ranking 3 (tiga) di jajaran situs media *online* paling banyak dikunjungi pembaca di Indonesia dalam kurun waktu enam bulan terakhir Januari sampai Juli 2021 dengan total pengunjung sebanyak 179,8 juta pengunjung. Disamping itu, situs ini juga meraih waktu membaca yang lebih tinggi dibandingkan situs pemberitaan lainnya, dengan rata-rata pengunjung membaca 4 hingga 5 artikel di situs ini dengan waktu baca masing-masing selama 6 menit 58 detik. Selain itu berita yang berkaitan dengan jilbab di SMK Negeri 2 itu selalu masuk dalam *trending* dan termasuk berita dalam kategori *most comment* dan *most popular* di kanal Detik.com. Ini berarti berita tentang polemik ini, posisinya selalu pada posisi

pertama atau kedua. Berita yang masuk ke dalam kategori *most comment* dan *most popular* juga menandakan bahwa pembacanya sudah mencapai angka jutaan orang. Berita itu akan selalu muncul dan akan selalu dicari, dikomentari, dibaca dan dibagikan orang serta *viewernya* sudah sangat tinggi.

Sementara *Republika Online* dipilih sebagai subjek penelitian karena sejak awal persoalan ini viral, *Republika Online* begitu intens menyajikan berita tentang kasus ini. Sebagai media yang berbasis komunitas Muslim, isu ini menjadi perhatian *Republika Online* dan adanya penyediaan ruang yang cukup terhadap pemberitaan kasus ini. Disamping itu, *Republika Online* juga terlihat menghindari diksi-diksi yang dapat memicu prasangka banyak pihak terkait isu intoleransi dan arah pemberitaannya yang berbeda dari pemberitaannya pada umumnya yang beredar di media massa terhadap kasus yang terjadi di SMKN 2 Padang ini.

Rentang waktu pemberitaan yang dipilih antara tanggal 21 Januari 2021 hingga 2 Februari 2021. Dengan kata lain, penelitian ini hendak menganalisis dinamika pemberitaan mengenai polemik pemakaian jilbab bagi siswa nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang mulai dari momentum ketika Ayah siswi bernama Jeni Cahyani Hia, mengunggah video siaran langsung, hingga sebelum diterbitkannya SKB Tiga Menteri.

Berdasarkan uraian-uraian baik pada aspek alasan gap teoritik, gap penelitian terdahulu maupun pada aspek fenomena empiris tersebut diatas, maka muncul keinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Isu Keagamaan dalam Pembingkaihan Media (Analisis *Framing Model* Robert N. Entman terhadap Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada *Detik.com* dan *Republika Online*)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian di atas adalah upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini :

1. Bagaimana pembingkaihan *Detik.com* dan *Republika Online* terhadap berita polemik jilbab bagi siswi non muslim di SMK Negeri 2 Padang ?
2. Bagaimana pembingkaihan yang dilakukan oleh *Detik.com* dan *Republika Online*, jika dikaitkan dengan 5 (lima) level pengaruh isi media yaitu level

individual, level rutinitas media, level organisasi, level ekstra media dan level ideologis, level mana yang paling paling mempengaruhi pemberitaan polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang tersebut?

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pembingkaiian berita polemik pemakaian jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan Republika *Online*.
2. Untuk menganalisis level yang paling mempengaruhi pembingkaiian Detik.com dan Republika *Online* terhadap berita polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang, jika dikaitkan dengan 5 (lima) level pengaruh isi media yaitu level individual, level rutinitas media, level organisasi, level ekstra media dan level ideologis

### 1.4 Manfaat

#### 1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, terutama tentang pemahaman pesan yang dikemas melalui analisis *framing*
2. Untuk menambah referensi ilmu komunikasi di bidang jurnalistik dan kajian/studi media.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses *framing* oleh media.
2. Bagi praktisi yang bergerak dalam bidang komunikasi massa, khususnya bagi wartawan, agar lebih mawas diri untuk mengantisipasi setiap resiko dan efek yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan yang dilakukan.
3. Dapat memberikan masukan dan acuan bagi para akademisi maupun praktisi, umum, baik mahasiswa maupun praktisi jurnalistik, untuk dapat melihat, mengamati serta mengidentifikasi *frame* berita yang ada di media.
4. Sebagai literasi media bagi khalayak pembaca bahwa dalam sebuah peristiwa atau isu yang diberitakan terdapat unsur pembingkaiian sehingga khalayak pembaca bisa lebih kritis serta hati-hati dalam mengkonsumsi teks berita serta dapat menyaring berita yang diperoleh dari media.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Terdahulu

Guna meningkatkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis merangkum beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang akan dipaparkan guna menunjukkan keaslian dan kebaruan penelitian ini.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Devi Ambarsari dan Amalia Rosyadi Putri (2021) yang berjudul “*Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pemakaian Identitas Agama pada Seragam Sekolah di Media Online Kompas.com dan Republika.com.*” Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis *framing* dua media *online* Kompas.com dan Republika.co.id dalam menyampaikan berita tentang kebijakan SKB 3 Menteri dalam pemakaian atribut atau seragam dengan kekhususan agama. Menggunakan analisis *framing* model William A. Gamson, temuan penelitian menunjukkan bahwa media *online* Kompas.com membangun citra yang baik terhadap Kebijakan SKB 3 Menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Media *online* Kompas.com lebih menonjolkan bahwa SKB 3 Menteri ini dikeluarkan untuk kemaslahatan bersama dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada. Sedangkan, Republika.co.id lebih memandang luas dari pendapat para petinggi dalam menyikapi SKB 3 Menteri ini. Sehingga Republika.com memberikan kesan mengkritisi tentang munculnya aturan SKB 3 Menteri ini.

Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah peristiwa atau kasus yang diteliti sama-sama berkaitan dengan isu jilbab yang terjadi di SMKN 2 Padang. Namun perbedaannya terletak pada fokus isu yang diteliti. Penelitian tersebut lebih fokus kepada *framing* SKB 3 Menteri, sementara penulis lebih fokus kepada isu polemik jilbabnya sebagaimana yang terjadi di SMKN 2 Padang. Di sisi lain, penelitian tersebut tergolong kepada pendekatan ekonomi-politik dalam menjelaskan isi media, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kulturalis dalam studi media. Selain itu perbedaan penelitian tersebut dengan

peneliti terletak pada salah satu objek penelitian yang ingin dibandingkan *framingnya* yaitu jika penelitian tersebut ingin membandingkan *framing* *Republika Online* dengan *Kompas.com*, peneliti ingin membandingkan *framing* *Republika Online* dengan *Detik.com*, pada periode waktu yang diteliti.

*Kedua*, penelitian oleh Aisyah Fadhilah dan Yuli Candrasari (2021) yang berjudul “*Pembingkai Berita SKB 3 Menteri Tentang Atribut Sekolah Pada Media Online Republika.co.id Dan Kompas.com Periode Februari 2021.*” Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana pemberitaan mengenai SKB 3 Menteri tentang Atribut Sekolah ini dibingkai oleh *Republika.co.id* dan *Kompas.com*. Menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman, temuan penelitian menunjukkan bahwa *Republika.co.id* membuat bingkai bahwa SKB 3 Menteri merupakan peraturan yang bermasalah terutama ketika diterapkan di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan bingkai yang dibentuk *Kompas.com* yakni sebenarnya yang menjadi permasalahan terletak pada unsur pemaksaan pada penggunaan atribut agama yang tidak sesuai dengan keyakinan seseorang, bukan melarang penggunaan seragam dengan atribut agama di lingkungan sekolah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah peristiwa atau kasus yang diteliti sama-sama berkaitan dengan isu jilbab yang terjadi di SMKN 2 Padang dan model analisis *framing* yang digunakan model Robert N. Entman. Namun perbedaan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada fokus isu yang diteliti. Jika penelitian tersebut focus isu yang diteliti lebih kepada *framing* SKB 3 Menteri dengan Rentang waktu berita yang diteliti 3 Februari 2021 hingga 1 Maret 2021, penulis lebih memfokuskan isu yang diteliti kepada polemik jilbab di SMKN 2 Padang pada rentang waktu pemberitaan antara tanggal 21 Januari 2021 hingga 2 Februari 2021. Dengan kata lain, penulis hendak menganalisis dinamika pemberitaan mengenai polemik pemakaian jilbab bagi siswa nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang mulai dari momentum ketika Ayah siswi bernama Jeni Cahyani Hia, mengunggah video siaran langsung, hingga sebelum diterbitkannya SKB Tiga Menteri, sedangkan penelitian Aisyah Fadhilah dan Yuli Candrasari tersebut semenjak diterbitkannya SKB Tiga Menteri hingga dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil nomor perkara 17/P/HUM/2021 yang

diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai pemohon. Disamping itu perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti terletak pada salah satu objek penelitian yang ingin dibandingkan yaitu jika penelitian tersebut ingin membandingkan *framing* *Republika Online* dengan *Kompas.com*, peneliti ingin membandingkan *framing* *Republika Online* dengan *Detik.com*, pada periode waktu yang diteliti.

*Ketiga*, penelitian oleh Rifa Yanas (2020) dengan judul “*Pemberitaan Calon Presiden dan Wakil Presiden Selama Kampanye Pemilu 2019 (Analisis Framing Berita Halaman Utama di Harian Padang Ekspres, Harian Umum Singgalang dan Harian Haluan)*.” Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan kecenderungan media *Harian Padang Ekspres*, *Harian Umum Singgalang* dan *Harian Haluan* dalam memberitakan calon presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan model analisis *framing* William A Gamson, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga media cetak sebagai objek penelitian dideskripsikan memiliki pembingkai dengan ide sentral yang beragam. *Harian Padang Ekspres* dan *Harian Umum Singgalang* cenderung berpihak kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yaitu Prabowo-Sandi, sedangkan *Harian Haluan* lebih konsisten memihak kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 yaitu Jokowi-Maruf.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rifa Yanas dengan penulis adalah dari segi topik yang diangkat, model *framing* yang digunakan serta jenis media yang diteliti. Penelitian tersebut mengangkat topik seputar pemberitaan calon presiden dan wakil presiden selama kampanye pemilu, sedangkan penulis mengangkat topik tentang polemik jilbab (seputar isu agama). Model *framing* yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model William A Gamson, sedangkan penulis menggunakan model *framing* Robert N. Entman. Penelitian tersebut meneliti media cetak sebagai subjek penelitian, sedangkan penulis meneliti media *online*. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama menggunakan analisis *framing* sebagai pendekatan penelitian.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Retno Sari Handayani (2020) yang berjudul “*Konstruksi Realitas Media: Analisis Framing Pemberitaan Metro TV dan TV One pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019*.”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis Metro TV dan TV One dalam mengkonstruksi pemberitaan pada hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019. Menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman, temuan penelitian menunjukkan bahwa ada upaya edukatif pada program siaran langsung, yang terlihat pada pemilihan narasumber serta dialog yang dibangun oleh awak media. Selain itu, kedua media memaknai berbeda pemungutan suara yang sedang berjalan. Metro TV memaknai hari pemungutan suara berjalan lancar dan kandidat turut mempengaruhi jalannya pemilu yang berjalan damai. Sementara itu, TV One membingkai Pemilu 2019 masih berjalan dengan berbagai persoalan bagi pemilih yang harus memilih untuk lima jenis pemilihan yang berbeda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media turut berperan dalam membingkai Pemilu 2019 yang terpusat pada Pilpres, daripada jenis pemilihan yang lain. Selanjutnya berdasarkan wawancara ditemukan ada perubahan pertimbangan TVOne dalam menyeleksi isu dibandingkan pada Pemilu 2014, yang didasari pula pada sikap politik sang pemilik media. Sementara Metro TV secara garis besar masih bersikap sama sebagaimana pada Pemilu 2014.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah dari segi topik yang diangkat dan jenis media yang diteliti. Penelitian tersebut mengangkat topik seputar pemberitaan pada hari pemungutan suara pemilihan umum sedangkan penulis mengangkat topik tentang polemik jilbab (seputar isu agama). Retno Sari Handayani meneliti media televisi sebagai subjek penelitiannya, penulis meneliti media *online*. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman.

*Kelima*, penelitian oleh Uky Firmansyah (2019) dengan judul “*Konstruksi Berita Pemecatan Dosen Bercadar di IAIN Bukittinggi (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Konstruksi antara Kedisiplinan atau Cadar Pada Media Tribun, Viva dan Republika)*.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Dengan menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, didapatkan hasil bahwa media *Tribun* dalam membingkai berita mengarahkan pembaca kepada persoalan disiplin (tidak masuk kerja) yang menyebabkan Hayati Dosen IAIN

Bukittinggi diberhentikan. Sedangkan *Viva* dalam membingkai berita menunjukkan bahwa Hayati diberhentikan karena polemik cadar. Sementara *Republika* memberikan *frame* bahwa Hayati dipecat murni sebab tidak masuk kerja. Namun disisi lain *Republika* juga menjelaskan kejanggalan yang dirasakan oleh Hayati mengenai cadar, yang menjadi awal dari masalah ia dipecat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Uky Firmansyah dengan penulis adalah dari segi model analisis *framing* yang digunakan. Uky Firmansyah menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penulis menggunakan model Robert N. Entman. Sedangkan persamaannya terletak pada salah satu subjek penelitiannya yaitu *Republika Online*.

*Keenam*, penelitian oleh Regia Fiorentina, Mayasari dan Fajar Hariyanto (2018) yang berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan “Reuni Akbar 212” Analisis Framing Model Robert N. Entman Media Online Kompas.com dengan Republika.co.id Edisi 26 November 2017-9 Desember 2017.*” Tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah ideologi yang dipegang oleh Kompas.com dengan Republika.co.id mempengaruhi pbingkaiian (*framing*) dalam kasus peristiwa Reuni Akbar 212. Dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman, dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa perbedaan ideologi masing-masing media terbawa pada pemberitaan kegiatan Reuni Akbar 212, Kedua media tersebut memaknai dan memandang kegiatan Reuni Akbar 212 secara berbeda. *Kompas.com* cenderung memandang peristiwa Reuni Akbar 212 kegiatan yang bermuatan politik sedangkan *Republika.co.id* memandang kegiatan Reuni Akbar 212 jangan sampai disalahgunakan sebagai suatu kegiatan yang melenceng dari tujuan utama diselenggarakannya kegiatan tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Regia Fiorentina dan kawan-kawan dengan penulis lakukan adalah dari sisi topik yang diangkat sebagai objek penelitian. Penelitian tersebut mengangkat topik seputar pemberitaan Reuni Akbar 212 sebagai objek penelitian, sedangkan penulis isu polemik jilbab di SMK 2 Padang. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah model analisis *framing* yang digunakan yaitu Robert N. Entman.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Silvina Mayasari (2017) dengan judul “Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas dan Republika”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis konstruksi media pada pemberitaan Aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama di dua (2) surat kabar nasional, yaitu *Kompas* dan *Republika*. Dengan menggunakan model analisis *framing* Gamson dan Modigliani, didapatkan hasil bahwa pada kategori isu ‘Aksi Damai Menuntut Penegakan Hukum Terhadap Ahok atau SARA?’ *Kompas* tidak menyebutkan secara tegas apakah aksi tersebut adalah penuntutan hukum atau aksi SARA. *Republika* menyebutkan secara tegas bahwa aksi tersebut adalah aksi penuntutan hukum terhadap Ahok bukan aksi SARA. Pada Kategori isu ‘Pemerintah Kawal Aksi Damai’ baik *Kompas* maupun *Republika* menyatakan secara tegas bahwa pemerintah mengawal aksi ini dengan baik. Pada kategori isu ‘Pengaruh Aksi Damai Terhadap Perekonomian Indonesia’ *Kompas* hanya menyampaikan harapannya bahwa aksi damai akan berjalan kondusif sehingga tidak mempengaruhi dunia usaha. Sedangkan *Republika* dengan jelas menyatakan bahwa Aksi Damai tidak akan mempengaruhi pasar keuangan karena sudah diprediksi berjalan lancar.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Silvina Mayasari dengan penulis adalah model *framing* yang digunakan. Silvina Mayasari menggunakan model Gamson dan Modigliani, penulis menggunakan model Robert N. Entman. Perbedaan lainnya terletak pada jenis media yang diteliti. Silvina Mayasari meneliti media cetak, sedangkan penulis meneliti media *online* sebagai subjek penelitian. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah dari sisi topik yang diangkat yakni masih seputar isu agama.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Devi Ambarsari dan Amalia Rosyadi Putri (Jurnal Kopis : Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 4 No. 1, Institut Agama Islam Tribakti, Kediri, 2021)	Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pemakaian Identitas Agama pada Seragam Sekolah di Media Online Kompas.com dan Republika.com	Isu Jilbab di SMKN 2 Padang.	Model <i>framing</i> yang digunakan. Salah satu objek penelitian. Fokus isu yang diteliti : <i>framing</i> SKB 3 Menteri. Rentang waktu berita yang diteliti.
2.	Aisyah Fadhilah dan Yuli Candrasari (Jurnal Dialektika Komunika, Vol. 9 No. 1, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, 2021)	Pembingkaiian Berita SKB 3 Menteri Tentang Atribut Sekolah Pada Media Online Republika.Co.Id Dan Kompas.Com Periode Februari 2021	Isu Jilbab di SMKN 2 Padang. Analisis framing model Robert N. Entman.	Fokus isu yang diteliti : SKB 3 Menteri. Rentang waktu berita yang diteliti. Salah satu objek penelitian.
3.	Rifa Yanas (Tesis, Universitas Andalas, Padang 2020)	Pemberitaan Calon Presiden dan Wakil Presiden Selama Kampanye Pemilu 2019 (Analisis Framing Berita Halaman Utama di Harian Padang Ekspres, Harian Umum Singgalang dan Harian Haluan)	Pendekatan penelitian : sama-sama menggunakan analisis <i>framing</i> .	Topik yang diangkat, model <i>framing</i> yang digunakan serta jenis media yang diteliti.
4.	Retno Sari Handayani (Tesis, Universitas Andalas, Padang 2020)	Konstruksi Realitas Media: Analisis Framing Pemberitaan Metro TV dan TV One pada Hari Pemungutan Suara	Sama-sama menggunakan analisis framing model Robert N. Entman.	Topik yang diangkat dan jenis media yang diteliti.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Pemilihan Umum Tahun 2019)		
5.	Uky Firmansyah (Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 10 No. 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).	Konstruksi Berita Pemecatan Dosen Bercadar di IAIN Bukittinggi (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Konstruksi antara Kedisiplinan atau Cadar Pada Media Tribun, Viva dan Republika).	Salah satu subjek penelitiannya yaitu Republika Online.	Model analisis <i>framing</i> yang digunakan. Uky Firmansyah menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penulis menggunakan model Robert N. Entman.
6.	Regia Fiorentina, Mayasari dan Fajar Hariyanto (Jurnal Politikom Indonesia Vol. 2 No. 3, Universitas Singaperbangsa, Karawang 2018)	Analisis Framing Pemberitaan “Reuni Akbar 212” Analisis Framing Model Robert N. Entman Media Online Kompas.com dengan Republika.co.id Edisi 26 November 2017-9 Desember 2017	Model analisis <i>framing</i> yang digunakan sama-sama Robert N. Entman.	Objek penelitian. Regia Fiorentina, dkk : berita tentang reuni akbar 212. Penulis : isu polemik jilbab di SMK 2 Padang.
7.	Silvina Mayasari (Jurnal Komunikasi, Volume VIII Nomor 2, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, 2017)	Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas dan Republika	Topik yang diangkat seputar isu agama.	Model <i>framing</i> yang digunakan dan Jenis Media yang diteliti.

Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa pada pemberitaan yang disajikan oleh media kepada khalayak, isu atau peristiwa yang sama, ditampilkan dan dimaknai berbeda media. Hal tersebut dikarenakan adanya pembedaan yang dilakukan oleh media. Media menampilkan berita dengan *frame* tertentu. Pemilihan isu yang diangkat serta aspek penonjolan suatu peristiwa secara tidak langsung menggambarkan subjektivitas media dan orang-orang didalamnya serta bagaimana perspektif dan media memposisikan diri dalam sebuah isu yang disuguhkan kepada khalayak.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

### **2.2.1 Peran Media**

Menurut Gurevitch (1990: 270), media komunikasi massa atau media massa memiliki peranan yaitu sebagai alat kontrol sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun pihak masyarakat. Selain itu, media juga berperan sebagai pembentuk opini dengan cara pembentukan agenda atau pengkondisian politik sehingga masyarakat terpengaruh untuk mengikuti rencana-rencana pemerintah. Media massa juga mampu menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat atau di antara pemegang kekuasaan.

Adanya media sangat mempengaruhi dalam penyebaran isu. Meskipun begitu, karena banyaknya pemberitaan yang beredar, menimbulkan isu-isu yang simpang siur dan diragukan kebenarannya. Ketergantungan masyarakat terhadap media terutama media berdampak pada pembentukan opini, sikap maupun perilaku masyarakat.

Peran media sangatlah penting karena mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, informasi-informasi yang disampaikan tidak bisa langsung di percaya begitu saja. Informasi-informasi tersebut harus disaring terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan informasi sehingga tidak menimbulkan perselisihan serta masyarakat harus pandai dalam mengolah informasi yang mereka dapat dari media massa.

Menurut Gunadi (1988:88), media massa dalam masyarakat berperan antara lain. *Pertama*, menjaga kepentingan umum, informasi yang disampaikan media massa membuat masyarakat sadar akan kepentingan mereka, dalam artian tidak mengganggu, tetapi akan menguntungkan dengan adanya pembangunan. *Kedua*, membentuk opini, kesadaran ini menggugah pemikiran dan pembahasan serta dialog yang akhirnya membawa kepada satu kesamaan pendapat. *Ketiga*, mendidik, semakin luas dan semakin banyak pembangunan akan mendorong masyarakat untuk semakin giat dalam mencari pengetahuan baru.

Media massa yang berperan dan berfungsi sebagai penyebar informasi bagi masyarakat saat ini sangatlah penting bagi masyarakat, para pejabat dan para petinggi negeri yang akan haus dengan informasi. Media massa yang kini telah bertransformasi dengan perkembangan yang ada, saat ini sudah sangat mudah untuk diakses dan dinikmati oleh masyarakat.

### **2.2.2 Media Online**

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah melahirkan jenis baru dalam media massa. Saat ini media tidak hanya cetak dan elektronik, tetapi kini ada media massa jenis baru, yakni media *online*. Media *online* merupakan jenis media yang menggabungkan antara teks, audio, dan visual. Sifatnya *up to date*, dan *real time*, menjadikan media *online* sebagai media yang populer dan banyak diakses oleh masyarakat pada saat ini mengalahkan media cetak dan elektronik (Yunus, 2010: 32).

Sifatnya yang praktis, yakni mudah diakses kapan saja dan dimana saja, menjadikan media *online* alternatif media bagi orang dengan mobilitas yang tinggi. Selain kepraktisannya, keunggulan lain media *online* adalah tersedianya fasilitas *hyperlink*, yaitu sistem koneksi antara website ke *website* lain (Yunus, 2010: 33). Fasilitas *hyperlink* dapat dengan mudah menghubungkan dari satu situs ke situs lainnya sehingga pengguna dapat mencari atau memperoleh informasi lainnya.

Rafaeli dan Newhagen (Santana, 2005:133) mengidentifikasi lima perbedaan utama yang ada di antara jurnalisme *online* dan media massa tradisional, antara lain : kemampuan internet untuk mengkombinasikan sejumlah media, kurangnya tirani penulis atas pembaca, tidak seorang pun dapat

mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung, dan interaktivitas *web*.

### **2.2.3 Karakteristik Berita pada Media Online**

Berita yang dianalisis menggunakan *framing* dapat diperoleh dari media konvensional atau media *online*. Namun, media-media ini memiliki karakteristik yang berbeda, seperti halnya media *online* yang cepat, *update* dan fleksibel (Romli, 2012: 37-38). Berita pada media *online* unggul dalam hal kecepatan dibandingkan media cetak. Ini juga mempengaruhi isi berita yang terdapat di media tersebut.

Berita pada media *online* disajikan hanya berselang waktu singkat setelah peristiwa. Bahkan, isinya pun tidak menjelaskan seluruh unsur pertanyaan 5W+H (*What, who, where, when, why, how*). Ada berita yang hanya menjelaskan dua atau tiga unsur pertanyaan tersebut. Ini yang berbeda dengan media cetak, di mana media cetak lebih memberitakan secara rinci dan cenderung menjelaskan 5W+H dengan jelas. Dengan demikian, berita pada media cetak umumnya lebih panjang dari media *online* untuk kategori *hard news*.

Media *online* dapat menerbitkan dua berita atau bahkan lebih dan ini diperoleh dari satu peristiwa saja. Terkadang berita-berita tersebut lebih mengutamakan kepentingan media tanpa memikirkan pihak mana yang dirugikan atas berita tersebut. Berita yang ditampilkan oleh media cenderung lebih berfokus pada keuntungan seberapa besar berita tersebut dapat menarik perhatian khalayak.

### **2.2.4 Nilai Berita**

Ada beberapa karakteristik intrinsik dalam berita yang dikenal sebagai nilai berita (*news value*). Nilai berita ini menjadi ukuran yang berguna atau yang biasa diterapkan untuk menentukan layak berita (*newsworthy*) (Iswara, 2007:53). Nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, seperti para reporter dan editor serta pemimpin redaksi, untuk menentukan informasi atau fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik.

Adapun kriteria atau unsur-unsur nilai berita yang dipakai dalam memilih berita (Kusumaningrat, 2014:61-66) adalah sebagai berikut :

- a. Aktualitas (*Timeliness*), kecepatan atau kebaruan berita yang disajikan. Semakin actual beritanya, semakin baru peristiwa yang terjadi, semakin tinggi nilai beritanya.
- b. Kedekatan (*Proximity*), peristiwa yang mengandung kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian. Unsur kedekatan ini tidak selalu kedekatan secara fisik (geografis), tetapi juga kedekatan secara emosional.
- c. Keterkenalan (*Prominence*), kejadian yang menyangkut tokoh terkenal (*prominent names*) akan menarik banyak pembaca. Nama-nama terkenal ini tidak harus diartikan orang saja, tetapi bisa tempat-tempat terkenal, peristiwa terkenal, tanggal-tanggal terkenal dan situasi-situasi terkenal, memiliki pula nilai berita yang tinggi.
- d. Dampak (*Consequence*), peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, memiliki nilai berita tinggi.
- e. *Human Interest*, memiliki hal-hal yang menarik minat orang. Dalam berita human interest, terkandung salah satu unsur dibawah ini :
  - 1) Ketegangan (*Suspense*), elemen ini menunjukkan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap sebuah peristiwa oleh masyarakat.
  - 2) Ketidaklaziman (*Unusualness*), kejadian yang tidak lazim atau sesuatu yang aneh akan memiliki daya tarik yang kuat untuk dibaca.
  - 3) Minat Pribadi (*Personal Interest*)
  - 4) Konflik (*Conflict*), peristiwa atau kejadian yang mengandung pertentangan senantiasa menarik pembaca.
  - 5) Simpati (*Sympathy*)
  - 6) Kemajuan (*Progress*)
  - 7) Seks (*Sex*).

### 2.2.5 *Clickbait*

Strategi membuat judul berita pada media *online* menjadi bombastis, membuat penasaran, atau membingungkan yang mampu menggugah pembaca untuk mengklik tautan berita tersebut. Judul seperti ini disebut *clickbait*, yaitu judul yang menggoda pembaca yang biasanya menggunakan bahasa provokatif untuk menarik perhatian (Anand, 2017:541). Secara umum, penggunaan judul artikel *clickbait* banyak digunakan oleh media-media *online* untuk menarik minat

pembaca dengan mengusik rasa penasaran yang timbul akibat adanya kesenjangan informasi antara apa yang pembaca ketahui dan apa yang ingin pembaca ketahui.

Media *online* menggunakan *clickbait* karena ada aspek ekonomi yang mereka kejar. Dengan *clickbait* pengguna media *online* akan tergoda untuk masuk dalam *web* mereka. Semakin mereka masuk dengan mengklik *page view* akan membentuk akumulasi pengunjung. Jika pengunjung yang datang ke media tersebut banyak, maka pemilik produk barang dan jasa kemungkinan akan berminat untuk beriklan di media atau *web* mereka. Tujuan utama dari penggunaan judul artikel *clickbait* adalah mengarahkan pengguna media *online* agar statistik kunjungan meningkat yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh pendapatan melalui iklan.

Ada delapan tipe *clickbait* menurut Biyani, Tsioutsoulis, dan Blackmer (2016:95) yaitu :

1. *Exaggeration* (hiperbolis), merupakan judul yang berlebihan pada halaman URL (*uniform resource locator*).
2. *Teasing* (menggoda), merupakan judul yang mengolok-olok atau mencoba memprovokasi seseorang dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan cara menghapus rincian dari judul dengan tujuan untuk membangun ketegangan atau menggoda.
3. *Inflammatory* (menghasut), adalah judul yang bermaksud membangkitkan perasaan marah atau penuh kekerasan dengan menggunakan ungkapan atau penggunaan katakata yang tidak tepat/vulgar.
4. *Formatting* (mengubah), adalah judul yang terlalu sering menggunakan huruf kapital atau tanda baca, terutama huruf kapital atau tanda seru.
5. *Graphic* (grafis), adalah judul yang mengandung materi yang cabul, mengganggu/menjijikkan atau tidak dapat dipercaya.
6. *Bait-and-Switch* (umpan dan beralih), adalah hal yang dituliskan/tersirat dari judul tidak ada di url: memerlukan klik tambahan atau sama sekali tidak ada.
7. *Ambiguous* (ambigu), adalah judul yang tidak jelas atau membingungkan dengan tujuan untuk memicu keingintahuan (*title unclear or confusing to spur curiosity*).

8. *Wrong* (salah), adalah judul maupun artikel yang salah: fakta yang tidak benar

## 2.3 Kerangka Teori

### 2.3.1 Teori *Framing*

*Framing* dalam konteks komunikasi massa dipandang sebagai sebuah teori dan sebuah proses. Ini ditegaskan dalam *Dictionary of Mass Communication* yang menyatakan bahwa *framing* adalah teori atau proses tentang bagaimana pesan media massa memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias. Dalam pemahaman Entman, *frame* bukan hanya sebuah metode analisis teks, melainkan lebih jauh adalah suatu teori (Eriyanto, 2012: 332).

Adapun yang menjadi dasar teori *framing* adalah bahwa media memusatkan perhatian pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkannya ke dalam sebuah bidang makna. Beberapa buku pengantar (Baran & Davis, 2006; McQuail, 2010) menyebut Erving Goffman sebagai peletak dasar teori *framing* yang kemudian dikembangkan untuk kajian media oleh sarjana-sarjana lainnya (Prajarto, 2015:11).

Teori *framing* dapat dilihat dari dua tradisi, yaitu psikologi dan sosiologi (Eriyanto, 2012:82–83). Psikologi melihat bagaimana pengaruh kognisi seseorang dalam membentuk skema tentang diri, sesuatu atau gagasan tertentu. Sementara dari sosiologi teori *framing* dipengaruhi oleh pemikiran Erving Goffman yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya secara aktif mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan pengalaman hidup ini agar punya arti dan makna. Setiap tindakan manusia pada dasarnya mempunyai arti dan manusia berusaha memberi penafsiran atas perilaku tersebut agar bermakna dan berarti. Sebagai akibatnya, tindakan manusia sangat tergantung pada *frame* atau skema interpretasi dari seseorang.

Gagasan mengenai *frame* mulanya dilontarkan oleh Beterson tahun 1955, yang dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2018:161–162). Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strip of*

*behaviour*) yang membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur, 2018:162).

Analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media, dimana pembingkaiian tersebut melalui proses konstruksi (Eriyanto, 2012:3). Realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Bagaimana media memahami dan memaknai realitas, dengan cara apa realitas itu ditandakan, hal inilah yang menjadi pusat perhatian dari analisis *framing* (Eriyanto, 2012:4). Konsep *framing* digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media.

Analisis *framing* dalam perspektif komunikasi dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengonstruksi fakta (Sobur, 2018:162). Analisis *framing* melihat bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberitakan (Eriyanto, 2012:10). Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2018:162). Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang dan perspektif itu pada akhirnya menentukan apa fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Sobur, 2018:162).

Menurut George J. Aditjondro (Sobur, 2018:165), *framing* didefinisikan sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang sesuatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Proses *framing* merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media.

Pusat perhatian dalam analisis *framing* adalah pembentukan pesan dari teks, bukan isi (*content*) dari suatu pesan/teks komunikasi. *Framing* terutama

melihat bagaimana pesan/peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca.

Intinya ada 2 (dua) esensi utama dari *framing*, yaitu : *pertama*, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. *Kedua*, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Jadi, dalam penelitian *framing*, yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Lebih spesifik, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu.

### 2.3.2 Model *Framing* Robert N. Entman

Robert N. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isi media. Entman melihat *framing* dalam 2 (dua) dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu (Eriyanto, 2012: 221).

**Tabel 2. 2 Dua Unsur *Framing* Media Versi Entman**

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan ( <i>included</i> ), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan ( <i>excluded</i> ). Tidak semua aspek atau bagian isu yang ditampilkan. Wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Sumber : Eriyanto, 2012:222

Aspek memilih isu berkaitan dengan pemilihan fakta. Bagian mana yang akan diliput oleh wartawan dari suatu isu/peristiwa. Aspek memilih fakta tidak dapat dilepaskan dari bagaimana fakta itu dipahami oleh media. Ketika melihat suatu peristiwa, wartawan memakai kerangka konsep dan abstraksi dalam

menggambarkan realitas. Proses memilih fakta ini menimbulkan akibat lebih jauh, karena ketika fakta didefinisikan, maka dalam hal tersebut selalu terjadi pemilihan, yang dalam arti tertentu dapat berupa penonjolan, yang mengakibatkan penghilangan atas bagian tertentu dari realitas. Proses pemilihan fakta ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bagian dari teknis jurnalistik, tetapi juga politik pemberitaan, yaitu bagaimana dengan cara dan strategi tertentu media secara tidak langsung telah mendefinisikan realitas.

Penonjolan aspek tertentu dari suatu isu ini sangat berkaitan dengan penulisan fakta. Proses ini sangat berhubungan dengan pemakaian bahasa dalam menuliskan realitas untuk dibaca oleh khalayak. Pilihan kata-kata tertentu dipakai tidak sekedar teknis jurnalistik, tetapi sebagai politik bahasa. Bagaimana bahasa dapat menciptakan realitas tertentu kepada khalayak. Kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga membatasi persepsi kita dalam mengarahkannya pada cara berfikir dan keyakinan tertentu. Dengan kata lain, kata-kata yang dipakai dapat membatasi seseorang melihat perspektif lain, menyediakan aspek tertentu dalam suatu peristiwa dan mengarahkan bagaimana khalayak harus memahami suatu peristiwa. Tetapi yang lebih penting bagaimana kata-kata sesungguhnya dapat mengarahkan logika tertentu untuk memahami persoalan.

Menurut Entman, *framing* dalam berita dilakukan dengan 4 (empat) cara (Sobur, 2018:172), yaitu : pertama, *define problems* (pendefinisian masalah), merupakan elemen yang pertama kali dilihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan *master frame*/bingkai yang paling utama, yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda, dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.

Kedua, *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah). Merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai

sumber masalah. Karenanya, masalah yang dipahami berbeda, penyebab masalahnya secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.

Ketiga, *make moral Judgement* (membuat pilihan moral). Merupakan elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Keempat, *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian tersebut sangat tergantung pada bagaimana peristiwa tersebut dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

**Tabel 2. 3 Empat Elemen Perangkat *Framing* Entman**

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai Apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

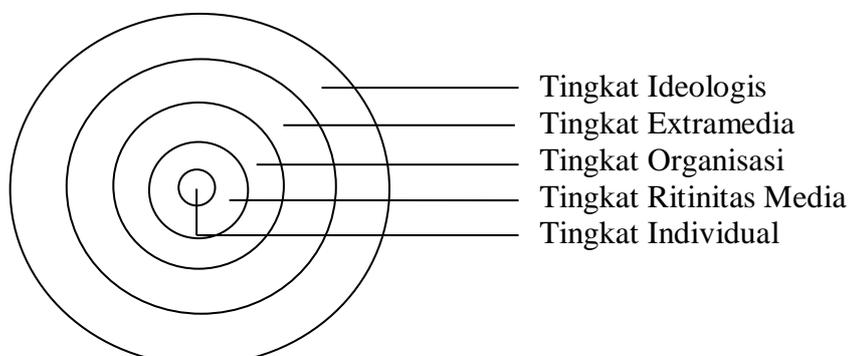
Sumber : Eriyanto, 2012:223-224

### 2.3.3 Teori Hirarki Pengaruh Isi Media

Banyak faktor yang mempengaruhi media dalam menyajikan berita kepada khalayak. Pada dasarnya, apa yang disajikan media adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam. Faktor tersebut bisa berasal dari dalam atau luar media. Inilah yang diungkapkan dan diperkenalkan oleh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese. (1996) dalam teori hirarki pengaruh isi media (*Theories of Influences on Mass Media Content*).

Asumsi dari teori ini adalah bagaimana isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten media sebenarnya berhubungan dengan kepentingan dari pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada konten media berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah masyarakat dan faktor eksternal lainnya. Stephen D. Reese mengemukakan bahwa isi pesan media atau agenda media merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi media. Dengan kata lain, isi atau konten media merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal yang berasal dari sumber-sumber non media, seperti individu-individu berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya.

Media massa pada dasarnya sangat sulit bersikap netral karena mereka dihantui oleh berbagai kepentingan, belum lagi aspek ideologi. Berbagai kepentingan bisnis maupun politik sangat berpengaruh pada bagaimana membingkai peristiwa tertentu.



Sumber: Pameela J Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996:64)

**Gambar 2. 1 Teori Hirarki Pengaruh Isi Media**

Ada 5 (lima) faktor yang sangat mempengaruhi pemberitaan yang disajikan oleh media, sesuai dengan gambar di atas. *Pertama* adalah *individual level*. Faktor individual, berkaitan dengan pengaruh individu pekerja media, diantaranya adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang personal dan profesional (Sobur, 2018:138). Ini berhubungan dengan bagaimana wartawan dalam menulis berita.

*Kedua* adalah *media routines level*, yang berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Karenanya rutinitas media mempengaruhi wujud akhir sebuah berita.

*Ketiga* adalah *organization level* yang berhubungan dengan manajemen dan kebijakan redaksi dalam menentukan isi berita. Setiap organisasi media mempunyai filosofi organisasi sendiri yang mempengaruhi bagaimana wartawan bersikap dan bagaimana seharusnya peristiwa disajikan dalam berita.

*Keempat* adalah *extramedia level* berhubungan dengan faktor lingkungan luar yang mempengaruhi pemberitaan media. Yang termasuk dalam lingkungan di luar media (Sudibyo, 2001:10–13), antara lain, *Sumber Berita*, yang dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral yang memberikan informasi apa adanya, tetapi juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan seperti memenangkan opini publik atau memberi citra tertentu kepada khalayak. Sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, sumber berita sudah barang tentu memberlakukan politik pemberitaan. Informasi yang diberikan merupakan informasi yang dianggap baik dan menguntungkan bagi dirinya, sebaliknya mengeliminasi informasi yang sekiranya tidak menguntungkan dirinya. *Sumber Penghasilan Media*, bisa berupa iklan, bisa juga berupa pelanggan/pembeli media. Dasar pemikirannya, media harus *survive* dan untuk memenuhi tuntutan tersebut, kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Pengiklan ingin kepentingannya dipenuhi, yang diantaranya dilakukan dengan cara memaksa media untuk mengembargo berita buruk mengenai mereka.

*Pihak eksternal seperti Pemerintah dan Lingkungan Bisnis.* Ini berkaitan dengan *state regulation* dan *market regulation*. Dalam negara otoriter, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan. Karena negara menentukan apa yang boleh dan tidak boleh untuk diberitakan dan pemerintah memegang lisensi penerbitan. Nasib media berada ditangan pemerintah. Sedangkan di negara demokratis dan liberal, campur tangan negara nyaris tidak ada, yang memiliki pengaruh besar adalah lingkungan pasar dan bisnis.

*Kelima* adalah *ideological level* dimana pada level ini media tidak mungkin akan menyajikan berita yang sama persis karena ideologi tiap media pasti berbeda, maka ketika membuat sebuah berita akan memperhatikan nilai-nilai tersebut dan kita tidak bisa mengesampingkan faktor yang lainnya karena saling terkait satu dengan yang lainnya. Walaupun dianggap abstrak tapi sangat mempengaruhi sebuah media karena bersifat tidak memaksa dan bergerak di luar kesadaran keseluruhan organisasi media itu sendiri.

#### **2.3.4 Komodifikasi**

Komodifikasi berasal dari teori ekonomi politik yang merupakan pintu awal untuk mengamati realitas media sebagai institusi sosial sekaligus institusi bisnis. Vincent Mosco mendefinisikan pendekatan ekonomi politik sebagai sebuah studi yang membahas hubungan-hubungan sosial maupun hubungan kekuasaan yang bisa saling menguntungkan dalam membentuk proses ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber daya termasuk pesan komunikasi (Mosco, 2011:25-36). Teori ekonomi politik media ini akan membahas terkait korelasi antara struktur ekonomi politik, ideologi media dan dinamika industri media.

Pendekatan ekonomi politik media berasumsi bahwa konten media ditentukan oleh faktor kekuatan politik serta ekonomi seperti pemilik media, modal dan pendapatan. Semua faktor tersebut akan mempengaruhi konten sebagaimana yang ditampilkan dalam pemberitaan. Untuk memahami relasi tersebut, Mosco menawarkan tiga konsep penting yang dapat menjawab sejauh mana media mengambil posisi dalam kepentingan ideologi, ekonomi serta politik. Tiga konsep tersebut terdiri dari komodifikasi, spesialisasi dan strukturasi. Penelitian ini hanya akan membahas keterkaitan dengan komodifikasi.

Komodifikasi mengacu pada proses perubahan nilai guna menjadi nilai tukar. Nilai yang awalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjadi nilai tukar yang didasarkan pada kepentingan pasar (Mosco, 2009:129). Jika dikaitkan dengan produk media massa yaitu berita, maka komodifikasi akan merujuk kepada pemanfaatan isi atau konten berita di media massa. Ditangan kapitalis, nilai guna berita akan dikemas sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu berita yang bernilai tinggi. Dengan begitu media massa tersebut akan memperoleh keuntungan. Keuntungan ekonomi menjadi inti dilakukannya komodifikasi isi atau konten berita di media massa. Menurut Mosco ada tiga bentuk komoditas dalam komunikasi yang dijadikan sasaran komodifikasi, yaitu komodifikasi isi atau konten, komodifikasi khalayak dan komodifikasi pekerja.

Komodifikasi isi atau konten merupakan proses yang dilakukan media untuk memoles atau mengemas konten media massa yang kemudian dipasarkan demi kepentingan ekonomi semata. Konten atau isi media akan dirancang sedemikian rupa menjadi suatu produk (berita) yang sangat disukai oleh publik, Maka tidak ada konten atau isi media yang muncul ke publik tanpa adanya pengemasan atau polesan terlebih dahulu. Tidak mengherankan jika berita di media massa banyak dibumbui dengan hal-hal yang berbau sensasional dan dramatik untuk menarik perhatian khalayak (Haryono, 2019:108).

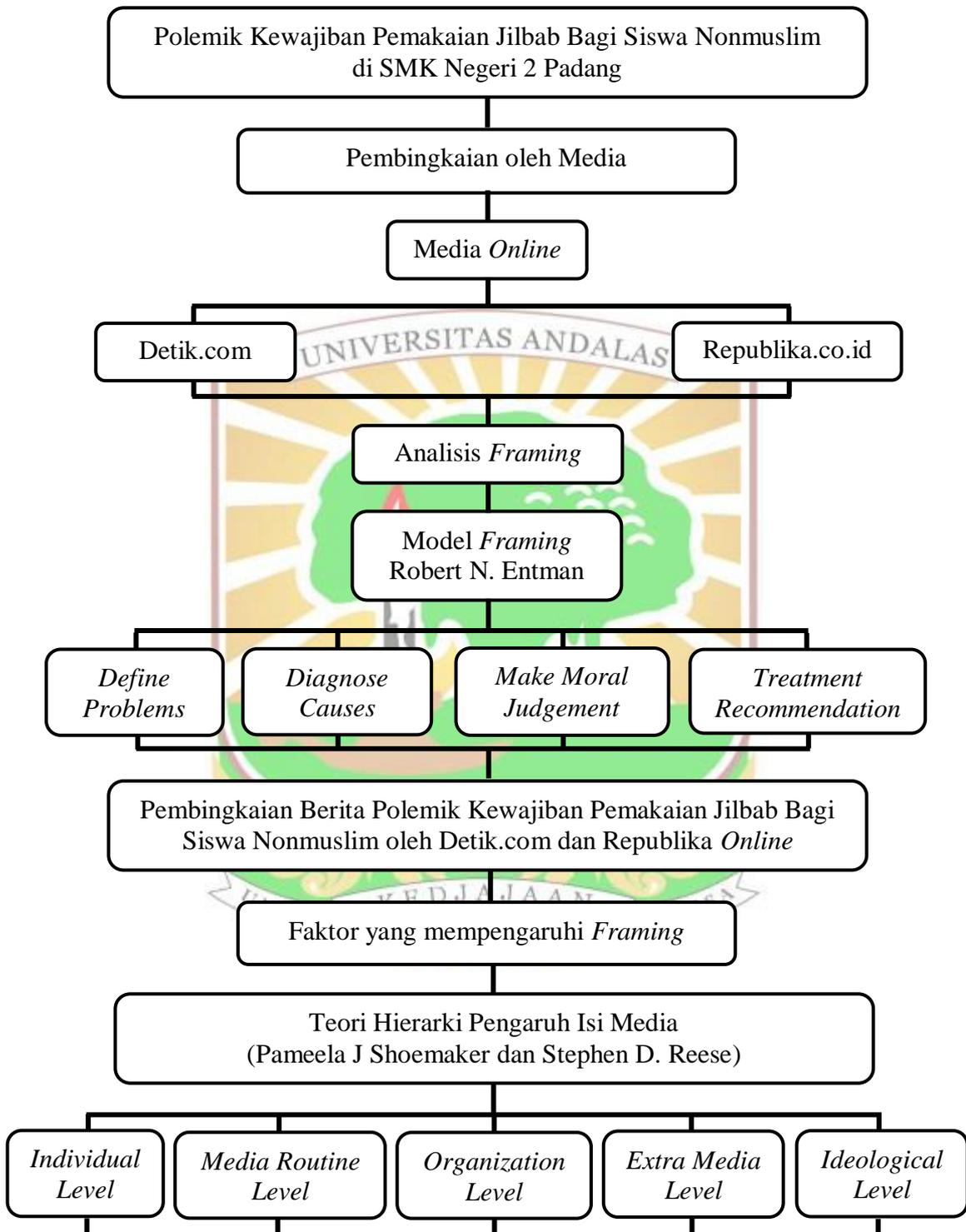
Komodifikasi khalayak berkaitan dengan *rating* yang diterima melalui konten media. *Rating* dari suatu konten media akan ditawarkan kepada pengiklan dengan khalayak sebagai tolak ukurnya. Komodifikasi khalayak adalah upaya yang dilakukan media untuk menjadikan khalayak sebagai komoditi yang bisa dijual kepada pengiklan sehingga menghasilkan keuntungan secara ekonomi (Mosco, 2009:136).

Komodifikasi pekerja berkaitan dengan pemilik modal memperlakukan pekerjaannya sebagai komoditi dengan memanfaatkan pikiran, kreativitas dan tenaga mereka secara optimal.

#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Menurut Uma Sekaran (Sugiyono, 2019:95), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka berdasarkan

kerangka teoritis yang telah dipaparkan, kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran ini diawali dengan ketertarikan penulis terhadap polemik jilbab bagi siswi non muslim yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang, yang menjadi polemik dan menimbulkan pro dan kontra, serta menjadi sorotan dan mengundang tanggapan para tokoh baik tingkat lokal maupun nasional. Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang ini, bahkan sampai menyebabkan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI (SKB Tiga Menteri).

Meluasnya kasus ini, tidak terlepas dari adanya pemberitaan oleh media, dimana media dalam memberitakan sebuah peristiwa tidak terlepas dari adanya pembingkaihan. Media bukanlah saluran yang bebas, apa yang disajikan media merupakan hasil pengaruh yang beragam. Adapun media yang diteliti adalah media *online* yaitu Detik.com dan Republika *Online*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis *framing*. Model analisis *framing* yang digunakan model *framing* Robert N. Entman. Dalam pandangan Entman, ada 2 (dua) dimensi besar yang dapat dilihat dalam analisis *framing*, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Kedua hal ini memiliki konsekuensi tentang fakta yang akan diambil, bagian yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta menentukan kemana arah berita yang akan disajikan kepada khalayak. Untuk mengetahui bagaimana *framing* dilakukan dalam berita, dilakukan dengan menggunakan empat elemen perangkat *framing* Entman, yaitu : *Define Problems* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral) dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian). Menggunakan empat elemen perangkat *framing* tersebut, nantinya akan diketahui pembingkaihan yang dilakukan oleh Detik.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan tentang polemik pemakaian jilbab bagi siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang.

Selanjutnya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi *framing* oleh media, digunakan teori Hirarki Pengaruh Isi Media yang dipopulerkan oleh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese. Terdapat lima level yang mempengaruhi isi media, yaitu level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level ekstra media, dan level ideologi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Masalah dan pertanyaan penelitian yang dirumuskan merupakan faktor penting penentu metode penelitian apa yang dipakai, karena metode penelitian adalah alat yang dipakai oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Afrizal, 2014:14). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang berdasarkan perspektif peneliti sendiri yang bertujuan memahami objek secara mendalam (Gunawan, 2015:80). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13). Dipilihnya metode kualitatif dalam penelitian ini karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang diteliti. Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka metode kualitatif adalah cara yang paling tepat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis *framing*. Analisis *framing* merupakan salah satu kategori analisis teks dan bahasa pada penelitian kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pembingkai media tentang isu seputar polemik pemakaian jilbab bagi siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang di media Detik.com dan Republika *Online*, maka analisis *framing* dirasa sebagai pendekatan yang cocok digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian, karena analisis *framing* merupakan analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media, dimana pembingkaiian tersebut melalui proses konstruksi.

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruksionis, karena analisis *framing* termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Paradigma konstruksionis pertama kali muncul dari konsep konstruksionisme yang dibawa oleh sosiolog Peter L. Berger, yang berpandangan bahwa sebuah realita itu

bersifat subjektif dan tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan realitas itu dibentuk dan dikonstruksikan (Eriyanto, 2002: 15- 18). Paradigma ini nantinya akan membantu peneliti melihat bagaimana media membingkai berita polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Kemudian dengan paradigma ini peneliti juga dapat melihat fakta-fakta apa yang ditampilkan dan tidak ditampilkan oleh media untuk mendukung makna realitas yang dibangun oleh berita tersebut.

Tipe atau jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual atau akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu dimana peneliti sudah mempunyai konsep dan kerangka konseptual dan melalui kerangka konseptual (landasan teori), peneliti melakukan operasionalisasi konsep yang akan menghasilkan variabel beserta indikatornya (Kriyantono, 2010:69).

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen, dimana kesadaran setiap orang atau kelompok, sikap dan nilai-nilai dan gagasan dapat diungkapkan dalam dokumen yang dihasilkan (Gunawan, 2015:176). Peneliti memutuskan analisis *framing* untuk memperoleh jawaban penelitian. Analisis *framing* dilakukan melalui data yang dikumpulkan dari pemberitaan terhadap isu seputar polemik pemakaian jilbab oleh siswa nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang, yang dipublikasikan oleh Detik.com dan Republika *Online*. Teknik dokumentasi merupakan data utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga didukung dengan data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal penelitian yang relevan, tesis, skripsi dan dokumentasi lainnya yang berkaitan.

#### 2. Wawancara.

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewier*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir pihak diwawancarai, yang relevan dengan masalah yang diteliti (Gunawan, 2015:162). Dalam penelitian ini proses tanya jawab

dilakukan peneliti kepada wartawan ataupun pihak-pihak yang mengetahui tentang kebijakan redaksi atau mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai strategi *frame* yang digunakan media bersangkutan. Wawancara dalam penelitian ini merupakan data pelengkap penelitian, sebagai tambahan data dan untuk memperkuat data yang diperoleh teknik dokumentasi.

### 3.3 Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan tujuan tertentu, misalnya karena orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Meleong, 2017:289). Adapun kriteria informan yang ditetapkan penulis adalah wartawan yang terlibat langsung dan mengetahui tentang kebijakan redaksi mengenai pemberitaan terkait isu jilbab di SMK 2 Padang, guna mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian.

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

No.	Nama	Latar Belakang Informan
1.	John Nedy Kambang	Wartawan Detik.com
2.	Febrian Fachri	Wartawan Republika <i>Online</i>

### 3.4 Data Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu analisis *framing*, yang merupakan salah satu kategori analisis teks dan bahasa pada kajian media, maka data penelitian ini adalah berupa teks media seputar polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang, dari pemberitaan yang dipublikasikan oleh Detik.com dan Republika *Online*. Rentang waktu pemberitaan yang dipilih antara tanggal 21 Januari 2021 hingga 2 Februari 2021. Artinya, penelitian ini menganalisis dinamika pemberitaan mengenai polemik pemakaian jilbab bagi siswa nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang mulai dari momentum ketika Ayah siswi bernama Jeni Cahyani Hia, mengunggah video siaran langsung, hingga sebelum diterbitkannya SKB Tiga Menteri.

Peneliti dalam mencari berita menggunakan fitur kolom *search* pada masing-masing media terkait fenomena atau isu yang diteliti, dengan kata kunci

“Kasus Jilbab SMKN 2 Padang”. Ini dikenal dengan penerapan *annotative journalism* dalam *online journalism*. *Online journalism* menerapkan *annotative journalism* adalah dengan meng-*klik* satu kata, bisa didapatkan informasi sebanyak yang tersedia (Ishwara, 2005: 46). Berita tersebut yang nantinya diambil sebagai data, untuk kemudian dianalisis.

Detik.com dalam kurun waktu yang diteliti, menampilkan berita tentang polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang sebanyak 21 berita dan Republika Online sebanyak 42 berita. Dari jumlah berita tersebut, peneliti hanya mengambil beberapa berita mewakili berita lainnya untuk dianalisis. Adapun cara menentukan berita yang dianalisis dapat dijelaskan sebagaimana berikut.

Sesuai dengan karakteristik media *online* sebagaimana yang telah dijelaskan pada kerangka konseptual, bahwa media *online* lebih mengutamakan kecepatan. Berita disajikan hanya berselang waktu singkat setelah peristiwa terjadi. Hal ini berpengaruh terhadap isi berita yang ditampilkan. Bisa saja berita yang disajikan tidak memenuhi semua unsur kelengkapan berita (5W +1H) dan bisa saja narasumber yang ditampilkan hanya dari satu pihak saja, nanti setelah di dapat narasumber dari pihak lainnya baru ditampilkan pula berita berikutnya. Dalam hari yang sama bisa saja ditampilkan beberapa berita tentang satu peristiwa. Dan biasanya, jika narasumbernya yang didapatkan sudah lengkap, berita-berita tentang sebuah peristiwa yang sama tadi digabungkan menjadi sebuah berita yang lengkap dengan memenuhi semua unsur kelengkapan berita dan dengan menampilkan semua narasumber dari berbagai pihak dalam sebuah rubrik tertentu.

Berdasarkan pertimbangan dan kriteria sebagaimana dimaksud diatas, adapun berita yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 2 Berita Detik.com sebagai Objek Penelitian**

No.	Tanggal	Judul
1.	23 Januari	"Maaf Kepsek Usai Geger Siswi Non Muslim Diminta di Padang Berjilbab."
2.	24 Januari	"Aturan Intoleran di Sekolah: Ketua OSIS Islam-Siswa Non Muslim Berjilbab"

No.	Tanggal	Judul
3.	25 Januari	"4 Pernyataan Tegas Nadiem Soal Siswi Non Muslim diminta Jilbaban."
4.	25 Januari	"Mencuat Urusan Jilbab Siswi Non Muslim Bikin Kepsek Siap Dipecat."

Berita yang dianalisis pada Detik.com sebanyak 4 (empat) berita yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sementara pada *Republika Online*, juga terdapat sebanyak 4 (empat) berita yang dianalisis sebagai objek penelitian, sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 3 Berita *Republika Online* sebagai Objek Penelitian**

No.	Tanggal	Judul
1.	25 Januari	"Kepala SMKN 2 Padang yang Siap Dipecat Usai Respons Nadiem"
2.	25 Januari	"MUI Respons Polemik Aturan Jilbab"
3.	26 Januari	"Opini Siswi Non-Muslim SMKN 2 Kenakan Jilbab di Sekolah"
4.	26 Januari	"MUI: Sudahi Polemik Jilbab di Sekolah"

Disamping itu, untuk memperkuat dan melengkapi data berupa teks media, penelitian ini juga menggunakan data dari hasil wawancara yakni wawancara dengan jurnalis Detik.com dan *Republika Online*.

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019: 320). Aktivitas dalam analisis

data pada penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data melalui *website* Detik.com dan *Republika Online*, untuk memperoleh berita tentang polemik Jilbab di SMK 2 Padang. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian diklasifikasikan atau dilakukan pengelompokan dan dikategorisasikan agar dapat diambil beberapa berita yang mewakili berita lainnya untuk dianalisis.

Berita tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman, melalui empat tahapan, yaitu : pertama, *define problems* (pendefinisian masalah) yaitu bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? sebagai apa? atau sebagai masalah apa?. Kedua, *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah) yaitu peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?. Ketiga, *make moral judgement* (membuat keputusan moral) yaitu nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?. Dan yang keempat adalah *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) yaitu penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?.

Prosedur atau langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan empat elemen perangkat *framing* Robert N. Entman tersebut sehingga bisa dilihat bingkai berita mengenai polemik pemakaian jilbab bagi siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang yang dilakukan oleh Detik.com dan *Republika Online*.

Berikutnya untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap *framing* yang dilakukan oleh kedua media, digunakan teori Hirarki Pengaruh Isi Media yang dipopulerkan oleh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese, dimana terdapat lima level yang mempengaruhi isi media, yaitu level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level ekstra media, dan level ideologi.

### **3.6 Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan teks berita seputar polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang, menggunakan fitur kolom *search* pada Detik.com dan *Republika.co.id* dengan memasukkan kata kunci “Kasus Jilbab

SMKN 2 Padang”, yang dikenal dengan penerapan *annotative journalism* dalam *online journalism*, dengan mem-*filter* terlebih dahulu waktu pemberitaan sesuai dengan rentang waktu berita yang diteliti, yaitu dari tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 2 Februari 2021. Pada kurun waktu tersebut, ditemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) berita pada Detik.com dan 42 (empat puluh dua) berita pada Republika *Online*.

Langkah selanjutnya adalah menyeleksi berita yang akan di analisis dengan menggunakan perangkat *framing* Robert N. Entman, karena tidak seluruh berita yang berjumlah 63 berita tersebut akan dianalisis. Berita yang akan dianalisis adalah gabungan berita yang mewakili keseluruhan berita dan telah memenuhi semua unsur kelengkapan berita serta menampilkan narasumber dari kedua sisi baik yang pro maupun kontra guna memenuhi unsur keberimbangan, menyesuaikan dengan karakteristik berita pada media *online* sebagaimana yang telah dijelaskan pada kerangka konseptual dan data penelitian. Pada tahap ini pada Detik.com dan Republika *Online* masing-masing didapatkan 4 (empat) berita sesuai dengan kriteria dimaksud.

Tahapan berikutnya yaitu menganalisis berita yang berjumlah 8 (delapan) berita tersebut dengan menggunakan 4 (empat) elemen *framing* Robert N. Entman dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah, pada tahap ini berkaitan dengan bagaimana Detik.com dan Republika *Online* mengidentifikasikan atau melihat sebagai apa atau sebagai masalah apa polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Elemen ini adalah bingkai yang paling utama, karena berhubungan dengan bagaimana peristiwa polemik jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang dipahami secara berbeda, dengan nilai positif atau negatif oleh kedua harian tersebut. Dari bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda pula.
2. Mengidentifikasi penyebab masalah, hal ini berkaitan dengan bagaimana kedua harian tersebut membingkai siapa dan apa yang dianggap sebagai tokoh utama yang diangkat dalam pemberitaan polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang.

3. Evaluasi moral, bagaimana kedua surat kabar harian tersebut memberitakan penilaian yang menguatkan argumentasi pada setiap tindakan, kegiatan, sikap, komentar yang terjadi mengenai polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang.
4. Saran penanggulangan masalah, pada tahap ini berkaitan dengan langkah-langkah dan strategi yang disarankan untuk memberikan penyelesaian-penyelesaian atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan dari Detik.com dan Republika *Online* untuk mengetahui beberapa informasi yang masih memerlukan penjelasan serta mengkonfirmasi beberapa data berkaitan dengan hasil temuan analisis *framing* dan dalam rangka menguji keabsahan data serta mengaitkan *framing* dengan level yang mempengaruhi isi media. Hasil wawancara kemudian dianalisis, dengan tetap mepedomani hasil temuan pada teks berita (hasil *framing*) dan mengaitkan dengan teori yang digunakan, literatur serta artikel dan temuan penelitian terdahulu dengan topik yang sama.

### **3.7 Keterbatasan Penelitian**

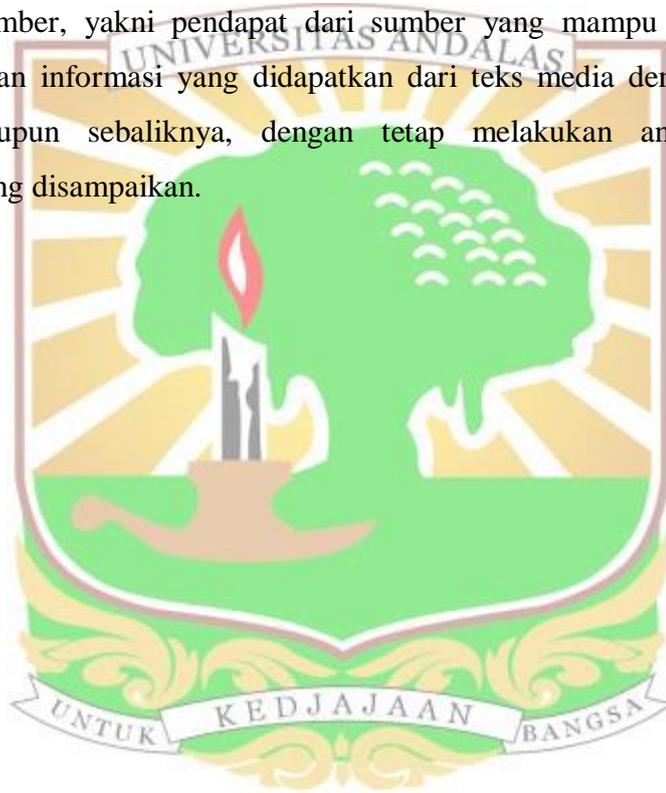
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, karena terdapat keterbatasan dan kendala. Dalam hal ini peneliti memaparkan keterbatasan dan kendala yang ditemui. Keterbatasan dari penelitian ini tidak dilengkapi dengan riset yang mendalam terhadap media yang menjadi objek penelitian, seperti melakukan penggalian informasi secara langsung terhadap pemilik media ataupun pimpinan redaksi mengenai level yang mempengaruhi *framing* yang dilakukan oleh media yang bersangkutan. Proses wawancara yang dilakukan bersifat informal hanya dengan wartawan yang bertugas untuk wilayah Sumatera Barat yang meliput dan menulis langsung terhadap kasus atau isu yang diteliti.

Selain itu penelitian *framing* merupakan semacam kritik dan membongkar ideologi atau apa dan bagaimana dibalik kemasan berita yang disajikan oleh media. Tentunya dalam membongkar tersebut, tidaklah mudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada awak media yang bersangkutan. Perlu kepiawaian peneliti dan untuk menguji hal tersebut peneliti membandingkannya dengan hasil penelitian dan literatur terkait.

### 3.8 Keabsahan Data

Sebagai bentuk penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan proses menguji keabsahan data yang diterima sebagai data penelitian, baik itu data yang didapatkan sebagai data primer atau data sekunder. Proses menguji keabsahan data yakni dengan metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari artikel-artikel terkait, dan literatur yang menunjang analisis untuk analisis teks dalam *framing* berita serta berbagai temuan penelitian dengan topik yang sama.

Disamping itu, untuk menguji keabsahan data juga dilakukan dengan triangulasi sumber, yakni pendapat dari sumber yang mampu mengklarifikasi membandingkan informasi yang didapatkan dari teks media dengan pernyataan informan ataupun sebaliknya, dengan tetap melakukan analisis terhadap pernyataan yang disampaikan.



## BAB IV

### DESKRIPSI UMUM PENELITIAN

#### 4.1 Profil Detik.com

##### 4.1.1 Sejarah

Detik.com merupakan sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Detik.com hanya mempunyai edisi daring dan pendapatan dari media ini bergantung dari bidang iklan. Server detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun mulai daring dengan sajian lengkapnya pada 9 Juli 1998. Saat itu pula akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir media daring yang didirikan oleh Budiono Darsono (eks wartawan DeTik), Yayan Sopyan (eks wartawan DeTik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi.



**Gambar 4. 1 Logo Detik.com**

Budiono memilih nama detik.com karena terdengar ringkas, mudah diucapkan dan mudah diingat. Selain itu, dalam konteks makna yang berkaitan dengan waktu, detik adalah satuan yang terpendek. Kata detik jika digabungkan dengan .com (dot com) juga terdengar mudah dan akrab. Detik.com juga dipahami oleh khalayak waktu itu sebagai suatu yang identik dengan internet. Alasan lain nama itu dipilih juga karena detik.com di konsep untuk menyampaikan berita-berita cepat (*breaking news/ news in brief*). Para wartawan dipacu setiap detik untuk mengejar berita secepat mungkin. Tidak ada satuan waktu yang lebih kecil dan dengan demikian lebih cepat daripada detik, maka ditetapkanlah nama yang pas bagi media *online* ini adalah detik.com (Anggoro, 2012: 2).

Pada awalnya liputan utama media detik.com terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Baru setelah situasi politik mulai reda dan ekonomi mulai membaik, detik.com memutuskan untuk melampirkan berita hiburan dan olahraga. Dari situ kemudian tercetus keinginan untuk membentuk detik.com yang *updatenya* tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang dijual oleh media detik.com adalah *breaking news*. Dengan bertumpu pada *vivid description* (gambaran yang jelas) menjadikan detik.com melesat sebagai situs informasi digital paling populer di kalangan *users* internet

#### 4.1.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi media daring detik.com adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/*mobile*.

b. Misi

1. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
2. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarier.
3. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.

#### 4.1.3 Kepemilikan

Pada 3 Agustus 2011, *CT Corp* mengakuisisi Detik.com (PT. Agranet Multicitra Siberkom/Agrakom). Mulai pada tanggal itu secara resmi Detik.com berada dibawah *Trans Corp*. Pemilik *CT Corp*, Chairul Tanjung, membeli *Detik.com* secara total (100 persen) dengan nilai US\$60 juta atau Rp 521-540 miliar. Chairul Tanjung merupakan seorang pengusaha yang memiliki industri televisi yaitu Trans TV, Trans 7 dan media daring salah satunya Detik.com, disamping CNN Indonesia dan CNBC Indonesia.

#### 4.1.4 Ideologi

Detik.com yang merupakan salah satu media *online* yang paling lama berdiri cenderung memiliki ideologi nasionalisme. Menurut Kencana (20014:7), Transmedia Group menganut Sistem Komunikasi Pancasila dimana pemilik media CT dengan visi dan misinya selalu menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada

kualitas progamnya yang sesuai dengan nilai-nilai Persatuan Indonesia pada media yang dimilikinya. Sistem Komunikasi Pancasila yang berbasis ideologi Pancasila disebutkan bahwa penyiaran memiliki tujuan dimana industri penyiaran tumbuh sesuai dengan fungsi ekonomi kepenyiaran di Indonesia. Selain itu perlu diperhatikan juga aspek penyiaran kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Sistem Komunikasi Pancasila dalam perkembangannya saat ini mulai bergeser pada sistem liberal dimana program pemberitaan media yang berkualitas kalah saing dengan program yang menjadi keinginan pasar. Ranah publik mulai menjadi santapan media dan kecaman terhadap pemerintah, pejabat maupun partai politik semakin bebas diberitakan. Sehingga konten yang ditampilkan oleh media hanya konten yang secara ekonomi mendatangkan rating tinggi untuk menarik pengiklan sebanyak mungkin. Selain itu, konflik kepentingan juga bisa muncul akibat persaingan yang ketat dengan kompetitornya. Akhirnya, media itu terjebak pada dilema antara harus menghadirkan tayangan yang melayani kepentingan publik tapi kemungkinan besar rugi atau menayangkan tayangan yang populer demi meraih kapital yang besar untuk mampu bertahan hidup.

## **4.2 Profil Republika Online**

### **4.2.1 Sejarah**

Republika *Online* (ROL) adalah bagian tak terpisahkan dari Republika Koran. Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas Muslim bagi masyarakat di Indonesia. *ROL* hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit yakni tanggal 4 Januari 1993. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu. Dengan kelahiran *ROL* pada 1995, Republika menyajikan layanan berita di situs web internet, dengan alamat *www.republika.co.id*.

Sebagai situs berita, muatan *ROL* pada saat itu hanya menduplikasi materi berita-berita koran Republika secara lengkap. Tujuan utama penerbitan Republika

versi internet adalah untuk melayani pembaca yang tidak terjangkau distribusi koran cetak dan untuk pembaca yang berada di luar negeri. Pada fase berikutnya *ROL* secara bertahap mulai berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Desain dan berbagai layanan web dan materi beritanya pun lebih diperkaya.

Sejak pertengahan 2008 *ROL* mengalami perubahan besar, dari sekadar situs berita sederhana menjadi *web* portal multimedia. Perubahan tersebut terjadi sebagai jawaban atas munculnya tantangan industri media yang mulai memasuki era konvergensi media. Dalam hal ini, Republika sebagai institusi industri media dituntut untuk memiliki dan mendistribusikan *content* medianya dalam format cetak, *online*, dan *mobile*. Sesuai dengan falsafah dasar Republika, muatan *ROL* tetap mengedepankan komunitas Muslim sebagai basis pengunjunnya.

#### 4.2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Republika *Online* mempunyai visi sebagai media *online* yang terintegrasi dan unggul.

b. Misi

1. Membangun umat Islam yang moderat, cerdas, dan berdaya
2. Menyuarakan aspirasi, gagasan, dan suara masyarakat bagi terbangunnya demokrasi yang sehat dan berkesejahteraan
3. Menciptakan manajemen yang sehat dan efektif.



**Gambar 4. 2 Logo Republika Online (ROL)**

### 4.2.3 Kepemilikan

Mayoritas saham media ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media. Direktur utama Republika adalah Erick Thohir yang saat ini juga merupakan Menteri BUMN dan mantan ketua umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) periode 2010 - 2013.

### 4.2.4 Ideologi

Membahas mengenai ideologi Republika *Online*, tidak bisa dilepaskan dari sejarah Harian Umum Republika. Republika hadir dari kegelisahan umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia. Dalam politik dan ekonomi umat Islam di Indonesia secara sistematis telah terpinggirkan. Dalam menjalankan aktivitas keislamannya, para aktivis Islam seringkali dicurigai merupakan embrio dari pendirian Negara Islam Indonesia. Dengan adanya peminggiran tersebut mengakibatkan adanya tirani minoritas dalam penguasaan informasi. Media-media yang di Indonesia pada saat itu dikuasai oleh minoritas sehingga opini yang terbentuk di masyarakat juga ditentukan oleh mereka. Pada awal berdirinya, Republika berada dibawah PT. Abdi Bangsa yang dijalankan oleh beberapa anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kemudian setelah reformasi tepatnya pada tahun 2000, kepemilikan Republika berpindah tangan ke Mahaka Group. Republika yang sejak awal terbit memposisikan diri sebagai koran politik, setelah berpindah tangan ke Mahaka Group Republika mengubah haluannya menjadi koran bisnis dengan tanpa meninggalkan pangsa pasarnya yakni umat Islam Indonesia.

Beralihnya saham mayoritas Republika dari PT. Abdi Bangsa ke Mahaka Group membuat adanya beberapa perubahan di tubuh Republika. Salah satunya adalah dalam segi konten. Sejak berada di bawah Mahaka Group konten Republika diperbaiki secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan target market dan perubahan orientasi ke bisnis.

Meskipun Republika telah mengganti orientasi medianya menjadi media bisnis, namun Republika tetap tidak meninggalkan unsur keislamannya. Hal ini terlihat di laman Republika *Online*, dimana di dalam laman tersebut terdapat konten yang dinamakan khazanah. Di dalam konten khazanah terdapat beberapa

subkonten antara lain Indonesia, Dunia, Mozaik, Filantropi, Hikmah, Islam Digest, Mualaf, Fatwa, dan Rumah Zakat.

Sejak awal berdirinya, *Republika Online* maupun *Harian Umum Republika* memang ditujukan untuk umat Islam. Hal ini karena pada saat itu beberapa tokoh Islam yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengalami kegelisahan melihat sektor politik dan ekonomi yang dikuasai oleh minoritas, khususnya dalam penguasaan media. Mereka ingin agar umat Islam memiliki media yang memiliki corak keislaman. Walaupun dalam perkembangannya *Republika Online* berada di bawah Mahaka Group yang tidak berafiliasi pada Islam, namun ideologi dasar *Republika Online* masih melekat sampai saat ini yakni ideologi Islam.

#### **4.3 Deskripsi Pemberitaan Kasus Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang**

Kasus polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang ini bermula tanggal 21 Januari 2021, yang diawali dengan postingan Ayah siswi bernama Jeni Cahyani Hia, yang mengunggah video siaran langsung di akun *facebook* bernama Elianu Hia. Dalam video yang akhirnya menjadi sempat viral tersebut, terjadi perdebatan dan adu argumen antara Elianu dengan pihak sekolah, dimana Elianu mempertanyakan dasar aturan menggunakan kerudung dan merasa keberatan jika anaknya memakai pakaian tersebut karena nonmuslim.

Polemik ini berakhir pada tanggal 3 Mei 2021 seiring dengan dibatalkannya kekuatan hukum SKB Tiga Menteri oleh Mahkamah Agung dengan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil nomor perkara 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai pemohon.

Satu hal yang menjadi momen dan peristiwa penting dalam polemik ini yang membedakannya dengan kasus yang berbau agama lainnya adalah terbitnya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI, yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri, Nomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021 dan 219 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai

respons dari Pemerintah Pusat terhadap permasalahan yang terjadi di Sumatera Barat ini. SKB ini mengatur Pemerintah Daerah dan Sekolah agar memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut, tanpa kekhasan agama tertentu serta tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Sebuah kasus yang terjadi di sebuah sekolah tingkat SMK di Sumatera Barat yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Propinsi, ditanggapi dengan sebuah kebijakan berupa SKB Tiga Menteri oleh Pemerintah Pusat.

Pemberitaan tentang peristiwa polemik jilbab di SMK Negeri Padang ini, dapat dibagi menjadi beberapa periode. *Pertama*, mulai dari 21 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari 2021, yakni mulai dari peristiwa ini dibagikan ke media sosial hingga sebelum keluarnya SKB Tiga Menteri. *Kedua*, semenjak diterbitkannya SKB Tiga Menteri hingga dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil nomor perkara 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai pemohon. *Ketiga*, pasca dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil nomor perkara 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Penelitian ini menganalisis pemberitaan pada media Detik.com dan Republika *Online* pada fase pertama yaitu mulai dari momentum ketika Ayah siswi bernama Jeni Cahyani Hia, mengunggah video siaran langsung, hingga sebelum diterbitkannya SKB Tiga Menteri, tepatnya mulai dari tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari 2021. Adapun pemberitaan yang terdapat pada kedua media yang diteliti pada rentang waktu dimaksud, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1 Berita Detik.com**

No.	Tanggal	Judul Berita
1.	22 Januari 2021	"Ortu Ungkap Ada 5 Siswi Nonmuslim Lain Diminta Berjilbab di Padang"
2.	22 Januari 2021	"Siswi Non Muslim di Padang diwajibkan berjilbab, Andre Rosiade : Tidak Boleh!"

No.	Tanggal	Judul Berita
3.	22 Januari 2021	"BPIP : Aturan SMKN 2 Padang Soal Jilbab Tak Sesuai Pancasila"
4.	23 Januari 2021	"Viral Siswi Nonmuslim di Padang diminta berjilbab, Ini Respon Putri Gusdur"
5.	23 Januari 2021	"Viral Siswi Nonmuslim di Padang diminta berjilbab, Ini Respon Kemendikbud"
6.	23 Januari 2021	"Sebut Kasus Siswi Non Muslim diminta berjilbab Langgar HAM, Ini Rekomendasi KPAI"
7.	23 Januari 2021	"Elite Gerindra : Kasus Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab Coreng Dunia Pendidikan."
8.	23 Januari 2021	"SMK 2 Padang Jamin Tak Ada Diskriminasi Meski Jeni Hia Tak Pakai Kerudung."
9.	23 Januari 2021	"Siswi Non Muslim diminta berjilbab, Elite PPP : Harusnya hargai keberagaman."
10.	23 Januari 2021	"Siswi Non Muslim diminta berjilbab, Komisi X Ingatkan Toleransi."
11.	23 Januari 2021	"Maaf Kepsek Usai Geger Siswi Non Muslim Diminta di Padang Berjilbab."
12.	24 Januari 2021	"Aturan Intoleran di Sekolah: Ketua OSIS Islam-Siswa Non Muslim Berjilbab"
13.	24 Januari 2021	"Nadiem Minta Pemda Tindak Tegas Sekolah Yang Minta Siswi Non Muslim Berhijab."
14.	24 Januari 2021	"Cegah Kasus Lain siswi Non Muslim diminta Berjilbab, Nadiem Siapkan Hotline."
15.	24 Januari 2021	"Nadiem Jabarkan Soal Aturan Seragam Sekolah Harus Hargai Agama Siswa."
16.	25 Januari 2021	"4 Pernyataan Tegas Nadiem Soal Siswi Non Muslim diminta Jilbaban."
17.	25 Januari 2021	"Alumnus Perguruan Tinggi Jabar Soroti Siswi Non Muslim diminta berjilbab."
18.	25 Januari 2021	"Mencuat Urusan Jilbab Siswi Nonmuslim Bikin Kepsek Siap Dipecat."
19.	26 Januari 2021	"Eks Walikota Padang Soal Aturan Jilbab Untuk Siswi : Tak Ada Tempat Nyamuk Gigit."
20.	26 Januari 2021	"Eks Walikota Padang Klaim Aturan Siswi Berjilbab Cegah Iri Rambut Warna-Warni."

No.	Tanggal	Judul Berita
21.	26 Januari 2021	Argumen Kasus DBD "Hilang" di Balik Aturan Siswi Berjilbab di Padang."

Pada rentang waktu 21 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari 2021, *Detik.com* menampilkan berita tentang polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang sebanyak 21 berita.

**Tabel 4. 2 Berita Republika Online**

No.	Tanggal	Judul Berita
1.	23 Januari 2021	"Soal Jilbab, Kadisdik Sumbar akan Mediasi Ortu dan Sekolah"
2.	23 Januari 2021	"Soal Jilbab, Kepsek SMK N 2 Padang: Kami tak Pernah Paksa"
3.	23 Januari 2021	Kepala SMKN 2 Padang Minta Maaf Soal Pemaksaan Jilbab
4.	23 Januari 2021	"Soal Jilbab, Kepsek SMK N 2 Padang: Kami tak Pernah Paksa"
5.	23 Januari 2021	"Mantan Wako Padang: Aturan Siswi Harus Berjilbab Sejak 2005"
6.	24 Januari 2021	Kuasa Hukum: Tidak Ada Intimidasi ke Siswi tak Berjilbab
7.	24 Januari 2021	"Ini Alasan Mantan Wako Padang Buat Aturan Siswi Berjilbab"
8.	24 Januari 2021	"Alumnus Non-Muslim Merasa tak Pernah Dipaksa Berjilbab"
9.	24 Januari 2021	"Jilbab SMKN 2 Padang, PKB Sumatera Barat: Jangan Terulang"
10.	24 Januari 2021	"Persoalan Jilbab di SMKN 2 Padang Masalah Miskomunikasi"
11.	24 Januari 2021	"Alumnus Non-Muslim Merasa Guru SMKN 2 Padang Toleran"
12.	24 Januari 2021	"Kuasa Hukum Surati Presiden Aturan Berjilbab di Sekolah"
13.	24 Januari 2021	"Kemendikbud Sesalkan Siswi Nonmuslim Diminta Kenakan Hijab"

No.	Tanggal	Judul Berita
14.	25 Januari 2021	Kepala SMKN 2 Padang yang Siap Dipecat Usai Respons Nadiem
15.	25 Januari 2021	“Jilbab SMKN 2 Padang, Nadiem: Pemerintah tidak Maklumi”
16.	25 Januari 2021	“Jilbab SMKN 2 Padang, Muhammadiyah: Segera Musyawarah”
17.	25 Januari 2021	“Siswi Non-Muslim SMK 2: Saya Lebih Nyaman tak Pakai Jilbab”
18.	25 Januari 2021	“Salah Satu Siswi Non-Muslim di Padang: Jilbab Hanya Atribut”
19.	25 Januari 2021	“Siswi Non-Muslim Ini Pakai Jilbab karena Ingin Menyesuaikan”
20.	25 Januari 2021	“MUI Respons Polemik Aturan Jilbab”
21.	25 Januari 2021	“Aturan Siswi Berjilbab, MUI Sumbar: Seperti Dibesarkan”
22.	25 Januari 2021	“SMK Negeri 2 Padang Siap Revisi Aturan Jilbab”
23.	25 Januari 2021	“Kepsek Revisi Tatib, Seragam Jilbab Hanya untuk Siswi Muslim”
24.	25 Januari 2021	“Salah Satu Siswi Non-Muslim SMK 2 Padang: Jilbab tak Dipaksa”
25.	25 Januari 2021	“Sekjen MUI: Sudah Polemik Jilbab SMKN 2 Padang”
26.	26 Januari 2021	“Opini Siswi Non-Muslim SMKN 2 Kenakan Jilbab di Sekolah”
27.	26 Januari 2021	“Kepala Sekolah SMKN 2 Padang: Saya Siap Dipecat, tapi...”
28.	26 Januari 2021	“MUI: Sudah Polemik Jilbab di Sekolah”
29.	26 Januari 2021	“KPAI Harap Pembetulan Aturan Diskriminatif di Sekolah”
30.	26 Januari 2021	“KPAI Minta Pemerintah Cegah Diskriminasi di Sekolah”
31.	26 Januari 2021	“Polemik Jilbab SMK 2 Jangan Sampai Ganggu Kerukunan”

No.	Tanggal	Judul Berita
32.	26 Januari 2021	“Ansor Minta Wajib Jilbab Bagi Non-Muslim Jangan Terulang”
33.	26 Januari 2021	“Nadiem Hanya Respons Intoleran Baru, Bagaimana Daerah Lain?”
34.	26 Januari 2021	“Gusrizal Ingatkan Pihak di Jakarta Soal Aturan Jilbab”
35.	26 Januari 2021	“Disdik Sumbar Belum Bisa Jatuhkan Sanksi untuk SMK N 2 Padang”
36.	27 Januari 2021	“Gubernur Tegaskan Sumbar Bukan Provinsi Intoleran”
37.	27 Januari 2021	“PGI Sumatra Barat Anggap Kasus Jilbab SMKN 2 Selesai”
38.	27 Januari 2021	“Pengamat Minta Mendikbud Atasi Intoleransi Secara Menyeluruh”
39.	27 Januari 2021	“Gubernur: Sumbar Bukan Provinsi Intoleran”
40.	27 Januari 2021	“Gubernur: Jilbab SMK 2 Soal Teknis, Terlalu Jauh Bicara HAM”
41.	28 Januari 2021	“Gubernur: Sumbar Provinsi Toleran”
42.	28 Januari 2021	“PGI: Kasus Jilbab Siswa SMKN 2 Padang Sudah Selesai”

Sedangkan *Republika Online*, menampilkan berita tentang polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang sebanyak 42 berita pada kurun waktu yang diteliti.

**BAB V**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**5.1. Hasil Penelitian**

**5.1.1 Analisis Framing Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan Republika Online**

**1) Detik.com**

**a. Berita 1 : "Maaf Kepsek Usai Geger Siswi Non Muslim Diminta di Padang Berjilbab."**

Berita yang berjudul "*Maaf Kepsek Usai Geger Siswi Non Muslim Diminta di Padang Berjilbab*", terbit pada tanggal 23 Januari 2021. Adapun analisis *framing*-nya berdasarkan 4 (empat) elemen perangkat *framing* Robert N. Entman adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 1 Analisis Berita 1 Detik.com**

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Tidak pancasilais, intoleran, kebijakan soal siswi non muslim berjilbab tak sesuai aturan Pemerintah, ada indikasi pemaksaan serta pelanggaran HAM.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Zakri Zaini (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan), Kepala SMKN 2 Padang sebagai pihak yang mengeluarkan aturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pancasila, toleransi, kebhinekaan, hak asasi manusia (HAM), keberagaman dan menghargai perbedaan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Aturan kepala sekolah harus segera dicabut, harus ada peringatan dan sanksi tegas terhadap sekolah dan guru yang melakukan pemaksaan atribut keagamaan terhadap siswi non muslim, proses seleksi rekrutmen guru lebih ketat, akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang bersifat diskriminatif, dan mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang tidak mematuhi peraturan.

**Define problems (pendefinisian masalah).** Detik.com pertama-tama mendefinisikan kasus jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini sebagai sebuah peristiwa yang tidak Pancasila. Ini bisa dilihat sebagaimana kutipan teks berikut :

“Sontak kasus ini menyedot perhatian sejumlah kalangan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai aturan Kepala SMKN 2 Padang tidak Pancasila. "Yang jelas, aturan kepala sekolah di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan harus segera dicabut," kata Wakil Ketua BPIP, Hariyono, kepada detikcom, Jumat (22/1/2021).”

*Kedua*, menilai kejadian itu sebagai sikap intoleran. Sebagaimana terdapat pada kutipan teks berita berikut :

“Hal senada disampaikan komisi X DPR RI yang prihatin dan menilai kejadian itu sebagai sikap intoleran. Politikus PKB itu mengatakan kejadian tersebut menunjukkan adanya sikap intoleransi di sekolah-sekolah negeri.”

*Ketiga*, kebijakan soal siswi non muslim berjilbab tak sesuai aturan Pemerintah. Aturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dimana aturan ini tidak mewajibkan simbol kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Berikut adalah kutipan teks beritanya:

“Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto sangat menyesalkan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebab, Permendikbud tersebut tidak mewajibkan simbol kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Selain itu, Wikan mengatakan sekolah tidak boleh membuat peraturan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian wajib di sekolah. Ia meminta Dinas Pendidikan daerah memastikan setiap sekolah mematuhi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014.”

*Keempat*, ada indikasi pemaksaan, dalam aspek kebebasan beragama. Detik.com tidak secara tegas mengatakan bahwa kasus yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini adalah pemaksaan. Namun menyatakan kasus ini baru dalam tahap “ada indikasi”, sebagaimana terdapat dalam kutipan teks berikut :

“Komnas HAM menilai ada indikasi pemaksaan dalam aspek kebebasan beragama dalam kejadian itu. "Ada indikasi pemaksaan dalam ekspresi

kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan, Sabtu (23/1/2021).”

*Kelima*, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini, didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“KPAI menilai kasus siswi nonmuslim diminta memakai jilbab merupakan pelanggaran HAM. Retno menyayangkan peraturan sekolah SMKN 2 Padang yang mewajibkan seluruh siswinya mengenakan hijab. Menurutnya langkah pemaksaan itu jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) bagi siswi yang nonmuslim.”

**Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah).** Dalam berita yang disajikan oleh Detik.com ini, Zakri Zaini (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan) merupakan pihak yang diposisikan sebagai aktor (penyebab masalah). Zakri Zaini diposisikan sebagai aktor (penyebab masalah) karena sebagai perwakilan pihak sekolah yang menerima Elianu (wali murid), sebagaimana perdebatan yang terjadi di dalam video siaran langsung di Media Sosial yang sempat viral tersebut, menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah. Ini terlihat dalam kutipan teks berita berikut :

“Zakri Zaini, yang menerima kehadiran Elianu, menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah.”

Pernyataan ini diperkuat lagi oleh kepala sekolah sebagaimana terdapat dalam kutipan teks berikut :

“Atas polemik itu, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi meminta maaf atas keteledoran dan kesalahan jajarannya di Bidang Kesiswaan dan Bimbingan Konseling."Selaku Kepala SMK Negeri 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling, dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi," kata Rusmadi dalam pertemuan dengan wartawan, Jumat (22/1/2021) malam. Ia menyatakan, yang terlibat dalam adu argumen di video viral itu adalah Zakri Zaini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. “

Aturan kepala sekolah juga ditempatkan sebagai penyebab masalah dalam polemik ini oleh Detik.com. Penyebabnya, aturan kepala sekolah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana kutipan teks berikut :

"Yang jelas, aturan kepala sekolah di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan harus segera dicabut," kata Wakil Ketua BPIP, Hariyono, kepada detikcom, Jumat (22/1/2021).

Detik.com tidak secara langsung menyalahkan kepala sekolah dalam pemberitaan ini, namun aturan yang dibuat kepala sekolah-lah yang diposisikan sebagai penyebab permasalahan.

**Make moral Judgement (membuat pilihan moral).** *Frame* tidak pancasilais, intoleran, kebijakan soal siswi non muslim berjilbab tak sesuai aturan Pemerintah, ada indikasi pemaksaan serta pelanggaran HAM, yang disematkan oleh detik.com terhadap pemberitaan kasus polemik jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang, didukung dengan klaim-klaim moral Pancasila, toleransi, kebhinekaan, hak asasi manusia (HAM), keberagaman dan menghargai perbedaan. Klaim nilai moral Pancasila bisa dilihat dalam kutipan teks berikut :

“Nilai-nilai Pancasila harus tertanam sejak dini lewat pendidikan. Pancasila menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan masyarakat yang inklusif (terbuka, tidak eksklusif untuk golongan tertentu).”

Sementara, klaim moral toleransi, terdapat pada kutipan teks berikut :

“Andreas menilai lembaga pendidikan harus memberikan ruang toleransi antar peserta didik. Ia berharap toleransi dapat menjadi prinsip bagi para peserta didik.”

Adapun klaim Kebhinekaan, bisa terlihat pada kutipan berikut :

“Padahal, menurutnya, tenaga kependidikan harus mengutamakan nilai Pancasila dan kebhinekaan.”

Sedangkan klaim Hak Asasi Manusia (HAM), dinyatakan pada kutipan berikut :

“Beka menilai seharusnya lembaga pendidikan negeri menghormati keberagaman dan hak asasi manusia (HAM) seperti amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1.”

Terakhir, klaim tentang keberagaman dan menghargai perbedaan, bisa terlihat pada kutipan teks berikut ini :

“KPAI menilai sekolah negeri seharusnya menyemai keberagaman dan menghargai perbedaan.”

**Treatment recommendation (menekankan penyelesaian).** Dalam berita yang disajikan oleh Detik.com, ada beberapa rekomendasi penyelesaian yang ditekankan. *Pertama*, aturan kepala sekolah harus segera dicabut. Alasannya, karena aturan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini misalnya terdapat pada kutipan berita berikut :

"Yang jelas, aturan kepala sekolah di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan harus segera dicabut," kata Wakil Ketua BPIP, Hariyono, kepada detikcom, Jumat (22/1/2021).

*Kedua*, seleksi tenaga kependidikan (guru) yang ketat. Sebagaimana terlihat pada kutipan teks berita sebagai berikut :

"Huda mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan seleksi tenaga kependidikan yang ketat."

Lalu diperkuat lagi dengan kutipan teks berikut ini :

"Wakil Ketua Ketua Komisi X RI itu juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat proses seleksi rekrutmen guru lebih ketat."

*Ketiga*, harus ada sanksi tegas terhadap sekolah dan guru. Dalam hal kasus ini detik.com merekomendasikan agar harus ada peringatan dan sanksi tegas terhadap sekolah dan guru yang melakukan pemaksaan atribut keagamaan terhadap siswi non muslim sebagaimana yang terdapat pada kasus ini. Ini bisa dilihat dalam kutipan teks berikut :

"Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira harus ada peringatan dan sanksi tegas terhadap sekolah dan guru yang melakukan pemaksaan atribut keagamaan terhadap siswi tersebut."

Rekomendasi ini diperkuat lagi dengan dengan kutipan teks sebagai berikut :

"Retno mendesak agar SMKN 2 Padang diberikan sanksi sesuai Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan."

*Keempat*, konsisten melakukan sosialisasi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014. Agar kejadian serupa tidak terulang, maka pemerintah daerah diminta untuk konsisten melakukan sosialisasi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014. Kutipan teks berikut dapat dilihat sebagai buktinya :

"Wikan juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang."

#### **b. Berita 2 : "Aturan Intoleran di Sekolah: Ketua OSIS Islam-Siswa Non Muslim Berjilbab"**

Berita yang berjudul "*Aturan Intoleran di Sekolah: Ketua OSIS Islam-Siswa Non Muslim Berjilbab*", terbit pada tanggal 24 Januari 2021. Adapun analisis *framing*-nya berdasarkan 4 (empat) elemen perangkat *framing* Robert N. Entman adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 2 Analisis Berita 2 Detik.com**

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pemaksaan, intoleran.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Aturan kepala sekolah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Cabut aturan.

**Define problems (pendefinisian masalah).** Dalam Berita yang berjudul "*Aturan Intoleran di Sekolah: Ketua OSIS Islam-Siswa Non Muslim Berjilbab*" ini, kasus yang terjadi di SMK Negeri Padang ini didefinisikan sebagai kasus intoleran dan pemaksaan (dipaksa berjilbab). Hal ini secara tegas dinyatakan pada judul dan dimuat pada kalimat awal berita, sebagaimana kutipan teks berikut :

“Kasus siswi non muslim dipaksa berjilbab menambah jumlah kasus-kasus intoleran di sekolah yang sebelumnya pernah terjadi.”

**Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah).** Pada berita ini, Zakri Zaini (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan) merupakan pihak yang diposisikan sebagai aktor (penyebab masalah). Zakri Zaini diposisikan sebagai aktor (penyebab masalah) karena sebagai perwakilan pihak sekolah yang menerima Elianu (wali murid) sebagaimana perdebatan yang terjadi di dalam video siaran langsung di Media Sosial yang sempat viral tersebut, menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah. Hal ini terlihat dalam kutipan teks berita berikut :

“Zakri Zaini, yang menerima kehadiran Elianu, menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah.”

Pernyataan ini diperkuat lagi oleh kepala sekolah sebagaimana terdapat dalam kutipan teks berikut :

“Atas polemik itu, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi meminta maaf atas keteledoran dan kesalahan jajarannya di Bidang Kesiswaan dan Bimbingan Konseling."Selaku Kepala SMK Negeri 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling, dalam penerapan aturan dan

tata cara berpakaian bagi siswi," kata Rusmadi dalam pertemuan dengan wartawan, Jumat (22/1/2021) malam. Ia menyatakan, yang terlibat dalam adu argumen di video viral itu adalah Zakri Zaini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. “

Aturan kepala sekolah juga ditempatkan sebagai penyebab masalah dalam polemik ini. Hal ini disebabkan karena aturan kepala sekolah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana kutipan teks berikut :

"Yang jelas, aturan kepala sekolah di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan harus segera dicabut," kata Wakil Ketua BPIP, Hariyono, kepada detikcom, Jumat (22/1/2021).

***Make moral Judgement (membuat pilihan moral).*** *Frame* intoleran dan pemaksaan, didukung dengan klaim moral Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Ini terlihat dalam kutipan berita sebagai berikut :

“Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani angkat suara. Dia mengingatkan asas sekolah negeri adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. "Saya juga beri himbauan untuk semua Guru, khususnya di sekolah negeri. Jangan sampai salah kaprah, sekolah Negeri itu basisnya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, bukan sekolah berbasis agama tertentu," kata Zita menanggapi kejadian itu, disampaikannya kepada wartawan, Kamis (29/10/2020).”

***Treatment recommendation (menekankan penyelesaian).*** Secara tidak langsung, dalam pemberitaan ini, Detik.com merekomendasikan agar mencabut aturan yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 2 Padang. Hal ini terlihat dalam kutipan teks berita berikut :

“Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai aturan Kepala SMKN 2 Padang tidak Pancasilais. "Yang jelas, aturan kepala sekolah di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan harus segera dicabut," kata Wakil Ketua BPIP, Hariyono, kepada detikcom, Jumat (22/1/2021).”

### **c. Berita 3 : "4 Pernyataan Tegas Nadiem Soal Siswi Non Muslim diminta Jilbaban"**

Berita yang berjudul "*4 Pernyataan Tegas Nadiem Soal Siswi Non Muslim diminta Jilbaban*", terbit pada tanggal 25 Januari 2021. Adapun analisis *framing*-nya berdasarkan 4 (empat) elemen perangkat *framing* Robert N. Entman adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 3 Analisis Berita 3 Detik.com**

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Intoleran
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Guru dan Kepala Sekolah
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Aturan seragam sekolah harus menghormati siswa dalam menjalankan keyakinannya.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Sanksi tegas ke para pihak yang terlibat, menyiapkan <i>hotline</i> aduan guna mencegah kasus serupa terulang.

**Define problems (pendefinisian masalah).** Dalam berita ini, detik.com mengidentifikasi kasus yang terjadi di SMK N 2 Padang ini sebagai peristiwa intoleran. Sebagaimana terdapat dalam kutipan teks berita berikut :

“Kasus siswi SMK Negeri 2 Padang nonmuslim yang diminta berjilbab sampai ke telinga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nadiem mengecam peristiwa yang disebutnya intoleran ini.”

Kemudian dilanjutkan dengan kutipan teks berita berikut :

“Nadiem menyebut kasus siswi non muslim di Padang diminta berjilbab merupakan bentuk intoleransi. Mantan CEO Gojek itu menilai aturan siswi non muslim memakai jilbab itu melanggar undang-undang (UU). "Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman, sehingga bukan saja melanggar peraturan UU, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan," tegas Nadiem dalam video di Instagram, Minggu (24/1).”

**Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah).** Dalam berita yang berjudul "*4 Pernyataan Tegas Nadiem Soal Siswi Non Muslim diminta Jilbaban*" ini, Detik.com memposisikan guru dan kepala sekolah sebagai aktor (penyebab masalah). Ini terlihat dalam kutipan teks berita berikut :

“Nadiem menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah di Padang yang membuat aturan siswi non muslim harus berhijab.”

**Make moral Judgement (membuat pilihan moral).** Adapun alasan moral yang digunakan untuk mendukung *frame* intoleran yang dikemukakan dalam berita ini yakni aturan seragam sekolah harus menghormati siswa dalam menjalankan keyakinannya.

“Nadiem menekankan aturan seragam sekolah harus tetap menghormati siswa dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Peserta didik.”

Terkait hal tersebut, sekolah tidak diperbolehkan membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik.

**Treatment recommendation (menekankan penyelesaian).** Dalam berita ini, detik.com menekankan penyelesaian agar pemerintah daerah setempat memberikan sanksi tegas kepada para pihak yang terlibat. Sebagaimana kutipan teks berita berikut :

“Nadiem meminta pemerintah daerah (pemda) setempat memberikan sanksi tegas ke para pihak yang terlibat di kasus siswi non muslim diminta berjilbab. "Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya," ucap Nadiem.

Selain itu, juga ditekankan penyelesaian dengan menyiapkan *hotline* aduan, guna mencegah kasus serupa terulang sebagaimana yang akan dilakukan oleh Kemendikbud :

“Sebagai bentuk tanggapan terkait adanya kasus siswi non muslim yang diminta berjilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, Kemendikbud akan menyiapkan *hotline* aduan. Gunanya yakni mencegah kasus serupa terulang.”

#### **d. Berita 4 : "Mencuat Urusan Jilbab Siswi Non Muslim Bikin Kepsek Siap Dipecat."**

Berita yang berjudul "*Mencuat Urusan Jilbab Siswi Nonmuslim Bikin Kepsek Siap Dipecat*", terbit pada tanggal 25 Januari 2021. Adapun analisis *framing*-nya berdasarkan 4 (empat) perangkat elemen *framing* Robert N. Entman adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 4 Analisis Berita 4 Detik.com**

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Intoleran
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Aturan SMK Negeri 2 Padang
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Non Muslim diminta berjilbab.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Rusmadi (Kepala Sekolah) siap bertanggung jawab dan dipecat.

**Define problems (pendefinisian masalah).** Dalam berita ini, detik.com mengidentifikasi kasus ini sebagai Intoleran. Hal ini terlihat dalam kutipan teks berikut :

“Video tersebut viral dan menjadi polemik. Mendikbud Nadiem Makarim menilai aturan tersebut intoleran dan meminta agar pihak yang terlibat ditindak tegas.”

**Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah).** Adapun yang diposisikan sebagai sumber masalah dalam berita ini adalah aturan SMK Negeri 2 Padang.

“Aturan SMK Negeri 2 Padang yang meminta siswa non muslim berjilbab menuai polemik berkepanjangan.”

**Make moral Judgment (membuat pilihan moral).** Adapun argumentasi yang dikemukakan untuk mendukung gagasan intoleran adalah karena non muslim diminta berjilbab. Hal ini nampak pada kutipan teks berikut :

“SMK Negeri 2 Padang yang meminta siswi non muslim berjilbab menuai polemik berkepanjangan.

**Treatment recommendation (menekankan penyelesaian).** Dalam berita ini, detik.com menekankan penyelesaian dengan memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk

kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Sesuai dengan kutipan teks berita berikut :

"Saya meminta pemerintah daerah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya," ucap Nadiem.

Selain itu, yang menjadi rekomendasi penyelesaian yang ditekankan dalam berita ini adalah Rusmadi (Kepala Sekolah) siap bertanggung jawab dan dipecat. Sebagaimana terdapat dalam kutipan teks berita berikut ini :

"Rusmadi mengaku siap bertanggung jawab dan dipecat gegara polemik tersebut."

## 2) *Republika Online*

### a. Berita 1 : “Kepala SMKN 2 Padang yang Siap Dipecat Usai Respons Nadiem”

Berita yang berjudul “*Kepala SMKN 2 Padang yang Siap Dipecat Usai Respons Nadiem,*” terbit pada tanggal 25 Januari 2021. Adapun analisis *framing*-nya berdasarkan 4 (empat) perangkat elemen *framing* Robert N. Entman adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 5 Analisis Berita 1 *Republika Online***

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Salah Interpretasi, tidak ada pemaksaan, Isu aturan jilbab di SMKN 2 Padang dibesarkan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Interpretasi yang salah dari pernyataan wakil kepala sekolah.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebelum berbicara sebaiknya pertimbangkan dulu dengan matang. Sebelum mengambil kesimpulan tertentu, pertimbangkan dan cari tahu dulu kebenarannya.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Sanksi (pemecatan) bila ada temuan pelanggaran terkait pro dan kontra memakai jilbab di sekolah. Mempersilahkan pihak Kemendikbud meninjau persoalan langsung ke lapangan untuk mencari tahu fakta yang terjadi.

**Define problems (pendefinisian masalah).** Pada berita ini, ada beberapa *frame* yang dikembangkan oleh *Republika Online* dalam mendefinisikan kasus jilbab di SMKN 2 Padang ini. *Pertama*, salah interpretasi. Bermulanya kasus ini disebabkan karena adanya salah interpretasi dari pernyataan salah seorang wakil kepala sekolah (Wakil Kepala sekolah Bidang Kesiswaan, Zakri Zaini) sehingga menyebabkan kasus ini menjadi viral. Sebagaimana terdapat pada kutipan berita berikut :

“Rusmadi menjelaskan, sejak awal, dirinya sudah mengingatkan seluruh guru dan pegawai agar tidak memaksakan pakaian berjilbab terhadap pelajar non-Muslim. Ia tidak menyangka, ada salah interpretasi dari pernyataan salah seorang wakil kepala sekolah yang menjadi viral.”

*Kedua*, Kasus ini diidentifikasi sebagai tidak ada pemaksaan pemakaian jilbab terhadap siswi non muslim. Hal ini dijelaskan dalam teks berikut :

“Rusmadi menjelaskan, sejak awal, dirinya sudah mengingatkan seluruh guru dan pegawai agar tidak memaksakan pakaian berjilbab terhadap pelajar non-Muslim. Rusmadi mengatakan, pernyataan wakil kepala sekolah adalah mengenai kewajiban mematuhi aturan sekolah. Bukan aturan mewajibkan siswi non-Muslim mengenakan pakaian berjilbab.”

*Ketiga*, tidak ada Intimidasi. *Frame* tidak terdapatnya intimidasi ini dikembangkan dengan mengkonfirmasi pendapat kuasa hukum Ayah Jeni yaitu Mendrofa, sebagaimana kutipan teks berita berikut :

“Walau persoalan aturan berjilbab ini sedang viral, Jeni mengaku, tidak mengalami intimidasi selama di lingkungan sekolah. "Jeni tidak ada trauma sama sekali walau sudah berkali-kali dipanggil guru BK (bimbingan konseling). Intimidasi tidak ada," kata Mendrofa, Ahad (24/1).”

*Keempat*, isu aturan jilbab di SMKN 2 Padang dibesar-besarkan. *Framing* ini dikembangkan sesuai dengan pernyataan dan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar. Hal ini terdapat pada kutipan teks berita berikut ini :

“Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar menilai, isu aturan jilbab di SMKN 2 Padang seperti di-framing dan dibesar-besarkan. "Kenapa (seperti) framing, kan sudah ada tokoh-tokoh di Jakarta yang begitu gampang menuduh ini antikehinekaan, ini intoleran, apakah mereka sudah mendengarkan kronologinya (yang terjadi di SMKN 2 Padang)," kata Buya Gusrizal kepada *Republika*, Ahad (24/1).

**Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah).** *Pertama*, interpretasi yang salah dari pernyataan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Zakri Zaini). Interpretasi yang salah tersebut menyebabkan dan memunculkan permasalahan jilbab bagi siswi nonmuslim di SMK 2 sehingga masalah ini menjadi polemik dan viral di media sosial. Sebagaimana terlihat dalam kutipan teks berita berikut :

“Rusmadi menjelaskan, sejak awal, dirinya sudah mengingatkan seluruh guru dan pegawai agar tidak memaksakan pakaian berjilbab terhadap pelajar non-Muslim. Ia tidak menyangka, ada salah interpretasi dari pernyataan salah seorang wakil kepala sekolah yang menjadi viral. Pernyataan wakil kepala sekolah adalah mengenai kewajiban mematuhi aturan sekolah. Bukan aturan mewajibkan siswi non-Muslim mengenakan pakaian berjilbab.”

Namun dalam hal ini tidak ditegaskan atau dijelaskan lebih lanjut, siapa yang dimaksud salah menginterpretasikan pernyataan tersebut.

**Make moral Judgement (membuat pilihan moral).** Sebelum mengeluarkan pendapat, cari tahu dulu kebenarannya. Klaim moral ini digunakan untuk mengcounter atau meluruskan informasi dan berita yang berseliweran di media, dimana tokoh-tokoh di tingkat pusat men-*claim* dan menjustifikasi bahwa kasus ini merupakan bentuk anti kebhinekaan dan intoleran.

“Terkait komentar sejumlah pihak di Jakarta mengenai polemik aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang, Buya Gusrizal mengingatkan, pejabat-pejabat di Jakarta jikalau memang hidup berbangsa dan bernegara, tolong sebelum berbicara sebaiknya pertimbangkan dulu dengan matang. Sebelum mengambil kesimpulan tertentu, pertimbangkan dan cari tahu dulu kebenarannya. Buya Gusrizal kecewa terhadap orang yang berkomentar ada pemaksaan pakai jilbab terhadap siswi non-Muslim di Padang. Ia mempertanyakan dimana unsur pemaksaan itu dan dari mana muncul istilah pemaksaan itu.”

**Treatment recommendation (menekankan penyelesaian).** Adapun rekomendasi atau penekanan penyelesaian yang ditawarkan oleh *Republika Online* dalam berita ini adalah memberikan sanksi (memecat Kepala Sekolah) dengan catatan bila ada temuan pelanggaran. Tetapi untuk rekomendasi ini pihak Kemendikbud disarankan untuk meninjau persoalan langsung ke lapangan untuk mencari tahu fakta yang terjadi.

“Rusmadi mempersilakan, pihak Kemendikbud meninjau persoalan langsung ke lapangan untuk mencari tahu fakta yang terjadi. "Kalau saya

salah, saya siap dipecat. Tapi, pemerintah silakan lihat ke lapangan dulu. Apa yang sudah kami lakukan.”

**b. Berita 2 : “MUI Respons Polemik Aturan Jilbab”**

Berita yang berjudul “*MUI Respons Polemik Aturan Jilbab*”, terbit pada tanggal 25 Januari 2021. Adapun analisis *framing*-nya berdasarkan 4 (empat) elemen perangkat *framing* Robert N. Entman adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 6 Analisis Berita 2 Republika Online**

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Salah satu bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, tidak ada paksaan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Penyebaran ke akun media sosial.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Filosofi adat orang Minang ‘ <i>adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah.</i>
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Pengecualian terkait aturan jilbab sebaiknya diterapkan kepada para siswi yang tidak beragama Islam.

**Define problems (pendefinisian masalah).** Pada berita ini, kasus yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini, *pertama-tama* didefinisikan sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal. Peristiwa yang terjadi di salah satu SMK di Sumatera Barat ini dianggap bukanlah sebagai suatu hal yang perlu dipermasalahkan karena merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal di Sumatera Barat karena Sumatera Barat memiliki akar keislaman yang kuat sesuai dengan filosofi adat ‘*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah.*’ Sebagaimana terlihat dalam kutipan teks berita berikut :

“Karena, filosofi orang Minang itu ‘*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah.*’ Jadi, bagi orang Minang, agama itu harus hidup, tumbuh, dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam kehidupan keseharian.”

*Kedua*, polemik ini didefinisikan sebagai tidak adanya unsur paksaan. Ini terdapat pada kutipan teks berita berikut :

“Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmadi mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksa siswi yang non-Muslim untuk mengenakan kerudung atau pakaian Muslimah. Ia menambahkan, selama ini mayoritas siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang memang atas

kemauan mereka sendiri bersedia mengenakan seragam berkerudung. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain.”

**Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah).** Adapun yang diposisikan sebagai penyebab permasalahan dalam berita ini, *yang pertama* adalah penyebaran ke akun media sosial. Penyebaran protes yang dilakukan oleh Elianu ke akun media sosialnya dianggap sebagai penyebab masalah. Adanya penyebaran tersebut mengakibatkan kasus ini menjadi viral. Berikut teks yang menunjukkan hal tersebut :

“Sebelumnya, Elianu Hia, salah satu orang tua murid, memprotes pihak SMK Negeri 2 Padang. Sebab, ia merasa putrinya yang berinisial JCH dipaksa untuk mengenakan pakaian berkerudung di sekolah. Protes tersebut kemudian menjadi polemik setelah disebarakan melalui akun media sosialnya. Protes Elianu ini menjadi viral karena ia sebarakan melalui akun sosial media Facebook miliknya.”

*Kedua*, implementasi aturan di lapangan. Dalam *frame* yang dikembangkan oleh Republika.co.id, dasar aturan pertama kali tentang pemberlakuan jilbab di sekolah yaitu Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005, bukanlah menjadi hal yang dipersalahkan. Melainkan prakteknya di lapangan (implementasi)-nya lah yang diposisikan sebagai penyebab masalah karena dalam praktik di lapangannya tidak sedikit (banyak) siswi non-Muslim juga menggunakan jilbab. Hal terlihat dari kutipan teks berikut ini :

“Aturan tidak salah karena sudah sejak tahun 2005 dijalankan. Sejak 2005, Pemerintah Kota Padang memberlakukan kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005. Salah satu poin instruksi tersebut adalah mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang. Nomenklatur aturan tersebut ditujukan kepada siswi yang beragama Islam saja. Namun, pada praktiknya di lapangan, siswi yang non-Muslim juga tak sedikit menggunakan jilbab.”

Bahkan diperkuat lagi dengan keheranan Fauzi Bahar mengapa baru saat ini dipermasalahan.

“Wali Kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar mengaku heran dengan munculnya polemik terkait instruksi tersebut. “Itu sudah lama sekali (diberlakukan), kok baru sekarang diributkan? Kebijakan 15 tahun yang lalu itu,” ujarnya, Sabtu (23/1).”

**Make moral Judgment (membuat pilihan moral).** Klaim moral yang digunakan untuk membenarkan *frame* yang digunakan Republika Online ini adalah Filosofi adat orang Minang ‘*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*’.

“Karena, filosofi orang Minang itu ‘*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*.’ Jadi, bagi orang Minang, agama itu harus hidup, tumbuh, dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam kehidupan keseharian,” ujar dia saat dihubungi Republika, Ahad (24/1).

**Treatment recommendation (menekankan penyelesaian).** Adapun rekomendasi atau penekanan penyelesaian yang ditawarkan dalam berita ini adalah sebaiknya diterapkan pengecualian penerapan aturan jilbab kepada siswi yang tidak beragama Islam.

“Buya Anwar menambahkan, pengecualian terkait aturan itu sebaiknya diterapkan kepada para siswi yang tidak beragama Islam. Dengan tidak adanya paksaan, kegaduhan yang tak perlu, dapat dihindari semua pihak. “Menurut saya, ketentuan itu tetap saja dilaksanakan, tetapi kepada murid-murid yang tidak beragama Islam, dipersilakan memilih, apakah memakai jilbab atau tidak. Karena, kita harus mengembangkan sikap toleransi, harus bisa menerima kenyataan di mana ada perbedaan-perbedaan di antara kita,” ujarnya.”

**c. Berita 3 : “Opini Siswi Non Muslim SMKN 2 Kenakan Jilbab di Sekolah”**

Berita yang berjudul “*Opini Siswi Non-Muslim SMKN 2 Kenakan Jilbab di Sekolah*”, terbit pada tanggal 26 Januari 2021. Adapun analisis *framing*-nya berdasarkan 4 (empat) elemen perangkat *framing* Robert N. Entman adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 7 Analisis Berita 3 Republika Online**

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Tidak ada unsur paksaan. Miskomunikasi.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Aturan berpakaian di SMK 2 tidak tegas, sehingga ada kesalahan persepsi untuk menerapkan.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pakaian berjilbab itu hanya wajib untuk yang beragama Islam. Untuk mencerminkan identitas perempuan minang yang menutup aurat. Jati diri Sumbar yang kental dengan nuansa Islami.

	<p>Untuk menghindarkan pelajar perempuan dari aksi kejahatan, terutama kejahatan seksual.</p> <p>Mayoritas siswi non-muslim di sekolah negeri di Kota Padang menggunakan jilbab karena tidak ingin ada perbedaan mencolok dari teman-temannya yang lain.</p>
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Merevisi aturan dan tata tertib berpakaian agar tidak ada celah diskriminasi.

**Define problems (pendefinisian masalah).** Dalam berita ini *pertama-tama* peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini didefinisikan tidak ada unsur paksaan. Untuk memperkuat bingkai ini, diwawancarai beberapa siswi non muslim sebagai pihak yang merasakan, terlibat dan bersentuhan langsung dengan aturan yang terdapat di SMKN 2 Padang ini. Ini terlihat dari pernyataan siswi berikut ini :

"Tidak ada unsur paksaan. Dan saya juga sudah dari SMP memakai jilbab," kata Angel, Senin (25/1). "Silakan saja. Karena dari awal sekolah memang tidak memaksakan." kata Angel menambahkan.

Pernyataan Angel ini diperkuat lagi dengan pandangan Yulia Hia, sesuai kutipan teks berikut :

"Terpaksa memakai jilbab sih enggak. Saya hanya ingin menyesuaikan," kata Yulia Hia. Karena merasa sudah terbiasa, diri pribadi dan keluarga Yulia tidak pernah lagi mempermasalahkan."

Narasumber dari kalangan siswi nonmuslim ini menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan aturan jilbab di sekolah. *Kedua*, miskomunikasi. Bingkai yang dikembangkan dalam kasus ini adalah karena adanya miskomunikasi yang terjadi antara pihak guru dengan wali murid. Hal ini dapat terlihat dalam teks berita berikut ini :

"Fauzi mengatakan persoalan aturan memakai jilbab di SMK N 2 Padang yang belakangan menjadi sorotan disebabkan adanya miskomunikasi antara pihak guru dan wali murid."

**Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah).** Adapun yang diposisikan sebagai penyebab atau sumber permasalahan dalam berita ini adalah aturan berpakaian di SMK 2. Aturan berpakaian yang terdapat di SMKN 2 Padang dianggap menjadi penyebab masalah karena aturan ini tidak tegas, sehingga

menyebabkan adanya kesalahan persepsi dalam penerapannya. Hal ini terlihat dalam kutipan teks berikut :

“Rusmadi mengakui selama ini aturan berpakaian di SMK 2 tidak tegas. Sehingga, ada kesalahan persepsi untuk menerapkan. Dengan aturan baru yang akan dibuat ini, menurut Rusmadi, SMKN 2 akan memberi ruang bagi murid non-Muslim menentukan pilihan sendiri untuk pakaian seragam yang akan dikenakan.”

***Make moral Judgement (membuat pilihan moral).*** Setelah permasalahan ini didefinisikan sebagai tidak ada unsur paksaan dan miskomunikasi, maka untuk mendukung *frame* tersebut, digunakan klaim moral sebagai berikut. *Pertama*, pakaian berjilbab itu hanya wajib untuk yang beragama Islam. Klaim ini terdapat pada kutipan berita berikut :

“Aturan yang dikeluarkan Fauzi pada 2005 lalu kewajiban memakai seragam berjilbab hanya untuk siswi Muslim. Bagi yang non-Muslim hanya bersifat imbauan atau menyesuaikan.”

*Kedua*, Untuk mencerminkan identitas perempuan minang yang menutup aurat, jati diri Sumbar yang kental dengan nuansa Islami. Argumentasi ini dijelaskan sebagaimana terdapat dalam kutipan teks berita berikut :

“Tujuan utama, menurut Fauzi adalah untuk mencerminkan identitas perempuan minang yang menutup aurat. Fauzi ingin dunia pendidikan di Padang khususnya dan Sumbar pada umumnya mencerminkan jati diri Sumbar yang kental dengan nuansa Islami.”

*Ketiga*, untuk menghindarkan pelajar perempuan dari aksi kejahatan, terutama kejahatan seksual. Alasan moral ini terdapat pada kutipan teks berita berikut :

“Dengan berpakaian menutup aurat peluang siswi menjadi korban kejahatan seksual menjadi terminimalkan.”

*Keempat*, untuk mempersempit jurang pemisah antara murid anak orang kaya dengan anak orang miskin. Argumentasi ini diajukan sebagaimana kutipan teks berikut :

“Alasan tidak kalah penting lanjut Fauzi dari penerapan memakai jilbab adalah untuk mempersempit jurang pemisah antara murid anak orang kaya dengan anak orang miskin. Dulu sebelum sekolah menerapkan aturan berjilbab, menurut Fauzi, sangat terlihat perbedaan aksesoris anak orang kaya dengan anak orang miskin dari perhiasan yang dikenakan. Seperti gelang, kalung dan anting. "Kan tidak semua orang tua mampu membelikan anak-anaknya anting emas dan perhiasan lainnya. Ketika semua sudah berjilbab, jurang pemisah itu jadi makin dipersempit," ujar Fauzi.

*Kelima*, mayoritas siswi non-muslim di sekolah negeri di Kota Padang menggunakan jilbab karena tidak ingin ada perbedaan mencolok dari teman-temannya yang lain. Klaim ini terlihat dalam kutipan teks berita berikut :

“Angel mengatakan, dirinya bisa saja mengusulkan kepada pihak sekolah supaya dapat memakai pakaian yang tidak memakai jilbab. Tetapi, ia tidak melakukan hal itu karena ia tidak ingin ada perbedaan mencolok dari teman-temannya yang mayoritas beragama Islam dan memakai kerudung. Tetapi pada kenyataannya mayoritas siswi non-muslim di sekolah negeri di Kota Padang menggunakan jilbab karena tidak ingin ada perbedaan mencolok dari teman-temannya yang lain.”

**Treatment recommendation (menekankan penyelesaian).** Adapun penyelesaian yang ditekankan pada berita ini adalah merevisi aturan dan tata tertib berpakaian agar tidak ada celah diskriminasi. Kutipan teks berita berikut dapat dilihat sebagai buktinya :

“Rusmadi mengatakan pihaknya akan segera merevisi aturan dan tata tertib berpakaian agar tidak ada celah diskriminasi.”

**d. Berita 4 : “MUI: Sudahi Polemik Jilbab di Sekolah”**

Berita yang berjudul “*MUI: Sudahi Polemik Jilbab di Sekolah*”, terbit pada tanggal 26 Januari 2021. Adapun analisis *framing*-nya berdasarkan 4 (empat) elemen perangkat *framing* Robert N. Entman adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 8 Analisis Berita 4 Republika Online**

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Hormati kearifan lokal masing-masing daerah selama masih dalam koridor nilai-nilai keagamaan, moral, dan kebangsaan. Tidak ada pemaksaan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Praktik di lapangan banyak siswi non-Muslim juga menggunakan jilbab.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Esensi aturan berbusana adalah membentuk karakter para siswa dan siswi agar bisa berperilaku baik serta pergaulannya terjaga.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Sudah polemik. Tidak perlu diperpanjang lagi. Selesaikan melalui musyawarah atau kekeluargaan.

**Define problems (pendefinisian masalah).** Dalam berita ini, adapun permasalahan yang terjadi di SMK 2 Padang, *pertama-tama* didefinisikan dalam rangka penghormatan terhadap kearifan lokal masing-masing daerah, selama masih dalam koridor nilai-nilai keagamaan, moral, dan kebangsaan. Hal ini dikemukakan dalam kutipan teks berita berikut :

“Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI KH Amirsyah Tambunan mengatakan, setiap daerah memiliki kearifan lokal yang semestinya dihormati atau bahkan didukung negara selama masih dalam koridor nilai-nilai keagamaan, moral, dan kebangsaan. “Jangan lupa, ada kearifan lokal yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat, terutama masyarakat di mana sekolah berada. Sehingga, kalau sekolah punya ciri khas tertentu, sekolah punya ciri yang spesifik, sah-sah saja. Tidak ada masalah,”

*Kedua*, bahwa terhadap kasus ini, didefinisikan tidak ada pemaksaan. Kutipan teks berikut menyatakan hal dimaksud :

“Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmadi mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksa siswi yang non-Muslim untuk mengenakan kerudung atau pakaian Muslimah. Ia menambahkan, selama ini mayoritas siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang atas kemauan mereka sendiri bersedia mengenakan seragam berkerudung. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain. “Kami tidak pernah memaksakan siswi kami yang non-Muslim memakai kerudung,” kata Rusmadi di Padang, Jumat (22/1).

**Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah).** Dalam berita ini, yang diposisikan sebagai penyebab masalah adalah praktik di lapangan dimana banyak siswi non-Muslim juga menggunakan jilbab. Ini terungkap dalam teks berita berikut :

“Nomenklatur aturan tersebut ditujukan kepada siswi yang beragama Islam saja. Namun, pada praktiknya di lapangan, siswi yang non-Muslim juga tak sedikit menggunakan jilbab.”

**Make moral judgement (membuat pilihan moral).** Adapun argumentasi yang digunakan untuk mendukung *frame* yang dikembangkan oleh Republika *Online* yakni esensi aturan berbusana adalah membentuk karakter para siswa dan siswi agar bisa berperilaku baik serta pergaulannya terjaga. Teks berikut sebagai buktinya :

“Esensi aturan berbusana adalah membentuk karakter para siswa dan siswi agar bisa berperilaku baik serta pergaulannya terjaga. “Itu yang seharusnya menjadi perhatian para pendidik dan tokoh umat, bukan kemudian dilihat semata-mata karena jilbabnya,” ujar Kiai Didin saat dihubungi, Senin.”

**Treatment recommendation (menekankan penyelesaian).** Penyelesaian yang ditekankan oleh Republika *Online* dalam berita ini adalah sudahi polemik, tidak perlu diperpanjang lagi, selesaikan melalui musyawarah atau kekeluargaan. Ini dinyatakan dalam kutipan teks berita berikut :

“Ia berharap polemik ini tidak diperpanjang lagi. Persoalan yang ada dapat diselesaikan melalui musyawarah atau kekeluargaan. “Saya harap polemik soal pakaian ini sebaiknya sudahi. Karena, ada tugas besar di dunia pendidikan kita, yakni membentuk jati diri pelajar dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” katanya.”

### 3) Seleksi Isu dan Penonjolan Aspek

Robert N. Entman melihat *framing* dalam 2 (dua) dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu.

#### a. Seleksi Isu

Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Dalam proses ini terdapat bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*excluded*).

*Detik.com*, menampilkan fakta pemanggilan orang tua siswi Jeni Cahyani Hia menghadap pihak sekolah karena anaknya tak mengenakan jilbab, sebagaimana yang viral di media sosial. Adapun bagian berita yang dimasukkan (*included*) adalah penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah (adanya kewajiban jilbab terhadap Jeni/siswi non muslim). Sedangkan berita yang dikeluarkan (*excluded*) ialah aturan sekolah jilbab hanya berupa imbauan bagi siswi nonmuslim. Tidak ada ditampilkan penjelasan bahwa dalam aturan dinyatakan bahwa bagi non muslim aturan jilbab hanya berupa imbauan atau menyesuaikan.

Sedangkan Republika *Online*, menampilkan fakta protes Elianu Hia salah satu wali murid kepada pihak SMK N 2 Padang, sebagaimana video yang tersebar di media sosial. Adapun bagian berita yang dimasukkan (*included*) adalah aturan yang tidak mewajibkan pemakaian jilbab di sekolah. Adapun sejumlah aturan tersebut antara lain : UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud 45 Tahun 2014 tentang seragam sekolah bagi

peserta didik pendidikan dasar dan menengah, Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005. Sedangkan berita yang dikeluarkan (*excluded*) ialah pernyataan pihak sekolah SMKN 2 Padang (Wakasek Bidang Kesiswaan) yang menyatakan bahwa Jilbab adalah kewajiban bagi SMKN 2 Padang.

Aspek seleksi isu yang berkaitan dengan pemilihan fakta yang ditampilkan ini, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana fakta itu dipahami oleh media. Proses pemilihan fakta ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bagian dari teknis jurnalistik, tetapi juga politik pemberitaan, yaitu bagaimana dengan cara dan strategi tertentu media secara tidak langsung telah mendefinisikan realitas. *Detik.com* mendefinisikan kasus ini sebagai sebuah peristiwa intoleran, sedangkan *Republika Online* memberikan *frame* bahwa dalam peristiwa ini tidak ada unsur paksaan.

#### **b. Penonjolan Aspek**

Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana seperti penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis, pemakaian label tertentu, asosiasi terhadap simbol budaya, dan lain-lain.

*Detik.com* menempatkan berita ini di Rubrik *Round-Up*. Rubrik *Round-Up* adalah sebuah rubrik yang merupakan rangkuman atau pengulangan pemberitaan sebelumnya yang sejenis yang kemudian disarikan kembali, karena berita tersebut termasuk berita terpopuler dan mendapat perhatian yang cukup banyak dari pembaca. Selain itu, dalam pemberitaan kasus ini, terdapat pengulangan fakta, dimana pada bagian awal berita selalu ditampilkan fakta awal mula/kronologis peristiwa sebagaimana terdapat pada video viral adu argumen pemanggilan orang tua siswi. Selanjutnya peristiwa ini dicitrakan dengan label intoleran. Label intoleran ini juga diulang-ulang pada setiap pemberitaan kasus ini. Lalu didukung dengan grafis bangku kosong di ruang kelas sebagai ilustrasi sekolah.

*Republika Online (ROL)*, menempatkan berita ini di Rubrik Khazanah. Rubrik Khazanah adalah rubrik tentang dunia islam. Penempatan kasus ini di

rubrik Khazanah secara tidak langsung memperlihatkan keberpihakan ROL terhadap Islam dalam kasus ini. Dalam penulisan kronologis peristiwa, diksi yang digunakan adalah “merasa dipaksa”.

“Salah seorang orang tua murid bernama Elianu Hia memprotes pihak SMK 2 Padang karena merasa anaknya dipaksa memakai pakaian berkerudung di sekolah”.

Diksi “merasa dipaksa” di sini bisa berarti belum tentu ada paksaan. Baru perspektif orang tua murid (Elianu) yang merasa ada paksaan. Pada faktanya bisa jadi belum tentu ada paksaan. Disamping itu, kasus ini dikaitkan dengan asosiasi simbol budaya yaitu kearifan lokal di Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Lalu didukung dengan gambar Pejudo (Judoka) memakai jilbab (kasus judoka menolak membuka jilbab di Asean Games) dengan keterangan gambar : Jilbab menjadi kearifan bangsa Indonesia.

Penonjolan aspek tertentu dari suatu isu ini sangat berkaitan dengan penulisan fakta. Proses ini sangat berhubungan dengan pemakaian bahasa dalam menuliskan realitas untuk dibaca oleh khalayak. Pilihan kata-kata tertentu dipakai tidak sekedar teknis jurnalistik, tetapi sebagai politik bahasa. Bagaimana bahasa dapat menciptakan realitas tertentu kepada khalayak. Kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga membatasi persepsi kita dalam mengarahkannya pada cara berfikir dan keyakinan tertentu. Dengan kata lain, kata-kata yang dipakai dapat membatasi seseorang melihat perspektif lain, menyediakan aspek tertentu dalam suatu peristiwa dan mengarahkan bagaimana khalayak harus memahami suatu peristiwa. Tetapi yang lebih penting bagaimana kata-kata sesungguhnya dapat mengarahkan logika tertentu untuk memahami persoalan.

### **5.1.2 Pembingkai Detik.com dan Republika Online dikaitkan dengan dikaitkan dengan 5 (Lima) Level Pengaruh Isi Media**

Sesuai dengan teori hirarki pengaruh isi media yang diperkenalkan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II, terdapat lima level yang dapat mempengaruhi isi media. Kelima level tersebut adalah level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level extramedia, dan level ideologi.

## 1. Level Individu

Level awal yang menentukan isi media adalah individu. Maksud dari individu itu sendiri adalah para pekerja media seperti wartawan, reporter, dan sebagainya. Pengaruh individu pekerja media, diantaranya adalah karakteristik, sikap, nilai, agama individu secara tidak langsung mempengaruhi isi media. Karakteristik individu yang dimaksud disini bisa berupa etnis atau asal daerah.

Menurut Febrian Fachri, wartawan atau reporter memiliki potensi untuk mempengaruhi isi media. Karena wartawanlah yang di lapangan dan yang pertama mengetahui realitas. Wartawan memang diberi ruang untuk itu.

“Kalau saya akui, memang ada pengaruh individual, meskipun Republika ini lebih pro kepada kearifan lokal yang berbau Islam. Tapi tidak semua orang Republika seperti itu. Tetap wartawan itu diberi ruang untuk mendengarkan hati nuraninya. Nurani orang-kan beda-beda. Kalau lah yang ditarok oleh Republika jurnalisnya untuk Sumatera Barat itu adalah orang Jogja (seperti jurnalis sebelumnya), belum tentu sama berita yang dia tulis. Memang ada pengaruh individual, wartawan memang diberi ruang untuk itu. Karena wartawan yang di lapangan. Dia yang tahu realitas.” (Febrian Fachri, 25 Maret 2022).

Hal tersebut juga diamini oleh John Nedy Kambang, sebagaimana hasil wawancara berikut :

“Lebih soal hati nurani. Saya dalam kasus seperti ini selalu menggunakan nurani. Ketika wartawan mulai mengetik satu kalimat, dua kalimat pembuka saja, sudah di *framing* pikirannya. Bahwa tujuannya membuat berita, ini. Tidak ada namanya independen, lurus-lurus saja. Ada tujuan awalnya ketika membuat berita, bagaimana agar supaya orang tidak ribut, atau bagaimana supaya orang ribut, bagaimana agar berita ini dibaca. Artinya dari sisi itu, wartawan tidak pernah independen. Cuma bagaimana memanfaatkan ketidak independenan itu dengan cara yang lebih baik atau baik.” (John Nedy Kambang, 7 April 2022).

Kemudian Febrian menegaskan sesuai dengan hasil wawancara sebagaimana berikut :

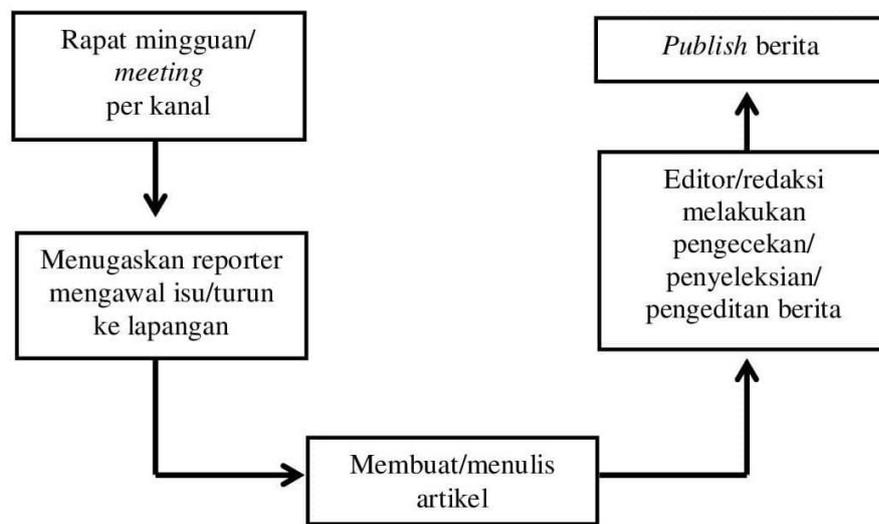
“Kenapa angel saya seperti itu, karena saya orang Minang, saya orang Islam. Walaupun *nggak* taat-taat *banget*, saya tidak ingin agama saya diinjak-injak, tidak ingin suku Minang saya diinjak-injak. Itulah sudut pandang saya.” (Febrian Fachri, 25 Maret 2022).

## 2. Level Rutinitas Media

Level selanjutnya yang mempengaruhi isi pemberitaan di suatu media adalah rutinitas media (*media routines*). Rutinitas media memiliki pengaruh yang

penting pada produksi isi simbolik karena menentukan bagaimana produk yang dihasilkan media. Pada level ini jurnalis sudah dibiasakan untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan cara atau prosedur yang pasti dan tetap. Rutinitas media ini merupakan kebiasaan sebuah media dalam mengemas berita. Pengaruh dari rutinitas ini membuat para pekerja media menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan tetap yang telah ditetapkan oleh media mereka bekerja.

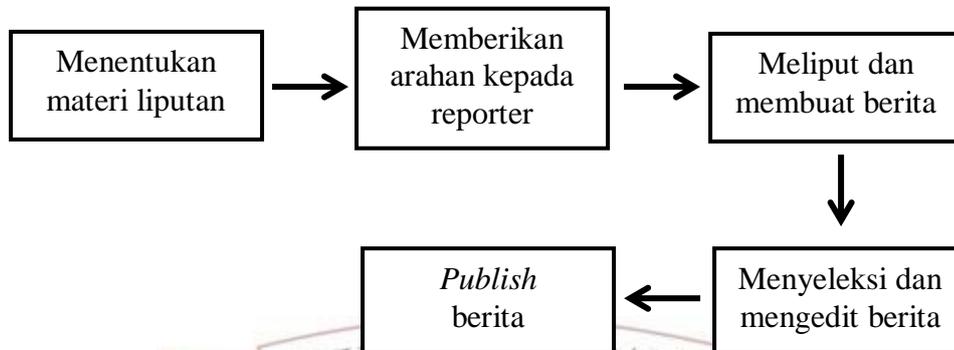
Berdasarkan hasil penelitian Rizki (2021: 76), adapun alur dalam pengolahan berita di Detik.com adalah sebagai berikut :



**Gambar 5. 1 Alur Pengolahan Berita Detik.com**

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa alur pemberitaan di Detik.com yakni, *Pertama*, redaktur serta reporter melakukan rapat mingguan atau rapat *meeting* perkanal, dalam rapat itu membahas topik dalam sepekan atau topik utama serta redaktur memberi arahan kepada reporter. *Kedua*, menugaskan reporter mengawal isu atau turun ke lapangan, mengawal isu ini biasa disebut piket *standby*, piket *standby* akan dibagi menjadi dua *shift* waktu yaitu pagi (jam 7 pagi sampai 4 sore) dan malam (jam 11 siang sampai 8 malam). *Ketiga*, membuat atau menulis artikel, membuat artikel ini sudah ditargetkan oleh redaksi bahwa minimal membuat lima artikel dalam sehari. *Keempat*, editor atau redaksi melakukan pengecekan terhadap penulisan serta informasi pada tulisannya. *Kelima*, *publish* berita, berita yang telah diperiksa dan diterima oleh editor dan redaksi akan dimuat ke *website*.

Sedangkan alur dalam pengolahan berita di *Republika Online*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widayanti (2020: 52) adalah sebagai berikut:



**Gambar 5. 2 Alur Pengolahan Berita Republika Online**

Unsur pengolahan pemberitaan memiliki pengaruh yang kuat karena dalam proses pengolahan pemberitaan terdapat hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh seluruh pekerja di *Republika Online*. Dalam proses pengolahan berita di *Republika Online*, sebelum liputan ke lapangan para reporter dan redaktur melakukan diskusi terlebih dahulu. Di *Republika Online* yang membawahi reporter secara langsung adalah *newsroom*. Sedangkan yang memegang kebijakan di meja redaksi adalah redaktur. Redaktur bisa mengorder bahan berita kepada reporter begitu juga sebaliknya reporter pun biasanya bertanya kepada redaktur mengenai materi pemberitaan.

### **3. Level Organisasi**

Unsur selanjutnya yang mempengaruhi sebuah pemberitaan di media adalah pengaruh organisasi (*organizational level*). Pengaruh level organisasi media berkaitan dengan struktur manajemen organisasi media, kebijakan sebuah media, dan tujuan sebuah media. Level organisasi ini lebih berpengaruh besar terhadap sebuah pemberitaan, karena kebijakan terbesar dipegang oleh pemilik media melalui editor di sebuah media. Penentu kebijakan pada sebuah media dalam menentukan pemberitaan tetap dipegang oleh pemilik media, maka dari itu ketika ada tekanan dari pemilik media tentunya pekerja secara individu dan rutinitas media akan kalah pada organisasi yang lebih besar beserta tujuannya.

Jadi, pemberitaan media bukanlah sebuah hasil kerja yang bersifat perseorangan, melainkan kerja kelompok yang menunjukkan aspek kolektivitas.

Terkait dengan isu yang diteliti, adapun dinamika internal di organisasi Detik.com sesuai dengan hasil wawancara dengan informan, adalah sebagai berikut :

“Detik selama ini yang setahu saya tidak pernah berada di pihak-pihak tertentu. Di internal sendiri (editor) beragam, ada muslim dan non muslim, mereka punya kepentingan masing-masing. Tapi secara perusahaan itu tidak ada, mereka berada di jalur, kalau pihaknya lebih banyak berpihak ke muslim ya muslim, non muslim ya non muslim. Sesuai dengan garisan saja.” (John Nedy Kambang, 7 April 2022).

Sedangkan pada *Republika Online*, dari keterangan informan, dapat disimpulkan bahwa yang paling berpengaruh dalam kebijakan redaksi dan pemberitaan adalah redaktur. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan kebijakan redaksi adalah redaktur. Pemilik media tidak terlalu mencampuri urusan teknis pemberitaan.

“Gak bisa dibbilang semuanya ya. Sangat jarang. Beliau paling mengingatkan kita saja. Misalnya di media lain begini dia bilang tolong jangan ikut-ikutan kayak gitu paling itu saja. Dia tidak pernah mencampuri sampai ke teknis. Hal yang teknis banget mungkin lebih banyak ke urusan sama redpel.” (Febrian Fachri, 25 Maret 2022).

Meskipun yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan redaksi adalah redaktur, namun semua pemberitaan yang ditampilkan ke publik adalah hasil dari musyawarah semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk reporter. Hal sebagaimana dimaksud diatas, dapat juga terlihat pada isu jilbab yang diteliti, sebagaimana hasil wawancara dengan informan :

“Perintah dari kantor. Perintah *pertama*, pantau aja dulu. Isu ini barang panas ini. Kelihatannya bakal rame. Karena sudah dimainin sama *buzzer*. Ini isu sudah kemana-mana. Sumbar terdiskreditkan secara negatif. Koordinasi dengan atasan, kita disini bela Sumbar. Karena ini isu ‘digoreng’ *buzzer*, yang masih ada dendam-dendam dari buzzer-buzzer pro pemerintah terhadap Sumatera Barat. Kita disini posisi *Republika* adalah membela kearifan lokal Sumatera Barat. Jadi posisi *Republika* menjelaskan itu.” (Febrian Fachri, 25 Maret 2022).

Posisi *Republika Online* dalam isu ini memang jelas merupakan instruksi atau perintah dari redaktur.

#### 4. Level Ekstra Media

Pengaruh keempat terhadap isi pemberitaan sebuah media dalam teori hirarki pengaruh adalah pengaruh dari luar organisasi media. Pengaruh tersebut meliputi sumber berita, sumber penghasilan media, kontrol dari pemerintah dan lingkungan bisnis atau pangsa pasar.

##### a. Sumber berita

Sumber berita disini dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral yang memberikan informasi apa adanya, tetapi juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan seperti memenangkan opini publik atau memberi citra tertentu kepada khalayak. Sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, sumber berita sudah barang tentu memberlakukan politik pemberitaan. Informasi yang diberikan merupakan informasi yang dianggap baik dan menguntungkan bagi dirinya, sebaliknya mengeliminasi informasi yang sekiranya tidak menguntungkan dirinya. Terkait hal ini, informan *Republika Online* menyampaikan hal sebagai berikut :

“Kita memilih narasumber itu, kita sudah mengarahkan sebenarnya. Dikasih ruang, *statement* narasumber itu yang mengarahkan kita. Tapi memang ada beberapa media itu yang sengaja diarahkan.” (Febrian Fachri, 25 Maret 2022).

Sedangkan informan dari *Detik.com*, memberikan pandangannya sebagaimana berikut ini :

“Tergantung pemilihan narasumber. Dari sisi mana kita memframing, terlihat dari pihak mana narasumber yang dominan. Semuanya diberi ruang, tapi tidak dominan.” (John Nedy Kambang, 7 April 2022).

##### b. Sumber penghasilan media

Sumber penghasilan media bisa berupa iklan, bisa juga berupa pelanggan/pembeli media atau dalam media *online* adalah pembaca. Dasar pemikirannya, media harus *survive* dan untuk memenuhi tuntutan tersebut, kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Mengenai pengaruh sumber penghasilan media terhadap pemberitaan dan *framing* yang dilakukan *Republika*, berikut petikan wawancaranya :

“Kita di *Republika* untuk masalah ini tidak, namun untuk beberapa isu mungkin ada. *Pure* ini berita andalannya *Republika*. *Republika* menjalankan fungsinya di sini. Bukan karena pengaruh faktor dari luar.” (Febrian Fachri, 25 Maret 2022).

Sedangkan informan dari Detik.com menyatakan sebagai berikut tentang pengaruh sumber penghasilan media terhadap pemberitaan :

“Sumber penghasilan media dalam hal ini lebih banyak viewer. Semakin banyak viewer maka berita semakin naik.”( John Nedy Kambang, 7 April 2022).

c. Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis

Ini berkaitan dengan *state regulation* dan *market regulation*. Dalam negara otoriter, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan. Karena negara menentukan apa yang boleh dan tidak boleh untuk diberitakan dan pemerintah memegang lisensi penerbitan. Nasib media berada ditangan pemerintah. Sedangkan di negara demokratis dan liberal, campur tangan negara nyaris tidak ada, yang memiliki pengaruh besar adalah lingkungan pasar dan bisnis.

Terkait pengaruh lingkungan bisnis (pangsa pasar) terhadap *framing* yang dilakukan Republika *Online*, dinyatakan oleh Febrian Fachri sebagai berikut :

“Mempengaruhi. Karena pembaca Republika adalah umat Islam. Republika koran favoritnya orang Sumbar. Banyak yang saya temui tokoh-tokoh Sumbar itu percayanya ya sama Republika.”(Febrian Fachri, 25 Maret 2022).

Sementara, untuk Detik.com, dinyatakan oleh John Nedy Kambang sebagai berikut :

“Setiap pemberitaan kalau di detik.com, klo dicermati, disetiap pemberitaan itu ada kolom komentar, setiap komentar ketiga dan kelipatannya, itu ada iklan otomatis. Semakin banyak orang berkomentar akan semakin banyak iklan-iklan baris yang muncul. Iklan baris kalau di nasional itu harganya 3.5 sampai 5 juta sekali tayang sehari. Jadi itu ketika viewernya semakin bagus, berita itu masuk ke dalam terpopuler. Yang terpopuler, komentarnya pasti banyak.” (John Nedy Kambang, 7 April 2022).

Mengenai pengaruh atau kontrol Pemerintah terhadap *framing* atau pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini. Informan Detik.com memberikan penjelasan sebagaimana berikut :

“Sejauh ini tidak ada. Hanya mungkin ada beberapa pihak yang mengingatkan seperti yang saya pikirkan ujungnya kasus ini seperti ini, dampaknya begana-begini seperti yang saya pikirkan juga. Yang mempengaruhi ini dihentikan, tidak ada.” (John Nedy Kambang, 7 April 2022).

Sementara informan dari *Republika Online*, menyatakan sebagaimana kutipan wawancara berikut :

“Tidak. Karena dalam kasus ini justru *Republika* berseberangan dengan Pemerintah.” (Wawancara dengan Febrian Fachri, 25 Maret 2022).

#### **4. Level Ideologi**

Pada level terakhir ini, isi media dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh institusi media tersebut. Ideologi merupakan sesuatu yang membatasi cara pandang kita terhadap dunia dan diri kita sendiri, ideologi juga yang mengatur pandangan kita dengan natural dan jelas. Ideologi bersifat abstrak tidak dapat dilihat secara langsung seperti level-level sebelumnya. Ideologi yang dianut media dapat dilihat dari berita yang dibuat, karena para pekerjanya pun harus bekerja sesuai ideologi yang akan diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan pada perusahaan media massa tersebut. Namun, level ideologi merupakan level yang dapat menyerap ke semua level.

Ideologi atau paham yang dianut akan sangat kental mempengaruhi isi. Dan sebaliknya, masyarakat akan sangat mudah melihat ideologi dari sebuah media dari isi-isi berita yang disampaikan. Media yang berideologikan agama misalnya, akan lebih cenderung mengangkat berita yang bersudut pandang agamanya. Ataupun media yang berideologikan nasionalis, maka berita-berita yang diangkat pun mengarah pada hal-hal yang bersifat kebangsaan, keindonesiaan, dan sebagainya.

Setiap media memiliki ideologi yang menjadi landasan mereka dalam berpikir dan mengambil keputusan. Pada level ini terlihat bagaimana media berfungsi sebagai penyalur dari sebuah kepentingan tertentu yang kuat di masyarakat. Kerutinan media, nilai-nilai, dan struktur organisasi bersatu untuk mempertahankan ideologi yang dominan dan dapat membentuk karakter media.

Perihal ideologi media ini tidak banyak disinggung ketika berada dalam pekerjaan, yang selalu diutamakan di *Detik.com* ialah akurasi informasi, jangan terpengaruh jika ada intervensi dari manapun, bisa menjadi yang terpercaya, dan cepat. Hal ini terbentuk secara natural bagi pekerja media sesuai dengan rutinitas media yang biasa dilakukan, dan juga kembali lagi ke visi dan misi media.

“Ideologi pasti selama saya bekerja sebenarnya nggak pernah terlalu banyak disinggung. Tapi, yang selalu diutamakan adalah akurasi, pertama

kita jadi reporter di sana yang selalu dikedepankan adalah akurasi dan sebisa mungkin jangan terpengaruh apa kalau ada intervensi dari siapapun, tentu sangat berpengaruh terhadap pekerjaan sehari-hari, karena reporter pada akhirnya tidak mengandalkan editor untuk verifikasi data, tetapi, reporter yang punya andil kuat untuk memastikan data yang dibawa kemudian ditulis dalam artikel bisa dipertanggungjawabkan.” (John Nedy Kambang, 7 April 2022).

Dengan ideologi Islamnya, *Republika Online* mempengaruhi para pekerjanya dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Ideologi para pekerja *Republika Online* terlihat dalam pemikiran serta tulisan mereka. Apabila ada isu-isu yang menyangkut umat Islam di Indonesia maupun di dunia, maka *Republika Online* menjadi media yang paling sering mengupdate perkembangannya. Terkait pengaruh ideologi terhadap pemberitaan kasus Jilbab di SMKN 2 Padang ini, dapat terlihat dari komentar Informan dari *Republika Online* berikut :

“Nyawa medianya yang menentukan. *Republika* itu nyawa medianya membela umat Islam. Membela kepentingan umat Islam. Kalau ada yang menginjak-injak Islam, *Republika* berdiri di depan. Dan Minang sangat dekat dengan Islam. Jadi *republika* akan selalu bela kearifan Minang.” (Wawancara dengan Febrian Fachri, 25 Maret 2022).

## 5.2 Pembahasan

### 5.2.1 Pembingkai Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang : *Frame*

#### **Detik.com dan *Republika Online***

*Framing* dalam konsepsi Entman, pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

**Pendefinisian masalah (*define problems*)**, adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan *master frame*/bingkai yang paling utama. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu dipahami.

Pada kasus jilbab di SMK Negeri 2 Padang ini, *Detik.com* *pertama-tama* mendefinisikan kasus ini sebagai bentuk intoleransi. Intoleran dijadikan bingkai yang dominan karena dari 4 berita yang dianalisis, semua berita tersebut menjadikan intoleran sebagai *frame*. Alasan karena tenaga kependidikan tidak tepat dalam mengajarkan semangat keberagaman di kalangan siswa karena tidak mengutamakan nilai Pancasila dan kebhinekaan, serta kasus ini melanggar

peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan. *Kedua*, kasus ini dibingkai sebagai bentuk pemaksaan pemakaian jilbab bagi siswi non muslim. Alasannya karena tidak adanya ruang toleransi bagi peserta didik. Peristiwa yang terjadi merupakan pemaksaan terkait keyakinan agama tertentu. Selain itu juga tidak adanya penghormatan terhadap keberagaman sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1. *Ketiga*, tidak pancasilais. Alasannya karena peraturan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tugas pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak memiliki kesadaran sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus tertanam sejak dini lewat pendidikan. Pancasila menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan masyarakat yang inklusif (terbuka, tidak eksklusif untuk golongan tertentu). *Keempat*, melanggar HAM. Ada tiga alasan yang mendasari kenapa kasus ini dapat dikatakan dibingkai sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu tidak menghargai keberagaman, peristiwa ini berpotensi kuat melanggar hak-hak anak dan peraturan sekolah SMKN 2 Padang yang mewajibkan seluruh siswinya mengenakan hijab.

Sementara itu pada *Republika Online*, ada beberapa *frame* yang dikembangkan dalam kasus jilbab di SMKN 2 Padang ini. *Pertama*, salah interpretasi. Bermulanya kasus ini disebabkan karena adanya salah interpretasi dari pernyataan salah seorang wakil kepala sekolah (Wakil Kepala sekolah Bidang Kesiswaan, Zakri Zaini) sehingga menyebabkan kasus ini menjadi viral. *Kedua*, miskomunikasi. Bingkai yang dikembangkan dalam kasus ini adalah dalam kerangka miskomunikasi yang terjadi antara pihak guru dengan wali murid. *Ketiga*, merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal. Peristiwa yang terjadi di salah satu SMK di Sumatera Barat ini dianggap bukanlah sebagai suatu hal yang perlu dipermasalahkan karena merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal di Sumatera Barat karena Sumatera Barat memiliki akar keislaman yang kuat sesuai dengan filosofi adat '*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah.*' *Keempat*, tidak ada unsur paksaan. *Frame* berikutnya yang dikembangkan oleh *Republika Online* dalam kasus ini adalah tidak adanya unsur paksaan. Tidak adanya pemaksaan dijadikan bingkai yang

dominan oleh *Republika Online* karena dari 4 berita yang dianalisis, semua berita tersebut menjadikan tidak adanya unsur paksaan sebagai *frame*. Untuk memperkuat bingkai ini, diwawancarai beberapa siswi non muslim sebagai pihak yang merasakan, terlibat dan bersentuhan langsung dengan aturan yang terdapat di SMKN 2 Padang ini. *Kelima*, isu aturan jilbab di SMKN 2 Padang dibesarkan. *Frame* ini dikembangkan sesuai dengan pernyataan dan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar.

Dari pendefinisian masalah di atas terlihat bahwa dari peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh *Detik.com* dan *Republika Online*. Perbedaan ini tidak terlepas dari bagaimana perspektif yang dibangun oleh masing-masing media. Sudut pandang yang dibangun terlihat sangat kontradiktif dan cenderung berhadapan secara *vis a vis* satu sama lain. *Republika* terlihat mencoba *counter* perspektif isu yang dibangun oleh *Detik.com*.

**Memperkirakan penyebab masalah (*diagnose causes*)**, merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*) tetapi bisa juga berarti siapa (*who*).

Pada keseluruhan berita *Detik.com*, pihak sekolah dalam hal ini Zakri Zaini (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan), Rusmadi (Kepala SMKN 2 Padang) dan Aturan SMK Negeri 2 Padang, diposisikan sebagai aktor (penyebab masalah). Sebaliknya Jenia Cahyani Hia dan Elianu Hia dipandang dan diposisikan sebagai korban. Zakri Zaini dipersalahkan karena merupakan perwakilan pihak sekolah yang menerima Elianu (wali murid) sebagaimana perdebatan yang terjadi di dalam video siaran langsung di Media Sosial yang sempat viral tersebut. Sedangkan Rusmadi merupakan orang yang paling bertanggung jawab di sekolah ini karena merupakan kepala sekolah dan pihak yang mengeluarkan peraturan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Sementara aturan sekolah dianggap sebagai biang keladi permasalahan ini karena tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila, kebhinekaan dan keberagaman. *Detik.com* di awal teks beritanya selalu menampilkan kronologi kejadian yang viral di media sosial tersebut. Dalam hal ini nampak bahwa Jeni dan Elianu

sebagai korban. Ia berusaha memprotes dan mempertanyakan dasar penerapan aturan yang dikeluarkan oleh SMKN 2 Padang tersebut.

Sementara itu, dalam berita yang disajikan oleh *Republika Online*, ada beberapa hal yang diposisikan menjadi penyebab masalah. *Pertama*, interpretasi yang salah dari pernyataan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Zakri Zaini). Interpretasi yang salah tersebut menyebabkan dan memunculkan permasalahan jilbab bagi siswi nonmuslim di SMK 2 sehingga masalah ini menjadi polemik dan viral di media sosial. *Kedua*, penyebaran ke akun media sosial. Penyebaran protes yang dilakukan oleh Elianu ke akun media sosialnya dianggap sebagai biang permasalahan karena dengan adanya penyebaran tersebut menyebabkan permasalahan ini menjadi viral. Penyebaran ke akun media sosial oleh Elianu dianggap sebagai penyebab permasalahan, sehingga peristiwa menjadi viral dan akhirnya menimbulkan polemik. *Ketiga*, aturan berpakaian di SMK 2 tidak tegas. Aturan berpakaian yang terdapat di SMKN 2 Padang dianggap menjadi penyebab masalah sehingga menyebabkan adanya kesalahan persepsi dalam penerapannya. *Keempat*, implementasi aturan di lapangan. Dalam *frame* yang dikembangkan oleh *Republika Online*, dasar aturan pertama kali tentang pemberlakuan jilbab di sekolah yaitu Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005, bukanlah menjadi hal yang dipersalahkan. Melainkan prakteknya di lapangan (implementasi)-nya lah yang dipersalahkan karena dalam praktik di lapangannya tidak sedikit siswi non-Muslim juga menggunakan jilbab.

Bagaimana peristiwa dipahami, menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Ketika masalah dipahami secara berbeda, secara tidak langsung penyebab masalah juga akan dipahami secara berbeda. Ini terlihat dari apa dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah dari polemik Jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini. Sumber masalah dari peristiwa ini tidak terlepas dari bagaimana peristiwa dipahami dan kemana arah perspektif yang hendak dibangun oleh Detik.com dan *Republika Online*.

*Frame* salah interpretasi dan interpretasi yang salah dari pernyataan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Zakri Zaini) yang ditempatkan oleh *Republika Online* sebagai *define problem* dan *diagnose cause*, membuktikan

bahwa *framing* yang didefinisikan oleh George J. Aditjondro sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang sesuatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, terbukti kebenarannya. Dalam hal ini bukan interpretasi yang salah dari Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Zakri Zaini) terhadap aturan jilbab di sekolah yang dianggap menjadi permasalahan sebagaimana terdapat dalam video siaran langsung yang dibagikan dalam akun *facebook* Elianu Hia, akan tetapi justru interpretasi yang salah dari pernyataan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Zakri Zaini) yang dianggap menjadi penyebab masalah sehingga kasus Jilbab di SMK Negeri 2 Padang menjadi polemik. Terhadap hal ini pun tidak ditegaskan atau dijelaskan lebih lanjut, siapa yang salah menginterpretasikan pernyataan Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan (Zakri Zaini) dimaksud.

**Membuat pilihan moral (*make moral judgement*)** adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan.

Pada Detik.com, *frame* intoleran, pemaksaan, tidak pancasilais dan pelanggaran HAM, didukung dengan klaim-klaim moral Pancasila, nasionalisme, bhinneka tunggal ika, keberagaman, toleransi, hak asasi manusia (HAM), penghormatan terhadap keyakinan siswa dan mekanisme peraturan yang berlaku. Sementara pada Republika Online, *frame* salah interpretasi, miskomunikasi, bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, tidak adanya unsur paksaan, isu aturan jilbab di SMKN 2 Padang dibesar-besarkan dan tidak adanya intimidasi, didukung dengan klaim-klaim moral, antara lain : *pertama*, sebelum mengeluarkan pendapat, cari tahu dulu kebenarannya. Klaim moral ini digunakan untuk men-*counter* atau meluruskan informasi dan berita yang berseliweran di media, dimana tokoh-tokoh di tingkat pusat men-*claim* dan menjustifikasi bahwa kasus ini merupakan bentuk anti kebhinekaan dan intoleran. *Kedua*, Filosofi adat orang Minang '*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*. *Ketiga*, Untuk mencerminkan identitas perempuan minang yang menutup aurat. Jati diri Sumbar yang kental dengan nuansa Islami. *Keempat*, agar tidak ada perbedaan mencolok antara siswi non-muslim dari teman-temannya yang lain. *Kelima*, esensi aturan

berbusana adalah membentuk karakter para siswa dan siswi agar bisa berperilaku baik serta pergaulannya terjaga.

**Menekankan penyelesaian** (*treatment recommendation*), merupakan jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah/isu. Penyelesaian bergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Detik.com secara tidak langsung merekomendasikan agar mencabut aturan yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 2 Padang dan harus ada peringatan dan sanksi tegas terhadap sekolah dan guru yang melakukan pemaksaan atribut keagamaan terhadap siswi non muslim. Selain itu, Detik.com juga merekomendasikan agar proses seleksi rekrutmen guru lebih ketat dan menyiapkan *hotline* aduan guna mencegah kasus serupa terulang sebagaimana yang akan dilakukan oleh Mendikbud.

Sementara itu, ada beberapa rekomendasi penyelesaian yang ditawarkan *Republika Online*. *Pertama*, memberikan sanksi atau memecat Kepala Sekolah, dengan catatan bila ada temuan pelanggaran. Tetapi untuk rekomendasi ini pihak Kemendikbud disarankan untuk meninjau persoalan langsung ke lapangan untuk mencari tahu fakta yang terjadi. *Kedua*, sebaiknya diterapkan pengecualian penerapan aturan jilbab kepada siswi yang tidak beragama Islam. *Ketiga*, merevisi aturan dan tata tertib berpakaian. *Keempat*, Sudah polemik. Tidak perlu diperpanjang lagi. Selesaikan melalui musyawarah atau kekeluargaan.

Berdasarkan hasil analisis *framing* berita polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang menggunakan model Robert N. Entman, membuktikan asumsi penelitian ini di awal bahwa terhadap isu ini terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda. Satu sisi Detik.com terlihat memberikan pandangan negatif (kontra) terhadap peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini dengan memberikan *frame* bahwa polemik Jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini merupakan sebagai bentuk intoleransi, merupakan bentuk pemaksaan pemakaian jilbab bagi siswi nonmuslim, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (tidak pancasilais) dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Label intoleransi terhadap kasus ini merupakan aspek yang ditonjolkan oleh Detik.com karena dijadikan bingkai yang dominan, sebab dari 4 (empat)

berita yang dianalisis, semua berita tersebut menjadikan intoleran sebagai *frame*. Pada setiap pemberitaan oleh Detik.com selalu disematkan label intoleran. Sehingga *frame* intoleran merupakan *frame* yang selalu di ulang-ulang pada setiap pemberitaan.

Sementara Republika *Online* memberikan pandangan yang positif (pro) atau dalam hal ini terlihat membela atau berpihak pada SMK Negeri 2 Padang atau Sumatera Barat secara umum yang terdiskreditkan oleh isu atau peristiwa ini. Republika *Online* memberikan *frame* salah interpretasi, miskomunikasi, bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, tidak ada unsur paksaan dan isu aturan jilbab di SMKN 2 Padang dibesar-besarkan, terhadap polemik jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini dalam pemberitaannya.

Tidak adanya unsur paksaan dalam kasus yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini menjadi aspek yang ingin ditonjolkan oleh Republika *Online*. Dari 4 (empat) berita yang dianalisis, terdapat *frame* tidak adanya unsur paksaan pada semua berita yang disajikan. Artinya terdapat pengulangan *frame* tidak adanya pemaksaan pada setiap pemberitaan Republika *Online*.

Ini menjadi bukti bahwa terdapat *framing* atau pembingkaihan oleh media terhadap isu atau sebuah peristiwa yang disajikan kepada khalayak. Isu dan peristiwa yang sama bisa diberitakan dalam perspektif yang berbeda oleh media. Kedua pandangan tersebut bahkan saling kontradiktif. Republika *Online* dari hasil penelitian ini terlihat berusaha mencounter perspektif isu atau opini yang dibangun oleh Detik.com. Terlihat keberpihakan Republika *Online* kepada Islam sebagaimana yang juga dibuktikan pada penelitian terdahulu, yakni penelitian oleh Devi Ambarsari dan Amalia Rosyadi Putri (2021), Aisyah Fadhilah dan Yuli Candrasari (2021), Uky Firmansyah (2019), sehingga hasil penelitian ini dapat memperkuat dan mendukung hasil penelitian tersebut. Penelitian tersebut diantaranya menyatakan bahwa Republika *Online* selalu menyuarakan kepentingan-kepentingan Islam dalam pemberitaannya. Media yang mempunyai slogan "Akrab dan Cerdas" ini dalam pemberitaannya cenderung memihak dalam satu sisi, yaitu umat Islam dan secara terbuka menyatakan sebagai media Islam.

### 5.2.3 Analisis level yang paling mempengaruhi pembingkai Detik.com dan Republika Online dikaitkan dengan 5 (Lima) level pengaruh isi media

Dalam teori hirarki pengaruh isi media yang dipopulerkan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese terdapat lima level yang mempengaruhi media, yaitu level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level ekstra media, dan level ideologi.

#### 1. Level Individu

Pada tataran level individu, cukup mempengaruhi kedua media dalam melakukan *framing* pada pemberitaan kasus Jilbab di SMKN 2 Padang ini. Hal ini disebabkan karena wartawanlah yang pertama kali mengetahui realitas dan orang yang mengetahui kondisi di lapangan. Bagaimana wartawan memahami realitas, itulah yang disajikan dalam laporan/pemberitaan sebuah peristiwa atau kasus.

Ini sejalan dengan pandangan paradigma konstruksionis. Menurut kaum konstruksionis berita adalah hasil konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan (Eriyanto, 2012:29). Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda (Eriyanto, 2012:22). Wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya karena ia merupakan bagian intrinsik dalam pembentukan berita (Eriyanto, 2012: 32–33).

Hal ini memang dapat dibuktikan dalam pemberitaan kasus Jilbab SMKN 2 Padang ini, baik pada Detik.com, maupun Republika Online. Detik.com misalnya, dari 21 berita yang terdapat pada rentang waktu yang diteliti, ada 4 berita yang ditulis oleh John Nedy Kambang, reporter asal Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 9 Daftar Berita yang ditulis John Nedy Kambang**

No.	Tanggal Berita	Judul Berita
1.	23 Januari	"SMK 2 Padang Jamin Tak Ada Diskriminasi Meski Jeni Hia Tak Pakai Kerudung."
2.	26 Januari	"Eks Walikota Padang Soal Aturan Jilbab Untuk Siswi : Tak Ada Tempat Nyamuk Gigit."

No.	Tanggal Berita	Judul Berita
3.	26 Januari	"Eks Walikota Padang Klaim Aturan Siswi Berjilbab Cegah Iri Rambut Warna-Warni."
4.	26 Januari	"Argumen Kasus DBD "Hilang" di Balik Aturan Siswi Berjilbab di Padang."

Berita diatas menunjukkan bahwa berita yang ditulis oleh John Nedy Kambang, reporter atau wartawan detik asal Sumatera Barat yang memiliki latar belakang agama Islam, memang berbeda “arahnya” bila dibandingkan berita *Detik.com* secara umum tentang pemberitaan kasus ini. Jika berita *Detik.com* secara umum lebih mengarah kepada sudut pandang tokoh-tokoh yang berada di “Jakarta” dan membingkai kasus ini dengan *frame* intoleran yang lebih dominan, justru berita yang ditulis oleh wartawan asal Sumatera Barat ini memiliki *angle* yang berbeda dan lebih pro terhadap Sumatera Barat.

Sementara untuk *Republika Online* sendiri, berita-berita tentang kasus Jilbab ini memang pada umumnya ditulis oleh Febrian Fachri reporter *Republika* untuk wilayah Sumbar yang juga merupakan putra daerah asal Sumatera Barat yang juga memiliki latar belakang Agama Islam. Mengenai pengaruh individual terhadap pemberitaan tentang kasus jilbab di SMKN 2 Padang ini, Febrian mengakui kenapa *angel* berita yang ditulis lebih pro kepada Sumatera Barat dan Islam, karena yang bersangkutan merupakan orang Minang dan beragama Islam. Yang bersangkutan tidak ingin kampung halaman dan agamanya disudutkan dalam kasus atau isu ini.

Aspek etika, moral dan nilai-nilai tertentu memang tidak bisa dihilangkan dari pemberitaan media. Etika dan moral yang dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu yang dilandasi oleh keyakinan tertentu, merupakan bagian integral dan tidak dapat terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas (Eriyanto, 2012: 38–39).

Jadi jelas bahwa memang karakteristik, sikap, nilai dan agama individu secara tidak langsung mempengaruhi isi media. Hal ini sesuai dengan apa yang katakan Sudibyo dalam bukunya *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, bahwa latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur atau agama sedikit banyak

mempengaruhi apa yang ditampilkan media, hal ini disebabkan karena aspek personal dari wartawan yang akan mempengaruhi pemberitaan (Sudibyo, 2001:8).

## **2. Level Rutinitas Media**

Rutinitas media merupakan kebiasaan media dalam mengemas sebuah berita. Rutinitas media memiliki pengaruh yang penting pada produksi isi simbolik karena menentukan bagaimana produk yang dihasilkan oleh media. Pengaruh dari rutinitas ini membuat para pekerja media menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan baku yang telah ditetapkan di tempat mereka bekerja.

Pada pemberitaan kasus Jilbab di SMK Negeri 2 Padang ini, pada level rutinitas media, pengaruhnya hampir sama pada kedua media karena ini berkaitan dengan mekanisme standar atau prosedur tetap media dalam menyajikan sebuah berita. Masing-masing media mempunyai aturan atau prosedur tersendiri bagaimana alur pengolahan berita hingga disajikan di depan khalayak. Namun pengaruh yang kuat pada level ini terdapat dalam proses pengolahan pemberitaan. Dalam proses pengolahan berita, sebelum liputan ke lapangan para reporter dan redaktur melakukan diskusi terlebih dahulu. Kemudian repoter ditugaskan untuk mengawal isu atau turun ke lapangan sesuai dengan arah pemberitaan (*framing*). Setelah itu reporter membuat berita yang selanjutnya akan diperiksa oleh editor atau redaktur, dengan menimbang apakah informasi serta penulisannya sudah sesuai dengan *framing* atau kemasan berita. Jika berita tersebut sudah diterima oleh editor atau redaktur, baru berita tersebut akan dimuat ke *website*.

## **3. Level Organisasi Media**

Pada level organisasi media, pengaruh lebih besar nampak pada *Republika Online*. Karena terhadap isu ini jelas merupakan instruksi dari redaksi dan posisi *Republika Online* dalam kasus ini jelas yakni membela Sumatera Barat sebagaimana yang dikatakan informan dari *Republika Online*.

Sedangkan pada *Detik.com* pengaruhnya tidak sebesar *Republika Online*, karena untuk wartawan di daerah lebih kepada bagaimana wartawan tersebut membingkainya dan masih terdapat pengaruh individu dimana berita yang ditampilkan tidak selalu 'seirama' dengan berita yang ditampilkan pada umumnya pada pemberitaan terkait kasus yang terjadi di SMKN 2 Padang ini.

#### 4. Level Ekstra Media

Pengaruh keempat terhadap isi pemberitaan sebuah media dalam teori hirarki pengaruh adalah pengaruh dari luar organisasi media. Pengaruh tersebut meliputi sumber berita, sumber penghasilan media seperti pengiklan dan pembaca itu sendiri, serta kontrol dari pemerintah dan pangsa pasar. Semua kategori dalam level ekstra media ini tentunya memberikan pengaruh pada isi media, namun yang berbeda ialah seberapa besar tingkat pengaruh tersebut.

##### a. Sumber berita

Pemilihan sumber berita berkaitan dengan kemana berita diarahkan di satu sisi, dan di sisi lain sumber berita juga mempunyai kepentingan untuk memenangkan opini publik dalam arti sumber berita juga mempengaruhi isi berita. Berikut ditampilkan sumber berita dari kedua media :

**Tabel 5. 10 Sumber Berita Detik.com**

No.	Judul	Sumber Berita	
		Pro	Kontra
1.	"Maaf Kepsek Usai Geger Siswi Non Muslim Diminta di Padang Berjilbab."	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rusmadi (Kepala Sekolah SMKN 2 Padang).</li> <li>2. Adib Alfikri (Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumbar).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elianu (Orang Tua Siswa)</li> <li>2. Hariyono (Wakil Ketua BPIP)</li> <li>3. Andre Rosiade (Anggota DPR RI asal Sumbar)</li> <li>4. Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI)</li> <li>5. Andreas Hugo Pareira (Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP)</li> <li>6. Hetifah Sjaifuddin (Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar)</li> <li>7. Wikan Sakarinto (Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud)</li> <li>8. Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas)</li> </ol>

No.	Judul	Sumber Berita	
		Pro	Kontra
			HAM) 9. Retno Listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan).
2.	"Aturan Intoleran di Sekolah: Ketua OSIS Islam-Siswa Non Muslim Berjilbab"	1. Rusmadi (Kepsek SMKN 2 Padang) 2. Zakri Zaini (Wakepsek Bidang Kesiswaan).	1. Elianu (Orang Tua Siswa) 2. Hariyono (Wakil Ketua BPIP) 3. Andre Rosiade (Anggota DPR RI asal Sumbar).
3.	"4 Pernyataan Tegas Nadiem Soal Siswi Non Muslim diminta Jilbaban."	1. Rusmadi (Kepsek SMKN 2 Padang).	1. Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) 2. Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR).
4.	"Mencuat Urusan Jilbab Siswi Nonmuslim Bikin Kepsek Siap Dipecat."	1. Rusmadi (Kepsek SMKN 2 Padang) 2. Siswi Non Muslim : Elisabeth Angelia Zega, Yulita Harefa, Eka Maria Putri Waruwu.	1. Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).

Tabel diatas menunjukkan bahwa Detik.com lebih banyak menampilkan sumber berita dari “Jakarta” dan jika diklasifikasikan dari sisi keberpihakan, lebih banyak sumber berita dalam sudut pandang yang kontra (tidak setuju) atau memberikan penilaian negatif terhadap kasus yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini. Ini berarti, dengan memberikan porsi yang besar kepada narasumber tersebut, Detik.com secara tidak langsung telah menggiring dan polemik jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini, telah di defenisikan versi mereka. Berita yang dikemas sesuai dengan sudut pandang tokoh-tokoh “Jakarta”.

**Tabel 5. 11 Sumber Berita Republika Online**

No.	Judul	Sumber Berita	
		Pro	Kontra
1.	“Kepala SMKN 2 Padang yang Siap Dipecat Usai Respons Nadiem”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rusmadi (Kepsek SMKN 2 Padang)</li> <li>2. Mendrofa (Kuasa Hukum Elianu)</li> <li>3. Gusrizal Gazahar (Ketua MUI Sumbar).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)</li> <li>2. Elianu (Orang Tua Siswa).</li> </ol>
2.	“MUI Respons Polemik Aturan Jilbab”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buya Anwar Abbas (Wakil Ketua Umum MUI)</li> <li>2. Rusmadi (Kepsek SMKN 2 Padang)</li> <li>3. Fauzi Bahar (Wali Kota Padang periode 2004-2014).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elianu (Orang Tua Siswa).</li> </ol>
3.	“Opini Siswi Non-Muslim SMKN 2 Kenakan Jilbab di Sekolah”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswi non-Muslim : Eka Maria Putri Waruhu, Elisabeth Angelia Zega, Yulita Hareva &amp; Yulia Hia</li> <li>2. Rusmadi (Kepsek SMKN 2 Padang)</li> <li>3. Fauzi Bahar (Mantan Walikota Padang Periode 2004-2014).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elianu (Orang Tua Siswa).</li> </ol>
4.	“MUI: Sudahi Polemik Jilbab di Sekolah”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amirsyah Tambunan (Sekretaris Jenderal MUI)</li> <li>2. Prof KH Didin Hafidhuddin (Cendekiawan Muslim)</li> <li>3. Rusmadi (Kepsek SMKN 2 Padang).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elianu (Orang Tua Siswa).</li> </ol>

Sedangkan *Republika Online*, dari tabel diatas menunjukkan bahwa sumber berita yang diwawancarai lebih banyak dari tokoh agama, baik tokoh agama Sumatera Barat maupun tokoh agama di tingkat Pusat, serta pihak terkait yang berada di Sumatera Barat. Jika diklasifikasikan dari sisi keberpihakan, lebih banyak pro atau membela Sumatera Barat atau SMK Negeri 2 Padang. Artinya dalam hal ini juga terlihat jelas kemana arah keberpihakan dan perspektif pemberitaan yang dibangun oleh *Republika Online* jika dinilai dari sumber berita dan bagaimana sumber berita mempengaruhi isi berita.

b. Sumber penghasilan media

Sumber penghasilan media bisa berupa iklan, bisa juga berupa pembaca media. Dasar pemikirannya, media harus *survive* dan untuk memenuhi tuntutan tersebut, kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka.

Sumber penghasilan media sangat mempengaruhi *framing* atau berita yang disajikan oleh Detik.com. Hal ini memang berkaitan dengan pembaca dan iklan. Karena bagi Detik.com, semakin banyak *viewer* atau pembaca, maka iklan yang masuk akan semakin banyak. Makin banyak berita yang dikomentari, makin banyak pula iklan baris yang masuk. Tiap kelipatan 3 komentar selanjutnya disertai dengan iklan. Setiap iklan memiliki nominal tertentu. Artinya pembaca dalam hal ini menjadi pertimbangan bagaimana bentuk kemasan berita yang ditampilkan. Bagaimana supaya berita yang ditampilkan menarik bagi khalayak untuk dibaca, dikomentari atau bahkan dibagikan.

Sementara bagi *Republika Online*, untuk kasus ini sumber penghasilan media mungkin tidak terlalu mempengaruhi karena isu dan peristiwa ini merupakan berita andalannya *Republika Online*, berkaitan dengan dunia Islam.

c. Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis

1) Pemerintah

Kontrol pemerintah pada Detik.com memang ada sedikit berpengaruh dalam hal ini ada memang pihak-pihak yang mengingatkan agar kasus ini jangan sampai membuat gaduh sehingga menimbulkan efek yang lebih besar. Namun tidak sampai pada taraf menghentikan berita tentang kasus ini. Sementara pada *Republika Online*, tidak ada pengaruh pemerintah dalam pemberitaan kasus ini

sebab dalam hal ini *Republika Online* berseberangan dengan Pemerintah terutama Pemerintah Pusat.

## 2) Lingkungan Bisnis (Pangsa Pasar)

Lingkungan bisnis sangat mempengaruhi pemberitaan atau *framing* yang dilakukan oleh Detik.com karena berkaitan dengan pemasukan yang diterima oleh Detik.com. Sementara bagi *Republika Online*, lingkungan bisnis atau pangsa pasar juga mempengaruhi kemasan berita karena berkaitan dengan pangsa pasar atau segmentasi pembaca *Republika Online* yaitu umat Islam.

## 5. Level Ideologi

Level ideologi nampak sangat berpengaruh dalam *framing* yang dilakukan oleh *Republika* karena dalam kasus ini terlihat keberpihakan *Republika Online* terhadap Islam, sesuai dengan Ideologi *Republika* sendiri yang mengedepankan kepentingan Islam. *Republika Online* yang berusaha menjadi rumah bagi umat Islam, tidak mengherankan apabila *Republika Online* membela kepentingan-kepentingan umat Islam dan mengkritisi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang bertentangan atau merugikan umat Islam.

Sementara pada Detik.com, adanya pengaruh ideologi terlihat dari sudut pandang pemberitaan, dimana Detik.com melihat kasus ini dalam kacamata nasionalisme yaitu dalam hal mengutamakan keberagaman dan bukan berbasiskan agama tertentu. Akan tetapi faktor kepentingan ekonomi menjadi pertimbangan utama karena terkait dengan *viewer* dan pemasukan yang diterima media.

Jadi, dari analisis level yang mempengaruhi isi media diatas berdasarkan Teori Hierarki Pengaruh Isi Media Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, dapat disimpulkan bahwa level ekstra media yaitu sumber penghasilan media dan pangsa pasar merupakan level yang paling mempengaruhi *framing* Detik.com, dimana motif dibalik *framing* lebih banyak kepada motif ekonomi. Sedangkan level ideologi merupakan yang paling mempengaruhi *framing* *Republika Online* dalam pemberitaan tentang polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang ini.

Adanya pengaruh ideologi dalam pemberitaan yang disajikan oleh *Republika Online* dalam isu yang berkaitan dengan agama, sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Regia Fiorentina, Mayasari dan Fajar Hariyanto (2018). Penelitian tersebut menyatakan bahwa ideologi yang dipegang

oleh Republika.co.id mempengaruhi pbingkaian (*framing*) dalam kasus peristiwa Reuni Akbar 212, isu yang juga berkaitan dengan keagamaan. Namun yang menjadi titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut dan penelitian-penelitian *framing* yang meneliti isu-isu yang berbau keagamaan lainnya, terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan membandingkan *framing* Republika dengan Kompas, yakni media yang sama-sama mempunyai latar belakang ideologi agama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencoba membandingkan *framing* Republika Online dan Detik.com dalam rangka membongkar dan mengetahui ideologi yang dianut Detik.com serta level yang paling mempengaruhi isi berita Detik.com, termasuk pada isu yang diteliti ini.

#### **5.2.4 Media dan Isu Keagamaan**

Kasus atau polemik jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang, jika diklasifikasikan, isunya termasuk ke dalam isu keagamaan karena berkaitan dengan Jilbab yang merupakan atribut atau pakaian wanita Muslimah. Isu keagamaan, terutama yang berkaitan dengan konflik, skandal, polemik ataupun berbau kontroversi, menjadi isu yang ‘seksi’ bagi media untuk diberitakan. Peristiwa ini termasuk berita yang kontroversial karena menimbulkan pro dan kontra serta hampir semua media nasional berlomba-lomba memberitakan kasus tersebut dengan menampilkan tanggapan berbagai berbagai tokoh baik pusat maupun daerah dengan sudut pandang dan argumennya masing-masing.

Jika ditinjau dari segi nilai berita, termasuk ke dalam kategori berita yang bernilai tinggi. Isu ini menarik minat banyak orang untuk dibaca (*human interest*) karena peristiwanya tidak lazim (*unusualness*) dan mengandung unsur konflik sehingga media memberikan cukup ruang pemberitaan secara aktual (*timeliness*). Isu yang berbau keagamaan bisa diibaratkan sebagai magnet yang mengundang banyak pembaca. Apalagi polemik yang terjadi di SMK 2 Padang ini dikaitkan dengan isu kedaerahan (Sumatera Barat) dan minoritas, sehingga bisa membangkitkan sentimen kedaerahan dan keagamaan. Agama menyangkut nilai-nilai yang dianut dan diyakini masyarakat, sehingga secara emosional dan geografis, peristiwa ini sangat dekat dengan keseharian masyarakat (*proximity*).

Media cenderung digerakkan oleh semangat bisnis, supaya laku dibaca. Kecenderungan perusahaan media dalam mengutamakan keuntungan ekonomi mendorong para awak media, jurnalis atau redaktur menempatkan isu agama sebagai komoditi. Isu-isu sosial-politik yang dikemas dalam paket agama mendapat perhatian masyarakat secara luas dan memberikan efek ketegangan. Agama bagi media massa adalah isu strategis yang menjadi instrumen untuk memobilisasi pembaca.

Pembingkaiian (*framing*) isu-isu keagamaan oleh media kerap berbeda satu sama lainnya. Isu yang sama bisa dibingkai berbeda oleh media. Hal tidak lepas dari perspektif yang ingin dibangun media dalam sebuah berita. Sebagaimana pemberitaan polemik Jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini, dimana Detik.com dan Republika *Online* membingkainya secara berbeda. Detik.com membingkai pemberitaan polemik kasus Jilbab di SMKN 2 Padang, dengan *frame* intoleran, sebagai bentuk pemaksaan pemakaian Jilbab bagi siswi non muslim, tidak pancasilais dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara Republika *Online*, memberikan *framing* salah interpretasi, miskomunikasi, bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, tidak ada unsur paksaan dan isu jilbab di SMKN 2 Padang dibesar-besarkan.

Pembingkaiian atau posisi yang diambil media terhadap sebuah isu, tergantung atau dipengaruhi oleh level intra media dan ekstra media. Proses pembingkaiian dalam instansi media melibatkan faktor individual pekerja media, media rutin dan organisasi media. Sementara pada level extra media ada pengaruh yang terdapat dari sumber berita, sumber penghasilan media, pangsa pasar dan tentunya pemerintah, dimana semuanya itu berpedoman kepada nilai serta ideologi yang dianut oleh media tersebut. Faktor ideologi menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap pembingkaiian Republika *Online* dalam pemberitaan polemik jilbab SMK Negeri 2 Padang. Sementara motif ekonomi (sumber penghasilan media) merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pengemasan dan pembingkaiian oleh Detik.com, karena berkaitan dengan pembaca dan iklan.

Bagi Detik.com, semakin banyak *viewer* atau pembaca, maka iklan yang masuk akan semakin banyak. Makin banyak berita yang dikomentari, makin banyak pula iklan baris yang masuk. Setiap iklan memiliki standar harga tertentu.

Artinya pembaca dalam hal ini menjadi pertimbangan bagaimana bentuk kemasan berita yang ditampilkan. Bagaimana supaya berita yang ditampilkan menarik bagi khalayak untuk dibaca, dikomentari atau bahkan dibagikan. Ini tidak bisa dilepaskan dari strategi *clickbait* sebagai strategi penggunaan judul artikel yang digunakan oleh media-media *online* untuk menarik minat pembaca dengan mengusik rasa penasaran yang timbul akibat adanya kesenjangan informasi antara apa yang pembaca ketahui dan apa yang ingin pembaca ketahui. Media *online* menggunakan *clickbait* karena ada aspek ekonomi yang mereka kejar. Dengan *clickbait* pengguna media *online* akan tergoda untuk masuk dalam *web* mereka. Semakin mereka masuk dengan mengklik *page view* akan membentuk akumulasi pengunjung. Jika pengunjung yang datang ke media tersebut banyak, maka pemilik produk barang dan jasa kemungkinan akan berminat untuk beriklan di media atau *web* mereka. Tujuan utama dari penggunaan judul artikel *clickbait* adalah mengarahkan pengguna media *online* agar statistik kunjungan meningkat yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh pendapatan melalui iklan.

Jika dikaitkan dengan teori komodifikasi Mosco, ini berkaitan dengan komodifikasi konten dan khalayak. Komodifikasi isi atau konten merupakan proses yang dilakukan media untuk memoles atau mengemas konten media massa yang kemudian dipasarkan demi kepentingan ekonomi semata. Konten atau isi media akan dirancang sedemikian rupa menjadi suatu produk (berita) yang sangat disukai oleh publik, sehingga konten atau isi media yang muncul merupakan hasil pengemasan (*framing*) oleh media. *Framing* merupakan cara media media dalam menyajikan berita agar lebih bermakna, lebih menarik dan lebih berarti sekaligus menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perspektifnya (Sobur, 2018:162). Tidak mengherankan jika berita di media massa banyak dibumbui dengan hal-hal yang berbau sensasional dan dramatik untuk menarik perhatian khalayak (Haryono, 2019:108). Sedangkan komodifikasi khalayak berkaitan dengan *rating* yang diterima melalui konten media. *Rating* dari suatu konten media akan ditawarkan kepada pengiklan dengan khalayak sebagai tolak ukurnya. Komodifikasi khalayak adalah upaya yang dilakukan media untuk menjadikan khalayak sebagai komoditi yang bisa dijual kepada pengiklan sehingga menghasilkan keuntungan secara ekonomi (Mosco, 2009:136).

Keberadaan konstruksi agama yang berbeda ini, kemudian ditangkap secara ideologis oleh media massa sebagai instrumen untuk memobilisasi publik. Sebagaimana keberpihakan *Republika Online* dalam isu polemik Jilbab ini, sebagai media yang berideologikan Islam, *Republika Online* berpihak kepada Islam dan Sumatera Barat karena berkaitan dengan segmentasi pembaca *Republika Online* adalah komunitas muslim di tanah air. Melalui pemberitaan yang cenderung memihak salah satu konstruk pemahaman agama, media massa memposisikan diri sebagai bagian (*in group*) atau *out group* komunitas tertentu (Mayasari, 2017: 9).

Pendekatan analisis *framing* memandang wacana berita sebagai semacam arena perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dan pokok persoalan wacana. Masing-masing pihak menyajikan perspektif untuk memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan untuk mempengaruhi khalayak. Media massa dilihat sebagai forum bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Setiap pihak berusaha untuk menonjolkan basis penafsiran, klaim atau argumentasi masing-masing, berkaitan dengan persoalan yang diberitakan.

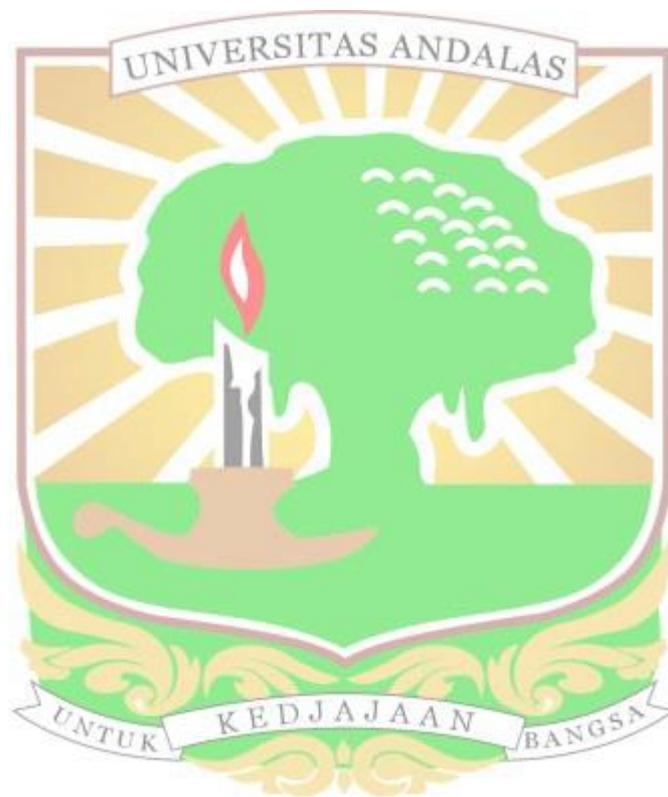
Bagi publik sendiri, media massa dianggap penting untuk menganalisis peta wacana yang sedang berlangsung di masyarakat terutama dalam isu-isu kontroversial. Ini mendorong media massa secara konsisten mengalokasikan ruang pemberitaannya untuk isu-isu agama. Tujuannya adalah menjaga tingkat keterbacaan publik yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tawar media atas pelaku ekonomi industri sebagai pusat peredaran kapital. Dengan pola hubungan produksi ini, representasi ideologis terhadap agama oleh media massa lebih didasarkan atas kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik.

Maka pemberitaan tentang isu-isu yang berbaur agama membutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, baik dalam mencari maupun ketika mengkomunikasikan atau mempublikasikannya. Isu keagamaan merupakan peristiwa sensitif yang memiliki magnet kuat dalam menyedot perhatian masyarakat yang membutuhkan kearifan wartawan dan media di dalam mengemas data dan fakta yang akan disampaikan kepada khalayak, tidak bisa sembarangan, terlebih serampangan.

Agama secara praktik kehidupan di Indonesia diatur oleh negara, termasuk dalam praktik komunikasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menekankan bahwa agama termasuk hal/isu yang harus diperhatikan secara berhati-hati ketika suatu lembaga penyiaran mengangkatnya dalam isi siarannya. Hal ini disebabkan karena sejumlah fakta menunjukkan bahwa agama termasuk hal atau isu sensitif yang dapat memicu konflik bahkan perpecahan bangsa (Ma'mun, 2009:55). Peristiwa penistaan atau penodaan agama oleh Ahok pada tahun 2016 yang lalu memberikan pelajaran bagi kita semua, karena akhirnya menyulut gerakan-gerakan muslim di tanah air (gerakan 212, dan lainnya). Maka itu bisa dipahami mengapa akhirnya isi siaran yang berbau agama harus dan terus diatur secara berhati-hati, selain tetap menjaga kebebasan informasi dan komunikasi yang secara konstitusional diatur dan dijamin oleh UUD 1945.

Tidak hanya itu, konflik agama di Indonesia juga terjadi akibat pemerintah di dalam mengeluarkan kebijakan keagamaan dan keberagaman tidak melakukan dialog secara intensif terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga produk kebijakan itu memicu kontroversi dan ketidakadilan serta kesalahpahaman informasi. Termasuk dalam peristiwa ini, dimana Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat memberikan respon dengan mengeluarkan kebijakan berupa SKB 3 (tiga menteri), padahal urusan pendidikan di tingkat SMA/SMK sederajat, secara konkuren merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sedang menurunkan Tim Investigasi untuk mengusut kasus ini, tetapi di-*tackling* oleh kebijakan Pemerintah Pusat sebelum adanya dialog dan peninjauan ke lapangan untuk melihat persoalan yang sedang terjadi. Devi Ambarsari dan Amalia Rosyadi Putri (2021) dalam penelitiannya bahkan lebih tegas mengatakan bahwa SKB 3 Menteri ini merusak pembagian wewenang antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. SKB 3 Menteri ini dapat menimbulkan konflik. Karena aturan pemakaian identitas atau atribut pada seragam sekolah cukup diatur oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat tidak perlu campur tangan (Ambarsari, 2021:34).

Pada masyarakat multi agama seperti di Indonesia, perbedaan budaya dan agama yang ada dalam masyarakat memiliki potensi konflik, bila tidak dikelola dengan baik. Maka, media massa perlu lebih bijak memberitakan isu-isu terkait keagamaan.



## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

1. Detik.com membingkai pemberitaan polemik kasus Jilbab di SMKN 2 Padang, dengan *frame* intoleran, sebagai bentuk pemaksaan pemakaian Jilbab bagi siswi non muslim, tidak pancasilais dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara Republika *Online*, memberikan *framing* salah interpretasi, miskomunikasi, bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, tidak ada unsur paksaan dan isu jilbab di SMKN 2 Padang dibesar-besarkan.
2. Level ekstra media dalam hal ini sumber penghasilan media dan pangsa pasar merupakan level yang paling berpengaruh terhadap *framing* Detik.com. Motif dibalik *framing* lebih banyak motif ekonomi. Sedangkan pada Republika *Online*, yang paling banyak mempengaruhi *framing* adalah level ideologi.

### 6.2 Saran

1. Media agar lebih hati-hati dalam membingkai berita terutama yang berkaitan dengan isu keagamaan atau berbau SARA. Sebagai negara dengan multi agama, isu ini termasuk isu sensitif yang dapat memancing emosi banyak pihak dapat melahirkan gerakan-gerakan yang membela agama. Apalagi disertai label-label tertentu yang bisa mendiskreditkan daerah atau agama tertentu. Media seharusnya mempertimbangkan efek dari *framing* atau pemberitaan, tidak hanya mengeruk keuntungan atau motif ekonomi semata.
2. Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terutama dalam merespon sebuah peristiwa yang berbau Agama, sebaiknya mengedepankan dialog dan berdasarkan hasil pemantauan atau investigasi ke lapangan untuk mengetahui akar persoalan, serta harus sesuai dengan kewenangan dan jangan sampai memicu kontroversi.
3. Bagi khalayak pembaca, agar lebih kritis dalam mengkonsumsi teks berita, apalagi yang berkaitan dengan isu agama, jangan mudah terpancing dengan pemberitaan yang dilakukan media. Karena media dalam menyajikan suatu peristiwa bukanlah bebas nilai, tetapi terdapat pembingkaiian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pembaca dalam menyikapi sebuah peristiwa

terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media seyogyanya jangan hanya menilai dari satu sudut pandang saja, akan tetapi juga mencari juga pemberitaan dalam perspektif lain guna mencari kebenaran sebuah peristiwa.

4. Penelitian yang dilakukan penulis hanya menganalisis bagaimana *framing* atau pembedaan yang dilakukan media terhadap berita polemik jilbab yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang pada periode pemberitaan 21 Januari 2021 hingga 2 Februari 2021 dan faktor yang berpengaruh terhadap *framing* yang dilakukan media. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian *framing* pada periode pemberitaan pasca dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil nomor perkara 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Dari tema, peristiwa atau penelitian ini, juga dapat dikembangkan kepada penelitian-penelitian lain seperti apakah terdapat pengaruh gencarnya pemberitaan media terhadap kasus ini dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri ?. Selain itu, dari sisi *Public Relation*, bisa dilihat bagaimana manajemen isu pihak terkait di Sumatera Barat dalam mengatasi isu negatif yang diarahkan kepada Sumatera Barat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ardianto, Elvinaro dkk. (2014). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. (2005). *Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE Publication, Inc.
- Effendy, Onong Uchjana. (2017). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan politik Media*. Yogyakarta : LKiS Printing Cemerlang.
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Halik, Abdul. (2013). *Komunikasi Massa*. Makassar: AU Press.
- Ishwara, Luwi. (2005). *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Karyaningsih, Ponco Dewi (2018). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta : Samudera Biru.
- Krisyanto, Rachmat. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana.
- Moenawar, Ghozali,dkk. (2017). *Media Komunikasi Diskursus Profetik, Agama dan Pembangunan*. Jakarta : UAI Press.
- Mosco, Vincent. (2019). *The Political Economy of Communication edition 2*. London : Sage Publication, Inc.
- Muslimin, Khirul.(2019). *Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, Features Biografi, Artikel, Populer dan Editorial*. Yogyakarta: UNISNU.
- Nugroho, B., Eriyanto, Frans Suardiasis. (1999). *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta : Institut Studi Arus Informasi.
- Nurudin. (2011). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Prajarto, N. (2015). *Bianglala Teori Komunikasi*. FISIPOL UGM: Yogyakarta.
- Ritzer, George. (2002). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santana, Septiawan K. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Severin, Wernner J., dan Tankard, James W. Jr. (2009). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Shoemaker, Pamela J. dan Stephen D Reese. ( 1996 ). *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*. New York: Longman Published.
- Sobur, Alex. (2018). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Suhandang, Kustiadi. (2004) *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa.

- Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta : LKiS.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sumadiria, AS Haris. (2006). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Yunus, Syarifudin. (2010). *Jurnalisme Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

### TESIS

- Handayani, Retno Sari. (2020). “Konstruksi Realitas Media: Analisis Framing Pemberitaan Metro TV dan TV One pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
- Rizki, Ikhwal. (2021). “Hierarki Pengaruh Pemberitaan Vaksin Covid-19 di Detik.com.” Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Widayanti, Fitriah. (2020). “Hierarki Pengaruh Pemberitaan Perppu Ormas di Republika Online.” Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yanas, Rifa. (2020). “Pemberitaan Calon Presiden dan Wakil Presiden Selama Kampanye Pemilu 2019 (Analisis Framing Berita Halaman Utama di Harian Padang Ekspres, Harian Umum Singgalang dan Harian Haluan)”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

### JURNAL

- Afriandi, Fadli. (2021). “Rendahnya Dukungan Terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Barat, Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 133-154.
- Ambarsari, Devi dan Putri, Amalia Rosyadi. (2021). “Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pemakaian Identitas Agama pada Seragam Sekolah di Media Online Kompas.com dan Republika.com.” *Jurnal Kopsis : Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 4 (1), 24-38.
- Anand, A. dkk. (2017). *We Used Neural Networks to Detect Clickbaits: You Won't Believe What Happened Next!* *Jurnal Advances in Informational Retrieval*. 10193, 541–547.
- Biyani, P., Tsioutsoulis, K., & Blackmer, J. (2016). Detecting Clickbaits in News Streams Using Article Informality. *Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 94–100.
- Fiorentina, Regia., Mayasari., & Hariyanto, F. (2018). “Analisis Framing Pemberitaan “Reuni Akbar 212” (Analisis Framing Model Robert N. Entman Media Online Kompas.com dengan Republika.co.id Edisi 26 November 2017-9 Desember 2017).” *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3 (2), 84-93.
- Firmansyah, Uky. (2019) “Konstruksi Berita Pemecatan Dosen Bercadar di IAIN Bukittinggi (Analisis Framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki Konstruksi antara Kedisiplinan atau Cadar pada Media Tribun, Viva dan

- Republika).” *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Al Munir*, 10 (2), 112 - 124.
- Karman. (2015). “Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L, Berger.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunifikasi dan Informatika*, 5 (3), 11-23.
- Kencana, Woro Harkandi. 2014. “Konvergensi Media (Analisis Institusional Komunikasi Bisnis Pada Transmedia Group).” *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi (GELANGGANG)*, 1 (1), 1-15.
- Launa. (2020). “Analisis Framing Berita Model Robert Entman terkait Citra Prabowo Subianto di [Republika.co.id](http://Republika.co.id).” *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 3 (1), 50-64.
- Mayasari, Silvina. (2017). “Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) : Analisis Framing Pada Surat kabar Kompas dan *Republika*”. *Jurnal Komunikasi*, VIII (2), 8-18.
- Mahpuddin. “Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil Society”. *Jurnal Academica Untad, Vol. 1, No.2*. (Palu: Jurnal Academica Universitas Tadulako, 2009).
- Hendra, Alfani. “Perspektif Kritis Ekonomi Politik Media Konglomerasi, Regulasi dan Ideologi”. *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2*. (Jakarta: Universitas Budi Luhur, 2014).
- Kencana, Woro Harkandi. “Konvergensi Media (Analisis Institusional Komunikasi Bisnis Pada Transmedia Group)”. *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi (GELANGGANG) Vol. 1 No. 1*. (Jakarta: Universitas Persada Indonesia Y.A.I, 2014).

## PERATURAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021 dan 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan pakaian Seagam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

## WEBSITE

- Detik.com. (16 Oktober 2018). *Jokowi Bangun Infrastruktur Prioritas di Sumbar, Ini Daftarnya*. Diakses 21 April 2022 dari <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4259032/jokowi-bangun-infrastruktur-prioritas-di-sumbar-ini-daftarnya>
- Detik.com. (23 Januari 2021). *Maaf Kepsek Usai Geger Siswi Nonmuslim di Padang Diminta Berjilbab*. detiknews. Diakses 12 Juni 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-5346091/maaf-kepsek-usai-geger-siswi-nonmuslim-di-padang-diminta-berjilbab>
- Detik.com. (24 Januari 2021). *Aturan Intoleran di Sekolah: Ketua OSIS Islam-Siswi Nonmuslim Berjilbab*. detiknews. Diakses 12 Juni 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-5346232/aturan-intoleran-di-sekolah-ketua-osis-islam-siswi-nonmuslim-berjilbab>

- Detik.com. (25 Januari 2021). *4 Pernyataan Tegas Nadiem soal Siswi Nonmuslim Diminta Jilbaban*. detiknews. Diakses 12 Juni 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-5347007/4-pernyataan-tegas-nadiem-soal-siswi-nonmuslim-diminta-jilbaban>
- Detik.com. (25 Januari 2021). *Mencuat Urusan Jilbab Siswi Nonmuslim Bikin Kepsek Siap Dipecat*. detiknews. Diakses 12 Juni 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-5348398/mencuat-urusan-jilbab-siswi-nonmuslim-bikin-kepsek-siap-dipecat>
- Jawapos.com. (25 Januari 2021). *Banyak Kasus Intoleransi, P2G : Mendikbud Hanya Tanggapi yang Viral*. Diakses 30 Juni 2022 dari <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/25/01/2021/banyak-kasus-intoleransi-p2g-mendikbud-hanya-tanggapi-yang-viral/>
- Kompas.com. (6 Agustus 2016). *Presiden Jokowi Laksanakan Shalat Id di Masjid Raya Sumbar*. Diakses 21 April 2022 dari <https://regional.kompas.com/read/2016/07/06/09511291/presiden.jokowi.laksanakan.shalat.id.di.masjid.raya.sumbar>
- Liputan 6.com. (17 Agustus 2018). *Bak Pengantin, Cantiknya Iriana Jokowi Pakai Baju Adat Minangkabau*. Diakses 21 April 2022 dari <https://www.liputan6.com/fashion-beauty/read/3621343/bak-pengantin-cantiknya-iriana-jokowi-pakai-baju-adat-minangkabau>
- Republika Online. (25 Januari 2021). *Kepala SMKN 2 Padang yang Siap Dipecat Usai Respons Nadiem*. Diakses 15 Juni 2021 dari <https://republika.co.id/share/qnh760409>
- Republika Online. (25 Januari 2021). *MUI Respons Polemik Aturan Jilbab*. Diakses 15 Juni 2021 dari <https://republika.id/posts/13634/mui-respons-polemik-aturan-jilbab>
- Republika Online. (26 Januari 2021). *Opini Siswi Non-Muslim SMKN 2 Kenakan Jilbab di Sekolah*. Diakses 15 Juni 2021 dari <https://republika.co.id/share/qnj72i409>
- Republika Online. (26 Januari 2021). *MUI: Sudahi Polemik Jilbab di Sekolah*. Diakses 15 Juni 2021 dari <https://republika.co.id/share/qniv0z6525000>
- Tagar.id (24 April 2019). *Ini yang dilakukan Jokowi untuk Sumatera Barat*. Diakses 21 April 2022 dari <https://www.tagar.id/ini-yang-dilakukan-jokowi-untuk-sumatera-barat>
- Tempo.co. (5 September 2020). *5 Hal Seputar Polemik Ucapan Puan Maharani Terkait Sumatera Barat dan Pancasila*. Diakses 20 Februari 2022 dari <https://nasional.tempo.co/read/1382947/5-hal-seputar-polemik-ucapan-puan-maharani-terkait-sumatera-barat-dan-pancasila>

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Detik.com

Berita 1 :

Round-Up

# Maaf Kepsek Usai Geger Siswi Nonmuslim di Padang Diminta Berjilbab

Hestiana Dharmastuti - detikNews

Sabtu, 23 Jan 2021 21:01 WIB

240 komentar

BAGIKAN



Ilustrasi (Foto: iStock)

**Jakarta** - Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi memohon maaf setelah viral video adu argumen antara orang tua siswi nonmuslim dan pihak sekolah, yang diminta memakai kerudung atau jilbab. Siswi nonmuslim kini diperbolehkan sekolah tanpa jilbab.

Kasus ini berawal kala sebuah video viral di sosial media, yang memperlihatkan percakapan antara Elianu Hia dengan pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang.

Elianu Hia orang tua salah satu siswi dipanggil menghadap pihak sekolah karena anaknya tak mengenakan jilbab sebagaimana diwajibkan dalam peraturan sekolah. Elianu dan anaknya Jeni Hia menolak mengenakan jilbab karena bukan kaum muslim.

Karena menolak menggunakan jilbab, Jeni menandatangani surat pernyataan, yang juga ikut ditandatangani Elianu. Surat itu berisi dua hal, yakni tidak bersedia memakai kerudung seperti yang telah digariskan oleh peraturan sekolah, dan bersedia melanjutkan masalah ini dan menunggu keputusan dari pejabat yang lebih berwenang.

### Baca juga:

**SMK 2 Padang Klaim Siswi Nonmuslim Nyaman Pakai Hijab**

Video Elianu viral di media sosial. Video itu direkam pada Kamis (21/1/2021), yang memperlihatkan adu argumen Elianu dengan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang Zakri Zaini. Elianu dipanggil pihak sekolah, karena anaknya, Jeni Cahyani Hia, tidak mengenakan jilbab. Jeni tercatat sebagai siswi kelas X pada jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP) di sekolah itu. Ia tidak mengenakan jilbab karena bukan muslim.

Dalam video tersebut, Elianu berusaha menjelaskan bahwa anaknya adalah nonmuslim, sehingga cukup terganggu dengan keharusan mengenakan jilbab.

"Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa untuk ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan (sekolah) negeri," kata Elianu mencoba berpendapat.

Zakri Zaini, yang menerima kehadiran Elianu, menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah. "Menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah kalau ada anak yang tidak ikut peraturan sekolah. Kan di awal kita sudah sepakat," katanya dalam video tersebut.

Sontak kasus ini menyedot perhatian sejumlah kalangan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai aturan Kepala SMKN 2 Padang tidak Pancasilais.

"Yang jelas, aturan kepala sekolah di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan harus segera dicabut," kata Wakil Ketua BPIP, Hariyono, kepada detikcom, Jumat (22/1/2021).

Hariyono menjelaskan tugas pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak memiliki kesadaran sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus tertanam sejak dini lewat pendidikan. Pancasila menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan masyarakat yang inklusif (terbuka, tidak eksklusif untuk golongan tertentu).

Dia menyoroti kedudukan Kepala SMKN 2 Padang sebagai aparatur sipil negara (ASN). Kepala sekolah harus menghormati pilihan agama masing-masing muridnya.

Selain itu, kritik dilontarkan anggota Dewan. Anggota DPR RI asal Sumatera Barat Andre Rosiade menyayangkan jika informasi tersebut benar.

Ketua DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini berharap ada penyelesaian agar masalah tersebut tidak menjadi bola liar yang merugikan Sumbar.

Hal senada disampaikan komisi X DPR RI yang prihatin dan menilai kejadian itu sebagai sikap intoleran.

"Kami sangat prihatin dengan fenomena maraknya sikap intoleran di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah. Banyak tenaga pendidik yang tidak tepat dalam mengajarkan semangat keberagaman di kalangan siswa," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangan yang diterima **detikcom**, Sabtu (23/1/2021).

"Kami sangat prihatin dengan fenomena maraknya sikap intoleran di lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah. Banyak tenaga pendidik yang tidak tepat dalam mengajarkan semangat keberagaman di kalangan siswa," ujar Ketua **Komisi X DPR** Syaiful Huda dalam keterangan yang diterima **detikcom**, Sabtu (23/1/2021).

Politikus PKB itu mengatakan kejadian tersebut menunjukkan adanya sikap intoleransi di sekolah-sekolah negeri. Padahal, menurutnya, tenaga kependidikan harus mengutamakan nilai Pancasila dan kebinekaan.

**Baca juga:**

**Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab, Elite PPP: Harusnya Hargai Keberagaman**

Menurut Huda, sikap pihak SMK 2 Padang tidak bisa dibenarkan meskipun setiap daerah di Indonesia memiliki otonomi daerah. Pemerintah daerah (pemda) memiliki otoritas untuk mengatur arah kebijakan sekolah, distribusi guru, hingga kebijakan anggaran, namun harus tetap mengacu pada dasar negara Indonesia.

Huda mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (**Kemendikbud**) melakukan seleksi tenaga kependidikan yang ketat. Ia berharap jangan ada kegiatan atau materi pelajaran yang mengandung unsur intoleransi.

Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan (**PDIP**) Andreas Hugo Pareira harus ada peringatan dan sanksi tegas terhadap sekolah dan guru yang melakukan pemaksaan atribut keagamaan terhadap siswi tersebut.

Menurut anggota Komisi X RI itu lembaga pendidikan tidak boleh melakukan pemaksaan kepada siswa. Termasuk pemaksaan terkait keyakinan agama tertentu.

Andreas menilai lembaga pendidikan harus memberikan ruang toleransi antar peserta didik. Ia berharap toleransi dapat menjadi prinsip bagi para peserta didik.

Sedangkan Golkar meminta setiap tenaga pendidik tidak bersikap radikal dan diskriminatif.

"Tenaga pendidik tentu saja harus menjadi contoh. Jangan bersikap radikal dan diskriminatif," kata Waketum Golkar Hetifah Sjaifudian kepada wartawan, Sabtu (23/1/2021).

Wakil Ketua Ketua Komisi X RI itu juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (**Kemendikbud**) untuk membuat proses seleksi rekrutmen guru lebih ketat.

## **Kepsek Minta Maaf**

Atas polemik itu, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi meminta maaf atas keteledoran dan kesalahan jajarannya di Bidang Kesiswaan dan Bimbingan Konseling.

"Selaku Kepala SMK Negeri 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling, dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi," kata Rusmadi dalam pertemuan dengan wartawan, Jumat (22/1/2021) malam.

Ia menyatakan, yang terlibat dalam adu argumen di video viral itu adalah Zakri Zaini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Zakri memang salah satunya menangani urusan pakaian seragam siswa-siswi SMK Negeri 2 Padang.

"Prinsipnya itu adalah proses menjelaskan aturan berpakaian. Kami tidak mewajibkan siswi nonmuslim untuk menggunakan kerudung seperti informasi yang viral di media sosial. Tidak ada paksaan," katanya.

Menurut Rusmadi, pihak sekolah tidak melakukan pemaksaan, melainkan hanya mengimbau siswa agar menggunakan kerudung atau jilbab.

Rusmadi menjelaskan, ketentuan penggunaan seragam sekolah, telah diatur untuk pakaian apa yang akan digunakan sejak Senin sampai Jumat.

"Kalau Ananda kita Jeni Cahyani Hia tidak mau menggunakan jilbab, yang bersangkutan tetap bisa sekolah seperti biasa. Sekolah memfasilitasi keinginan ananda kita itu untuk berseragam sekolah seperti yang disebutkan dalam surat pernyataannya," kata dia.

### **Baca juga:**

**MUI soal Siswi Nonmuslim di Padang Diminta Berhijab: Jangan Memaksa**

## **46 Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Kecuali Jeni**

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang Rusmadi mengungkapkan ada 46 siswi nonmuslim yang berada di sekolah tersebut. Rusmadi menyebut seluruh siswi nonmuslim di SMK tersebut mengenakan hijab dalam aktivitas sehari-hari kecuali Jeni Cahyani Hia.

"Secara keseluruhan, di SMK Negeri 2 Padang, ada 46 anak (siswi) nonmuslim, termasuk ananda Jeni. Semuanya (kecuali Jeni) mengenakan kerudung seperti seperti teman-temannya yang muslim. Senin sampai Kamis, anak-anak tetap menggunakan kerudung, walaupun nonmuslim," kata Rusmadi saat pertemuan dengan wartawan.

Belakangan terungkap, Jeni Cahyani Hia merupakan salah satu murid nonmuslim di sekolah tersebut yang menolak mengenakan hijab. Video adu argumen antara orang tua Jeni dan pihak sekolah tentang penggunaan kerudung atau jilbab viral di media sosial.

Rusmadi lantas menegaskan, pihak sekolah tak pernah melakukan paksaan apa pun terkait pakaian seragam bagi nonmuslim. Dia mengklaim siswi nonmuslim di SMK tersebut memakai hijab atas keinginan sendiri.

**Baca juga:**

**Elite Gerindra: Kasus Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab Coreng Dunia Pendidikan**

Rusmadi menekankan aturan berpakaian sudah ada sudah ada sejak lama, jauh sebelum SMA-SMK di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi.

**Kemendikbud Sebut Kebijakan soal Siswi Nonmuslim Berjilbab Tak Sesuai Aturan Pemerintah**

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto sangat menyesalkan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sebab, Permendikbud tersebut tidak mewajibkan simbol kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Selain itu, Wikan mengatakan sekolah tidak boleh membuat peraturan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian wajib di sekolah. Ia meminta Dinas Pendidikan daerah memastikan setiap sekolah mematuhi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014.

Lebih lanjut, Wikan mengatakan Dinas Pendidikan Sumbar, telah mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang bersifat diskriminatif, dan mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang tidak mematuhi peraturan. Wikan mendukung proses investigasi kasus tersebut.

Wikan juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang.

## **Disdik Sumbar Bentuk Tim Investigasi**

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri menyatakan, pihaknya sudah mengirim tim khusus ke SMK Negeri 2 Padang guna melakukan investigasi terkait viralnya video adu argumen antara orang tua siswi nonmuslim dan pihak sekolah, yang diminta memakai kerudung atau jilbab.

"Saya ingin mempertegas, bahwa tidak ada intimidasi atau paksaan sama sekali di sekolah, karena memang tidak diperbolehkan. Kami sudah turunkan tim, dan timnya masih bekerja, belum membuat hasil tertulis. Yang pasti tim akan mengambil data informasi semuanya," kata Adib kepada wartawan, Jumat (22/1/2021) malam.

Adib mengungkapkan persoalan yang muncul di SMK 2 Padang masih dalam konteks dan ranah tanggung jawab pihak kepala sekolah dan belum sampai ke kepala sekolah, apalagi Dinas Pendidikan provinsi sebagai pihak yang membawahi SMA-SMK.

Ia menyayangkan, masalah tersebut muncul di media sosial, karena seharusnya bisa dibicarakan dengan guru atau kepala sekolah secara baik-baik.

Menurutnya, persoalan pakaian atau seragam sekolah sudah selesai beberapa tahun lalu. "Aturan pakaian dan seragam sekolah itu sudah selesai sejak bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," tambah Adib.

**Baca juga:**

**[Komisi X DPR Prihatin Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab: Intoleran!](#)**

## **Komnas HAM Duga Ada Indikasi Pemaksaan**

Komnas HAM menilai ada indikasi pemaksaan dalam aspek kebebasan beragama dalam kejadian itu. "Ada indikasi pemaksaan dalam ekspresi kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan, Sabtu (23/1/2021).

Beka menilai seharusnya lembaga pendidikan negeri menghormati keberagaman dan hak asasi manusia (HAM) seperti amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1.

Namun Beka belum dapat memastikan ada unsur pelanggaran HAM karena pihak sekolah memberikan respons cepat atas kejadian itu.

Meskipun demikian, Komnas HAM tetap akan menindaklanjuti kejadian siswi nonmuslim yang diminta memakai jilbab itu. Menurutnya, kantor perwakilan Komnas HAM di Padang akan rapat bersama pihak Ombudsman Sumbar dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar terkait kejadian itu pada Senin mendatang.

**Baca juga:**

**[Golkar soal Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab: Rekrutmen Guru Harus Ketat](#)**

### **KPAI Sebut Siswi Nonmuslim Diminta Berjilbab Langgar HAM**

KPAI menilai kasus siswi nonmuslim diminta memakai jilbab merupakan pelanggaran HAM. KPAI menilai sekolah negeri seharusnya menyemai keberagaman dan menghargai perbedaan.

"KPAI prihatin dengan berbagai kasus di beberapa sekolah negeri yang terkait dengan intoleransi dan kecenderungan tidak menghargai keberagaman, sehingga berpotensi kuat melanggar hak-hak anak, seperti kasus mewajibkan semua siswi bahkan yang beragama non-Islam untuk mengenakan jilbab di sekolah, atau kasus beberapa waktu lalu dimana ada pendidik di SMAN di Depok dan DKI Jakarta yang menyerukan untuk memilih Ketua OSIS yang beragama Islam," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).

Retno menyebut sekolah negeri merupakan sekolah pemerintah yang memiliki siswa beragam dan majemuk. Karena itu sudah seharusnya sekolah negeri menerima perbedaan.

Retno menyayangkan peraturan sekolah SMKN 2 Padang yang mewajibkan seluruh siswinya mengenakan hijab. Menurutnya langkah pemaksaan itu jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) bagi siswi yang nonmuslim.

Retno mendesak agar SMKN 2 Padang diberikan sanksi sesuai Permendikbud no 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Tak hanya itu, pihak sekolah juga diduga kuat melanggar UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 39/1999 tentang HAM.

Berita 2 :

Round-Up

## Aturan Intoleran di Sekolah: Ketua OSIS Islam-Siswi Nonmuslim Berjilbab

Tim detikcom - detikNews

Minggu, 24 Jan 2021 06:40 WIB

73 komentar

BAGIKAN



Ilustrasi (Foto: iStock)

**Jakarta** - Kasus siswi nonmuslim dipaksa berjilbab menambah jumlah kasus-kasus intoleran di sekolah yang sebelumnya pernah terjadi. Sebelumnya, ada kasus mengarahkan untuk memilih calon ketua OSIS muslim di DKI Jakarta.

Kasus soal pemilihan ketua OSIS muslim, bermula dari pesan guru TS kepada murid-muridnya yang viral di media sosial. Guru TS meminta murid-murid dalam grup WA Rohis 58 memilih paslon 3 dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS karena beragama Islam.

"Assalamualaikum...hati2 memilih ketua OSIS Paslon 1 dan 2 Calon non Islam...jd ttp walau bagaimana kita mayoritas hrs punya ketua yg se Aqidah dgn kita," demikian pesan guru TS dalam tangkapan layar grup WA 'Rohis 58' yang beredar di media sosial.

"Mohon doa dan dukungannya untuk Paslon 3, Mohon doa dan dukungannya utk Paslon 3, Awas Rohis jgn ada yg jd pengkhianat ya," ucap TS dalam grup WhatsApp bernama Rohis 58.

**Baca juga:**

**Babak Baru Kasus SARA Setelah Guru SMAN 58 Jakarta Diperiksa**

Kepala SMA Negeri 58 Jakarta telah memanggil dan menegur guru yang mengajak murid-muridnya memilih ketua OSIS seagama itu. Kepsek menilai guru tersebut teledor sehingga pesannya ke murid-murid tersebar viral.

"Kejadiannya itu hari Kamis, 22 Oktober, kemudian tanggal 23 Oktober langsung saya panggil karena dapat aduan orang tua, ada di Twitter," kata Kepala SMAN 58 Dwi Arsono kepada **detikcom**, Rabu (28/10/2020).

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani angkat suara. Dia mengingatkan asas sekolah negeri adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.

"Saya juga beri imbauan untuk semua Guru, khususnya di sekolah negeri. Jangan sampai salah kaprah, sekolah Negeri itu basisnya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, bukan sekolah berbasis agama tertentu," kata Zita menanggapi kejadian itu, disampaikannya kepada wartawan, Kamis (29/10/2020).

Kemudian, soal kasus nonmuslim harus berjilbab di Padang sumbar, kejadian ini viral di media sosial. Video itu merekam perdebatan antara Elianu Hia dengan dengan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang Zakri Zaini. Video itu direkam pada Kamis (21/1/2021),

Elianu Hia adalah orang tua salah satu siswi nonmuslim. Putrinya, yang bernama Jeni Hia, bermasalah karena menolak mengenakan jilbab karena bukan muslim.

Jeni menandatangani surat pernyataan, yang juga ikut ditandatangani Elianu. Surat itu berisi dua hal, yakni tidak bersedia memakai kerudung seperti yang telah digariskan oleh peraturan sekolah, dan bersedia melanjutkan masalah ini dan menunggu keputusan dari pejabat yang lebih berwenang.

Dalam video tersebut, Elianu berusaha menjelaskan bahwa anaknya adalah nonmuslim, sehingga cukup terganggu dengan keharusan mengenakan jilbab.

"Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa untuk ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan (sekolah) negeri," kata Elianu mencoba berpendapat.



Zakri Zaini, yang menerima kehadiran Elianu, menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah. "Menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah kalau ada anak yang tidak ikut peraturan sekolah. Kan di awal kita sudah sepakat," katanya dalam video tersebut.

Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai aturan Kepala SMKN 2 Padang tidak Pancasila. "Yang jelas, aturan kepala sekolah di atas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan harus segera dicabut," kata Wakil Ketua BPIP, Hariyono, kepada detikcom, Jumat (22/1/2021).

Selain itu, kritik dilontarkan anggota Dewan. Anggota DPR RI asal Sumatera Barat Andre Rosiade menyayangkan jika informasi tersebut benar.

Ketua DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini berharap ada penyelesaian agar masalah tersebut tidak menjadi bola liar yang merugikan Sumbar.

Pihak sekolah merespons resmi polemik yang telah berkembang di publik. Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi meminta maaf atas kekeledoran dan kesalahan jajarannya di Bidang Kesiswaan dan Bimbingan Konseling.

"Selaku Kepala SMK Negeri 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf bidang kesiswaan dan bimbingan konseling, dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi," kata Rusmadi dalam pertemuan dengan wartawan, Jumat (22/1/2021) malam.

Ia menyatakan, yang terlibat dalam adu argumen di video viral itu adalah Zakri Zaini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Zakri memang salah satunya menangani urusan pakaian seragam siswa-siswi SMK Negeri 2 Padang.

"Prinsipnya itu adalah proses menjelaskan aturan berpakaian. Kami tidak mewajibkan siswi nonmuslim untuk menggunakan kerudung seperti informasi yang viral di media sosial. Tidak ada paksaan," katanya.

Berita 3 :

Round-Up

## 4 Pernyataan Tegas Nadiem soal Siswi Nonmuslim Diminta Jilbaban

Tim detikcom - detikNews

Senin, 25 Jan 2021 05:27 WIB

67 komentar

BAGIKAN



Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI

**Padang** - Kasus siswi SMK Negeri 2 Padang nonmuslim yang diminta berjilbab sampai ke telinga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nadiem mengecam peristiwa yang disebutnya intoleran ini.

Kasus ini menjadi viral setelah Elianu Hia orang tua sang siswi, mengunggah tayangan live di akun Facebook-nya pada Kamis (21/1). Video itu memperlihatkan adu argumen antara Elianu dan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang, Zakri Zaini.

Elianu dipanggil pihak sekolah, karena anaknya, Jeni Cahyani Hia, tidak mengenakan jilbab. Jeni tercatat sebagai siswi Kelas X pada Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP) di sekolah itu. Dia tidak mengenakan jilbab karena bukan muslim.

**Baca juga:**

**Aturan Berhijab di Sekolah, Kadisdik Sumbar: Perlu Ada Revisi**

Di video itu, Elianu berusaha menjelaskan kalau anaknya nonmuslim sehingga cukup terganggu dengan keharusan mengenakan jilbab. Pihak sekolah yang menerima kehadiran Elianu, menyebut penggunaan jilbab merupakan aturan sekolah.

Sontak polemik siswi nonmuslim diminta berjilbab ini viral dan menjadi perhatian nasional. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyebut kasus ini merupakan bentuk intoleransi.

Pada akhirnya Kepala SMKN 2 Padang Rusmadi meminta maaf terkait kisruh siswi nonmuslim diminta berjilbab tersebut. Dia beranggapan selama ini pihaknya tidak pernah memaksa seluruh siswi di SMK tersebut mengenakan hijab.

"Secara keseluruhan, di SMK Negeri 2 Padang, ada 46 anak (siswi) nonmuslim, termasuk Ananda Jeni. Semuanya (kecuali Jeni) mengenakan kerudung seperti teman-temannya yang muslim. Senin sampai Kamis, anak-anak tetap menggunakan kerudung walaupun nonmuslim," kata Rusmadi saat pertemuan dengan wartawan.

"Tidak ada memaksa anak-anak. (Di luar aturan sekolah), memakai pakaian seperti itu adalah juga keinginan anak-anak itu sendiri. Kami pernah menanyakan, nyaman nggak memakainya.

Anak-anak menjawab nyaman, karena semuanya memakai pakaian yang sama di sekolah ini, tidak ada yang berbeda. Bahkan, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (Islam) yang kami adakan, anak-anak nonmuslim juga datang, walaupun sudah kami dispensasi untuk tidak datang. Artinya, nyaman anak-anak selama ini," lanjut Rusmadi.

Nadiem Makarim pun merespons kejadian ini. Berikut pernyataan-pernyataan tegas Nadiem soal siswi nonmuslim diminta berjilbab:

### **1. Bentuk intoleransi**

Nadiem menyebut kasus siswi nonmuslim di Padang diminta berjilbab merupakan bentuk intoleransi. Mantan CEO Gojek itu menilai aturan siswi nonmuslim memakai jilbab itu melanggar undang-undang (UU).

"Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman, sehingga bukan saja melanggar peraturan UU, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan," tegas Nadiem dalam video di Instagram, Minggu (24/1).

Nadiem menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah di Padang yang membuat aturan siswi nonmuslim harus berhijab. Dia mengapresiasi gerak cepat pemda setempat dalam menangani kasus tersebut.

### **2. Minta pemda sanksi pihak terkait**

Nadiem meminta pemerintah daerah (pemda) setempat memberikan sanksi tegas ke para pihak yang terlibat di kasus siswi nonmuslim diminta berjilbab.

"Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya," ucap Nadiem.

### **3. Aturan seragam harus hormati keyakinan murid sekolah**

Nadiem menekankan aturan seragam sekolah harus tetap menghormati siswa dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Peserta didik.

"Pasal 3 ayat 4 Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing," papar Nadiem.

"Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik," imbuhnya.

### **4. Siapkan hotline pengaduan**

Sebagai bentuk tanggapan terkait adanya kasus siswi nonmuslim yang diminta berjilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, Kemendikbud akan menyiapkan hotline aduan. Gunanya yakni mencegah kasus serupa terulang.

"Kami di Kemendikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktik-praktik intoleransi di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran segera mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa," sebut Nadiem.

**(gbr/isa)**

Berita 4 :

Round-Up

## Mencuat Urusan Jilbab Siswi Nonmuslim Bikin Kepsek Siap Dipecat

Hestiana Dharmastuti - detikNews

Senin, 25 Jan 2021 22:02 WIB

43 komentar

BAGIKAN



Kepala SMK Negeri 2 Padang, Rusmadi (Jeka Kampai/detikcom)

**Jakarta** - Aturan SMK Negeri 2 Padang yang meminta siswi nonmuslim berjilbab menuai polemik berkepanjangan. Kepala Sekolah Rusmadi

**Jakarta** - Aturan SMK Negeri 2 Padang yang meminta siswi nonmuslim berjilbab menuai polemik berkepanjangan. Kepala Sekolah Rusmadi bahkan rela melepas jabatan demi mempertanggungjawabkan masalah itu.

Kasus heboh ini bermula kala Elianu Hia mengunggah tayangan *live* di akun Facebook-nya pada Kamis (21/1/2021). Video itu memperlihatkan adu argumen antara Elianu dan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang, Zakri Zaini.

Elianu mengaku dipanggil pihak sekolah karena anaknya tidak mengenakan jilbab. Putrinya tidak mengenakan jilbab karena bukan muslim.

**Baca juga:**

**Kepala SMKN 2 Padang Siap Dipecat Gegara Polemik Nonmuslim Berjilbab**

Video tersebut viral dan menjadi polemik. Mendikbud Nadiem Makarim menilai aturan tersebut intoleran dan meminta agar pihak yang terlibat ditindak tegas.

"Saya meminta pemerintah daerah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya," ucap Nadiem.

### **Kepsek Siap Dipecat**

Atas polemik ini, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi meminta maaf atas keteledoran dan kesalahan jajarannya di Bidang Kesiswaan dan Bimbingan Konseling. Rusmadi mengaku siap bertanggung jawab dan dipecat gegara polemik tersebut.

"Saya siap dipecat kalau kami salah, tapi lihat ke lapangan dulu, apa yang (sebenarnya) kami lakukan," kata Rusmadi kepada wartawan di Padang, Senin (25/1/2021).

Dia mengaku tak pernah ada aturan yang menyatakan siswi nonmuslim wajib menggunakan jilbab ke sekolah. Dia menyebut pihak sekolah tak pernah memaksa siswi nonmuslim menggunakan jilbab ke sekolah.

Rusmadi kemudian memperlihatkan aturan yang dibuat dan diperbarui setiap tahun. Ketertiban dan penampilan pakaian diatur dalam pasal 3.

Dalam aturan itu, pakaian muslim disebut hanya untuk hari Jumat. Aturan itu menyebut pakaian muslim lengkap, celana panjang atau rok abu-abu model standar SMK Negeri 2 Padang, sepatu kulit hitam dan kaus kaki putih sampai betis, serta ikat pinggang standar kulit hitam.

Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga sudah mengirim tim khusus ke SMK Negeri 2 Padang guna melakukan investigasi viralnya video adu argumen antara orang tua siswi nonmuslim dan pihak sekolah. Pihak Disdik Sumbar juga menyebut tak ada intimidasi di sekolah.

### **Cerita Siswi Nonmuslim Berjilbab di Sekolah**

Sejumlah siswi nonmuslim pun menceritakan mereka memilih menggunakan jilbab meski sebenarnya tak pernah ada paksaan agar mereka berkerudung ke sekolah.

Salah satu siswi, Elisabeth Angelia Zega, bercerita bahwa dia telah memakai kerudung untuk pergi ke sekolah sejak duduk di bangku SMP. Dia mengaku pihak sekolah tak pernah memaksanya yang nonmuslim untuk berjilbab.

"Tidak ada unsur paksaan. Dan saya juga sudah dari SMP memakai jilbab ini," kata Elisabeth Angelia Zega di SMKN 2 Padang, Senin (25/1/2021).

Dia mengaku tak keberatan dan merasa tidak dirugikan dengan mengenakan pakaian yang membuat dirinya seperti siswi beragama Islam. Menurutnya, masalah keimanannya tak terganggu gara-gara menggunakan pakaian seperti siswi beragama Islam.

"Walau di sekolah pakaian saya seperti ini (pakai jilbab), iman saya tetap percaya Tuhan Yesus. Tak ada tekanan batin kalau pakaian pakai jilbab," kata Angel.

Siswi lainnya, Yulita Harefa, juga menyebut tak masalah menggunakan jilbab meski bukan pemeluk agama Islam. Dia mengaku sudah sejak SMP menggunakan jilbab saat sekolah

Siswi yang duduk di Kelas XII SMKN 2 Padang itu mengaku sempat merasa canggung saat awal-awal menggunakan jilbab di bangku SMP. Dia mengaku belajar memakai jilbab dari kakaknya yang juga menggunakan jilbab saat ke sekolah.

Siswi lainnya, Eka Maria Putri Waruwu, mengatakan jilbab yang dipakainya ke sekolah merupakan bagian dari seragam sekolah. Dia mengatakan tak ada pengaruh penggunaan jilbab dengan keimanannya sebagai Kristen.

Eka mengaku sudah menggunakan jilbab sejak duduk di kelas IV SD. Dia mengaku bisa saja ke sekolah tanpa memakai jilbab karena tak ada kewajiban bagi siswi nonmuslim untuk menggunakan jilbab ke sekolah.

Sebagai informasi, para siswi tersebut datang ke sekolah karena SMKN 2 Padang sudah mulai menerapkan belajar tatap muka di tengah pandemi. Jumlah murid yang hadir ke sekolah dibatasi dan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan ketat selama di sekolah.

**(aan/idn)**

Berita 1:



## Kepala SMKN 2 Padang yang Siap Dipecat Usai Respons Nadiem

Senin 25 Jan 2021 12:56 WIB

Red: Andri Saubani



Terkait kasus di SMKN 2 Padang, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan, pemerintah tidak akan memaklumi guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam hal intoleransi. Ia meminta agar pemerintah daerah memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin tersebut bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Termasuk, kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan.

Kemendikbud dalam waktu dekat juga akan mengeluarkan Surat Edaran dan membuka *hotline* khusus pengaduan terkait intoleransi. Nadiem mengatakan, hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.

Peristiwa yang terjadi di SMKN 2 Padang, menurut, Nadiem tidak sesuai dengan sejumlah peraturan yang berlaku. Ia menyebutkan Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

---

Pada Pasal 4 Ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Selain itu, pada Pasal 3 Ayat 4 Permendikbud 45 Tahun 2014 tentang seragam sekolah bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah juga dikatakan hal serupa. Permendikbud tersebut mengatakan, pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

"Maka, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik," kata Nadiem.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar menilai, isu aturan jilbab di SMKN 2 Padang seperti *di-framing* dan *dibesar-besarkan*.

"*Kenapa (seperti) framing, kan sudah ada tokoh-tokoh di Jakarta yang begitu gampang menuduh ini antikehinekaan, ini intoleran, apakah mereka sudah mendengarkan kronologinya (yang terjadi di SMKN 2 Padang),*" kata Buya Gusrizal kepada **Republika**, Ahad (24/1).

Terkait komentar sejumlah pihak di Jakarta mengenai polemik aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang, Buya Gusrizal mengingatkan, pejabat-pejabat di Jakarta jikalau memang hidup berbangsa dan bernegara, tolong sebelum berbicara sebaiknya pertimbangkan dulu dengan matang. Sebelum mengambil kesimpulan tertentu, pertimbangkan dan cari tahu dulu kebenarannya.

"Saya telah konfirmasi ke pihak pemerintah daerah apa yang sebenarnya terjadi (di SMKN 2 Padang)," ujarnya.

Buya Gusrizal kecewa terhadap orang yang berkomentar ada pemaksaan pakai jilbab terhadap siswi non-Muslim di Padang. Ia mempertanyakan di mana unsur pemaksaan itu dan dari mana muncul istilah pemaksaan itu.

"Coba buktikan oleh orang yang menuduh ini pemaksaan. Jadi saya melihat ini bukan hanya perkara SMK itu saja, ini ada masalah lain yang ditujukan ke Sumatera Barat," jelasnya.

Berita 2 :



Khazanah

25 Jan 2021, 10:07 WIB

## MUI Respons Polemik Aturan Jilbab

**Pengecualian terkait aturan jilbab sebaiknya diterapkan kepada para siswi yang tidak beragama Islam.**

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat merespons persoalan mengenai aturan berbusana Islami di Kota Padang, Sumatra Barat. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah daerah setempat yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi Muslimah. Ia mengatakan, beleid itu merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.

“Karena, filosofi orang Minang itu ‘*adat basandi syara, syara’ basandi Kitabullah.*’ Jadi, bagi orang Minang, agama itu harus hidup, tumbuh, dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam kehidupan keseharian,” ujar dia saat dihubungi *Republika*, Ahad (24/1).

Akan tetapi, Buya Anwar menambahkan, pengecualian terkait aturan itu sebaiknya diterapkan kepada para siswi yang tidak beragama Islam. Dengan tidak adanya paksaan, kegaduhan yang tak perlu dapat dihindari semua pihak. Ia berharap setiap sekolah di Kota Padang dapat membuat kebijakan dari peraturan daerah tersebut.

“Menurut saya, ketentuan itu tetap saja dilaksanakan, tetapi kepada murid-murid yang tidak beragama Islam, dipersilakan memilih, apakah memakai jilbab atau tidak. Karena, kita harus mengembangkan sikap toleransi, harus bisa menerima kenyataan di mana ada perbedaan-perbedaan di antara kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Elianu Hia, salah satu orang tua murid, memprotes pihak SMK Negeri 2 Padang. Sebab, ia merasa putrinya yang berinisial JCH dipaksa untuk mengenakan pakaian berkerudung di sekolah. Protes tersebut kemudian menjadi polemik setelah disebarakan melalui akun media sosialnya.

Elianu yang merupakan non-Muslim mengaku terpaksa mendatangi sekolah tersebut karena anaknya sudah tiga kali dipanggil ke ruang guru bimbingan konseling (BK). JH diketahui tidak berpakaian seperti siswi-siswi lain yang mengenakan kerudung.

“Jadi, anak saya ini sudah tiga pekan ini dipanggil terus ke kantor BK sehingga akhirnya saya datang. Saya tanya, ini kebijakan siapa? Karena, tidak ada keputusan menteri pendidikan atau keputusan gubernur. Mereka menjawab, ini keputusan sekolah. Wajib katanya,” ujar Elianu saat ditemui wartawan di Padang, Sumatra Barat, Jumat (22/1).

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmadi mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksa siswi yang non-Muslim untuk mengenakan kerudung atau pakaian Muslimah. Ia menambahkan, selama ini mayoritas siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang memang atas kemauan mereka sendiri bersedia mengenakan seragam berkerudung. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain.

“Kami tidak pernah memaksakan siswi kami yang non-Muslim memakai kerudung. Selama ini, siswi non-Muslim yang juga anak-anak kami di lingkungan sekolah kami atas kemauan sendiri mau pakai kerudung,” kata Rusmadi di Padang, Jumat (22/1).

Sejak 2005, Pemerintah Kota Padang memberlakukan kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005. Salah satu poin instruksi tersebut adalah mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang. Nomenklatur aturan tersebut ditujukan kepada siswi yang beragama Islam saja. Namun, pada praktiknya di lapangan, siswi yang non-Muslim juga tak sedikit menggunakan jilbab.

Sejak 2005, Pemerintah Kota Padang memberlakukan kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005. Salah satu poin instruksi tersebut adalah mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang. Nomenklatur aturan tersebut ditujukan kepada siswi yang beragama Islam saja. Namun, pada praktiknya di lapangan, siswi yang non-Muslim juga tak sedikit menggunakan jilbab.

Wali Kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar mengaku heran dengan munculnya polemik terkait instruksi tersebut. "Itu sudah lama sekali (diberlakukan), *kok* baru sekarang diributkan? Kebijakan 15 tahun yang lalu itu," ujarnya, Sabtu (23/1).



Berita 3 :

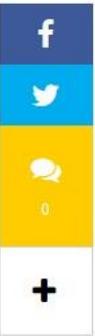
## Opini Siswi Non-Muslim SMKN 2 Kenakan Jilbab di Sekolah

Selasa 26 Jan 2021 14:49 WIB  
Red: Andri Saubani



SMK Negeri 2 Padang saat ini sedang jadi sorotan karena pro-kontra aturan siswi memakai jilbab yang kemudian viral di media sosial. (ilustrasi)

Foto: Republika/Febrian Fachri



Republika mewawancarai beberapa siswi non-Muslim SMKN 2 Padang soal aturan jilbab.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh **Febrian Fachri**

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Padang kini tengah menjadi sorotan sejak ada salah seorang siswi non-Muslim dan orang tua yang keberatan mengenakan jilbab di lingkungan sekolah. Pekan lalu, salah seorang orang tua

Protes Elianu ini menjadi viral karena ia sebarakan melalui akun sosial media Facebook miliknya. Elianu yang merupakan non-Muslim terpaksa mendatangi sekolah karena anaknya sudah tiga kali dipanggil ke ruang bimbingan konseling lantaran tidak berpakaian seperti siswi lain yang memakai kerudung.

"Jadi, anak saya ini sudah tiga minggu ini dipanggil terus ke kantor BK, sehingga akhirnya saya datang. Saya tanya, ini kebijakan siapa, karena tidak ada keputusan menteri pendidikan atau keputusan gubernur. Mereka menjawab, ini keputusan sekolah. Wajib katanya," kata Elianu, Jumat (22/1).

Menyusul polemik aturan jilbab itu, **Republika** mencoba mewawancarai beberapa siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang. Siswi kelas XII, Elisabeth Angelia Zega, misalnya, selama ini merasa tidak keberatan mengenakan jilbab ke sekolah. Angel merasa tidak ada kerugian dengan mengenakan pakaian yang membuat dirinya seperti siswi beragama Islam.

"Tidak ada unsur paksaan. Dan saya juga sudah dari SMP memakai jilbab," kata Angel, Senin (25/1).

Angel mengatakan, dirinya bisa saja mengusulkan kepada pihak sekolah supaya dapat memakai pakaian yang tidak memakai jilbab. Tetapi, ia tidak melakukan hal itu karena ia tidak ingin ada perbedaan mencolok dari teman-temannya yang mayoritas beragama Islam dan memakai kerudung.

Baca juga : **Kisah Tigor Mualaf, Murtad, Lalu Jadi Mualaf Lagi**

Bagi Angel, memakai pakaian rok panjang, baju kurung, dan memakai jilbab sama sekali tidak memengaruhi imannya sebagai seorang pemeluk Protestan.

"Walau di sekolah pakaian saya seperti ini (pakai jilbab) iman saya tetap percaya Tuhan Yesus. Tak ada tekanan batin kalau pakaian pakai jilbab," ujar Angel.

Selain itu, orang tua Angel juga tidak keberatan dengan pakaian berjilbab yang ia kenakan sejak sekolah di SMP 4 Padang sampai sekarang duduk di SMK 2 Padang. Angel mempersilakan adik juniornya itu berprinsip tidak mau memakai seragam yang dikenakan murid mayoritas Islam.

"Silakan saja. Karena dari awal sekolah memang tidak memaksakan." kata Angel menambahkan.

Siswi non-Muslim SMK N 2 Padang lainnya, Yulita Hareva, mengaku tidak pernah merasa rendah diri karena memakai jilbab ke sekolah. Memakai jilbab, menurut Yulita, memang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Tetapi, ia memilih memakai seragam berjilbab karena tidak ada dampak negatif terhadap dirinya.

"Sudah sejak SMP saya memakai jilbab ke sekolah, saya tidak pernah minder," kata Yulita, Senin (25/1).

Baca juga : **Newstory: Aturan Jilbab Hingga Pengakuan Siswi Non-Muslim**

Siswi jurusan akuntansi kelas XII itu sempat merasa canggung menggunakan jilbab sejak masih di bangku SMP. Karena sejak kecil ia sama sekali tidak pernah memakai jilbab.

Ketika itu, ia belajar memasang jilbab dari kakaknya. Kebetulan, kakaknya juga belajar di sekolah negeri dan memakai jilbab.

Tetapi dalam keseharian, Yulita merasa lebih nyaman tidak memakai jilbab. Karena dengan memakai jilbab, ia sering dianggap sebagai pemeluk agama Islam.

"Identitas agama saya *kan* bukan Muslim. Jadi sering dianggap orang Islam. Kalau ditanya lebih nyaman pakai jilbab atau tidak, saya lebih nyaman *enggak* pakai jilbab," ucap Yulita.

Yulita mengetahui kini sekolahnya menjadi sorotan lantaran ada salah satu adik kelasnya yang keberatan memakai jilbab. Menurut dia, sikap juniornya itu tidak salah. Ia mempersilakan bila ada siswi non-Muslim yang ingin berpakaian yang mencirikan identitas agama yang ia peluk.

Adapun, siswi Eka Maria Putri Waruhu mengatakan memakai jilbab di sekolah tidak mengganggu prinsipnya sebagai pemeluk agama Nasrani. Menurut Eka, memakai seragam rok panjang, baju kurung dan jilbab hanya atribut sebagai pelajar.

"Pakaian seperti ini (pakai jilbab) hanya atribut saja *kok*. Identitas saya sebagai pelajar SMK 2. Tidak kaitan dengan masalah iman," kata Eka, Senin (25/1).

Eka sudah terbiasa ke sekolah dengan seragam berjilbab. Ia sudah menjalani hal itu sejak duduk di bangku kelas IV SD.

Tapi bila ditanya masalah kenyamanan, Eka akan merasa lebih nyaman bila tidak memakai jilbab. Sebenarnya, ia bisa saja datang ke sekolah dengan seragam tanpa menggunakan jilbab. Karena menurut Eka, sekolah tidak mewajibkan siswi non-muslim harus memakai jilbab. Tapi ia memilih memakai seragam berjilbab supaya tidak berbeda dengan teman-temannya yang lain.

"Kalau misal saya datang ke sekolah tidak pakai jilbab, saya juga akan berusaha rapi. Karena aturan sekolah kan harus berpakaian rapi," ujar Eka.

Sementara, siswi non-Muslim bernama Yulia Hia mengatakan, dirinya selalu mengenakan seragam berjilbab karena ingin menyesuaikan dengan teman-temannya yang lain. Yulia mengaku tidak risih karena sama sekali tidak mempengaruhi agama dan kepercayaan yang ia yakini.

"Terpaksa memakai jilbab *sih enggak*. Saya hanya ingin menyesuaikan," kata Yulia, Senin (25/1).

Karena selalu memakai jilbab di sekolah bahkan sudah sejak SD, banyak orang beranggapan Yulia sebagai seorang muslimah. Terkadang, terbersit keinginan dari siswi jurusan Otomatisasi Tata Kelola Pemerintah kelas XII ini untuk tidak lagi memakai jilbab ke sekolah. Karena terkadang ia ingin mengenakan pakaian yang membuat identitasnya sebagai seorang Nasrani terlihat oleh khalayak umum.

"Kalau keinginan, ya *enggak* usah pakai jilbab. Karena orang taunya kami ini Muslim. Padahal kami Kristen," ucap Yulia.

Selama menjalani masa pendidikan sejak SD sampai SMK, Yulia selalu mengenakan pakaian berjilbab. Karena merasa sudah terbiasa, diri pribadi dan keluarga Yulia tidak pernah lagi mempermasalahkannya. Terlebih sekarang karena sudah remaja beranjak dewasa, keluarga memberi ruang baginya untuk menentukan sikap.

**Republika** mendapatkan berkas tata tertib (tatib) siswa dan sanksi pelanggaran SMK N 2 Padang. Dalam *file* tatib ini aturan berpakaian tertera di dalam Bab III Pasal 5 yang terdiri dari 6 ayat.

Pasal lima berisikan tentang ketertiban dan penampilan pakaian seragam harian. Ayat a mengatur pakaian untuk Senin dan Kamis yaitu harus memakai kemeja putih lengan panjang lengkap dengan jas. Celana panjang/rok abu-abu model standar SMK Negeri 2 Padang. Sepatu kulit hitam dan kaos kaki putih sampai betis, kemudian ikat pinggang standar kulit hitam.

Ayat b mengatur tentang pakaian seragam pada Selasa. Yaitu kemeja batik seragam SMK Negeri 2 Padang, celana panjang/rok abu-abu model standar SMK N Padang, sepatu kulit hitam dan kaos kaki putih sampai betis dan ikat pinggang standar kulit hitam.



Ayat c mengatur tentang seragam hari Rabu. Yaitu kemeja putih lengan pendek kecuali siswi, lengkap. Celana panjang/rok abu-abu model SMK N Padang, sepatu kulit hitam dan kaos kaki putih sampai betis dan ikat pinggang standar warna hitam.

Ayat d mengatur pakaian untuk Jumat. Yaitu berpakaian muslim lengkap, celana panjang/rok abu-abu standar SMK N 2 Padang, sepatu kulit hitam dan kaos kaki putih sampai betis dan ikat pinggang standar kulit hitam.

Pada pasal 5 bab III ini juga tertera catatan pakaian praktik dipakai hanya saat pelajaran praktik laboratorium. Rambut pendek ukuran 1,2,3 sentimeter dengan penampilan sopan dan rapi.

Berkas tatib siswa dan sanksi pelanggaran SMK N 2 Padang ini ditanda tangani Kepala Sekolah Rusmadi pada 13 Mei 2020. Rusmadi mengatakan pihaknya akan segera merevisi aturan dan tata tertib berpakaian agar tidak ada celah diskriminasi.

Rusmadi mengakui selama ini aturan berpakaian di SMK 2 tidak tegas. Sehingga, ada kesalahan persepsi untuk menerapkan. Dengan aturan baru yang akan dibuat ini, menurut Rusmadi, SMK N 2 akan memberi ruang bagi murid non-Muslim menentukan pilihan sendiri untuk pakaian seragam yang akan dikenakan.

"Kita akan membuat tata tertib sekolah sesuai dengan keinginan yang disampaikan oleh ombudsman dan Kadisdik. Bahwa pakaian berjilbab itu hanya wajib untuk yang beragama Islam," kata Rusmadi, Senin (25/1).



Mantan Wali Kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar menjelaskan beberapa alasan dirinya mengeluarkan aturan mengenakan jilbab bagi siswi di Kota Padang saat ia masih menjabat. Fauzi mengeluarkan aturan siswi harus memakai baju kurung, rok panjang dan mengenakan jilbab pada 2005 lalu.

Tujuan utama, menurut Fauzi adalah untuk mencerminkan identitas perempuan minang yang menutup aurat. Fauzi ingin dunia pendidikan di Padang khususnya dan Sumbar pada umumnya mencerminkan jati diri Sumbar yang kental dengan nuansa Islami.

"Menutup kepala, memakai kerudung dan jilbab itu kebudayaan Minangkabau. Kami ingin institusi dunia pendidikan berbusana muslim agar itu menjadi cermin dari Sumatera Barat," kata Fauzi, Ahad (24/1).

Kemudian, alasan lain menurut Fauzi untuk menghindarkan pelajar perempuan dari aksi kejahatan. Dengan berpakaian menutup aurat peluang siswi menjadi korban kejahatan seksual menjadi terminimalkan.

Alasan tidak kalah penting lanjut Fauzi dari penerapan memakai jilbab adalah untuk mempersempit jurang pemisah antara murid anak orang kaya dengan anak orang miskin. Dulu sebelum sekolah menerapkan aturan berjilbab, menurut Fauzi, sangat terlihat perbedaan aksesoris anak orang kaya dengan anak orang miskin dari perhiasan yang dikenakan. Seperti gelang, kalung dan anting.

"*Kan* tidak semua orang tua mampu membelikan anak-anaknya anting emas dan perhiasan lainnya. Ketika semua sudah berjilbab, jurang pemisah itu jadi makin dipersempit," ujar Fauzi.

Fauzi menegaskan ,aturan yang ia buat tidak pernah memaksa siswi non-Muslim juga harus memakai jilbab. Untuk siswi non-Muslim menggunakan jilbab hanya bersifat imbauan. Tetapi pada kenyataannya mayoritas siswi non-muslim di sekolah negeri di Kota Padang menggunakan jilbab karena tidak ingin ada perbedaan mencolok dari teman-temannya yang lain.

"Mungkin maksud kepala sekolah meminta siswi non-Muslim juga memakai jilbab agar menghindari *bully*-an sesama teman karena mengenakan seragam berbeda dari murid-murid yang lain," kata Fauzi menambahkan.

---

"Mungkin maksud kepala sekolah meminta siswi non-Muslim juga memakai jilbab agar menghindari *bully-an* sesama teman karena mengenakan seragam berbeda dari murid-murid yang lain," kata Fauzi menambahkan.

Fauzi mengatakan persoalan aturan memakai jilbab di SMK N 2 Padang yang belakangan menjadi sorotan disebabkan adanya miskomunikasi antara pihak guru dan wali murid. Aturan yang dikeluarkan Fauzi pada 2005 lalu kewajiban memakai seragam berjilbab hanya untuk siswi Muslim. Bagi yang non-Muslim hanya bersifat imbauan atau menyesuaikan.

"Kewajiban memakai jilbab itu hanya untuk siswi non-Muslim. Bagi anak-anak kami yang non-Muslim hanya bersifat imbauan. Terkait masalah yang sekarang terjadi, hanya karena ada miskomunikasi antara guru, kepala sekolah dengan wali murid," kata Fauzi, Ahad (24/1).



## Berita 4:



### Khazanah

26 Jan 2021, 06:09 WIB

## MUI: Sudahi Polemik Jilbab di Sekolah

**Pemerintah diminta menghormati kearifan lokal masing-masing daerah.**

JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah pusat lebih bijaksana dalam menyikapi aturan berbusana Islami di Kota Padang, Sumatra Barat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI KH Amirsyah Tambunan mengatakan, "Jangan lupa, ada kearifan lokal yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat, terutama masyarakat di mana sekolah berada. Sehingga, kalau sekolah punya ciri khas tertentu, sekolah punya ciri yang spesifik, sah-sah saja. Tidak ada masalah," ujar Kiai Amirsyah Tambunan saat dihubungi *Republika*, Senin (25/1).

Ia berharap polemik ini tidak diperpanjang lagi. Persoalan yang ada dapat diselesaikan melalui musyawarah atau kekeluargaan. "Saya harap polemik soal pakaian ini sebaiknya disudahi. Karena, ada tugas besar di dunia pendidikan kita, yakni membentuk jati diri pelajar dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional," katanya.

Cendekiawan Muslim Prof KH Didin Hafidhuddin mengatakan, Sumatra Barat terkenal sebagai salah satu daerah dengan akar keislaman yang kuat. Karena itu, dia menambahkan, wajar saja bila sekolah-sekolah setempat mewajibkan jilbab bagi siswi yang beragama Islam. Namun, ia mengingatkan, esensi aturan berbusana adalah membentuk karakter para siswa dan siswi agar bisa berperilaku baik serta pergaulannya terjaga.

---

“Itu yang seharusnya menjadi perhatian para pendidik dan tokoh umat, bukan kemudian dilihat semata-mata karena jilbabnya,” ujar Kiai Didin saat dihubungi, Senin.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 2 Kota Padang beberapa waktu lalu merupakan sebuah tindakan intoleransi. Kasus tersebut dipandang bertentangan dengan sejumlah peraturan, di antaranya adalah Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam pasal 3 ayat 4 beleid itu ditegaskan, pakaian seragam khas sekolah diatur masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

“Maka, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik,” kata Nadiem dalam sebuah video resmi dari Kemendikbud, Ahad (24/1).

Kasus ini bermula dari pengaduan yang dilakukan Elianu Hia, salah satu orang tua murid. Ia memprotes pihak SMKN 2 Kota Padang karena merasa putrinya dipaksa untuk mengenakan pakaian berkerudung di sekolah.

“Jadi, anak saya ini sudah tiga pekan ini dipanggil terus ke kantor BK (bimbingan konseling) sehingga akhirnya saya datang. Saya tanya, ini kebijakan siapa? Karena, tidak ada keputusan menteri pendidikan atau keputusan gubernur. Mereka menjawab, ini keputusan sekolah. Wajib katanya,” ujar Elianu saat ditemui wartawan di Padang, Sumatra Barat, Jumat (22/1).

Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmadi mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksa siswi yang non-Muslim untuk mengenakan kerudung atau pakaian Muslimah. Ia menambahkan, selama ini mayoritas siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang atas kemauan mereka sendiri bersedia mengenakan seragam berkerudung. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain.

“Kami tidak pernah memaksakan siswi kami yang non-Muslim memakai kerudung,” kata Rusmadi di Padang, Jumat (22/1).

Sejak 2005, Pemerintah Kota Padang memberlakukan kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005. Salah satu poin instruksi tersebut adalah mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang.

Nomenklatur aturan tersebut ditujukan kepada siswi yang beragama Islam saja. Namun, pada praktiknya di lapangan, siswi yang non-Muslim juga tak sedikit menggunakan jilbab.

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Variabel	Sub Variabel	Pertanyaan Wawancara	
Faktor yang mempengaruhi pemberitaan	Individual	1.	Apakah latar belakang personal seorang jurnalis mempengaruhi penulisan berita?
		2.	Bagaimana perspektif atau cara pandang wartawan mempengaruhi penulisan berita kasus polemik Jilbab di SMKN 2 Padang?
	<i>Media Routines</i>	3.	Bagaimana mekanisme dan proses penentuan berita (prosedur standar)?
		4.	Bagaimana rutinitas media (mekanisme bagaimana berita dibentuk), mempengaruhi wujud akhir pemberitaan tentang kasus Jilbab di SMKN 2 Padang?
	Organisasi	5.	Setiap organisasi media tentu mempunyai filosofi organisasi sendiri yang mempengaruhi bagaimana wartawan bersikap dan bagaimana seharusnya peristiwa disajikan dalam berita. Bagaimana manajemen dan kebijakan redaksi dalam menentukan isi berita tentang kasus Jilbab di SMKN 2 Padang?
	<i>Extra Media</i>	6.	Apakah faktor lingkungan luar (level ekstra media: narasumber, sumber penghasilan, pemerintah dan lingkungan bisnis) mempengaruhi pemberitaan media?
		7.	Dalam kasus polemik Jilbab di SMK 2 Padang, adakah level ekstra media tersebut (narasumber, sumber penghasilan, pemerintah dan lingkungan bisnis), yang berpengaruh terhadap berita yang disajikan?

Variabel	Sub Variabel	Pertanyaan Wawancara
		8. Apakah ada hubungan antara gencarnya pemberitaan yang dilakukan oleh Media terhadap kasus jilbab yang terjadi di SMKN 2 Padang, dengan respon yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yaitu terkait dengan diterbitkannya SKB Tiga Menteri, Nomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021 dan 219 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah?
	Ideologi	9. Apakah ideologi media berpengaruh terhadap isi berita/pemberitaan?
		10. Bagaimana ideologi yang dianut oleh Republika.co.id dan Detik.com?
		11. Apakah terdapat pengaruh ideologi dalam pemberitaan kasus jilbab di SMKN 2 Padang?
		12. Dalam pemberitaan kasus/polemik jilbab SMK Negeri 2 Padang, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap dalam berita yang diterbitkan?



#### Lampiran 4. *Script* Perdebatan Elianu dengan Pihak Sekolah

##### **JUDUL POSTINGAN :**

”Lagi si sekolah smk negri 2 padang,,saya di panggil karna anak saya tidak pakai jilbab,,kita tunggu aja hasil akhirnya,,saya mohon di doakan ya,”

##### **SKRIP PERCAKAPAN :**

##### **Pihak sekolah (wakasek Bidang Kesiswaan) :**

(Sambil menjelaskan (membacakan) aturan/tata tertib berpakaian sekolah)

“Dan kan juga Bapak orang tua, ketika Jeni mau masuk juga sudah bikin surat pernyataan orang tua bersedia

##### **Elianu :**

“Nggak ada Pak”

##### **Pihak sekolah (wakasek Bidang Kesiswaan) :**

(Sambil menunjukkan surat pernyataan)

##### **Elianu :**

“Itukan kalau misalnya ikut tawuran. Tidak ada disinggung masalah kerudung Pak.”

##### **Pihak sekolah (wakasek Bidang Kesiswaan) :**

“Cuma poin yang ini Pak”

##### **Elianu :**

“Terus Pak, Nggak usah kita permasalahan (surat pernyataan ini)”

##### **Pihak sekolah (wakasek Bidang Kesiswaan) :**

“Jadi Tentunya menjadi janggal, baik di guru-guru, ketika ada anak yang apa namanya tidak ikut peraturan di sekolah. Kita semuanya sepakat.”

“Kemudian Bagaimana?”

“Itu makanya kita...”

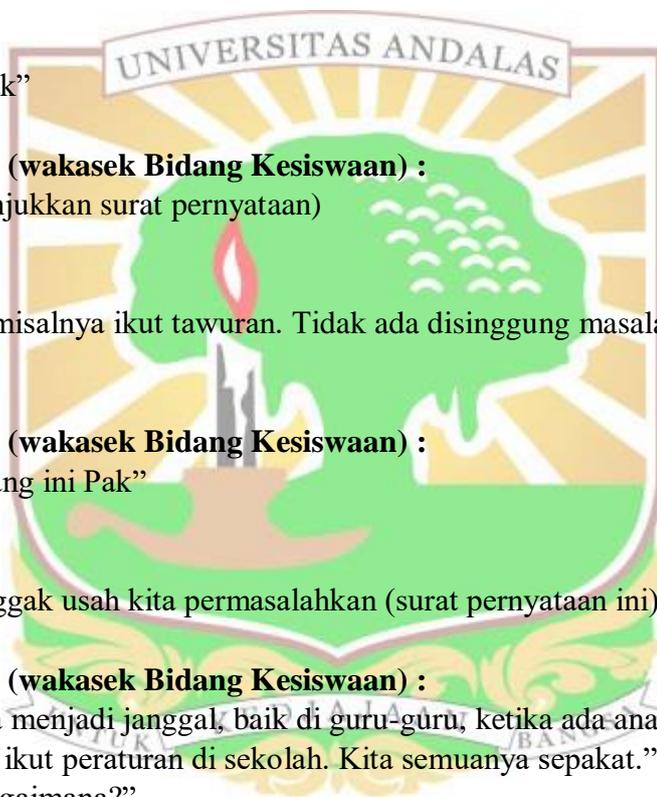
##### **Elianu :**

“Itu makanya saya kesini Pak.”

“Kemarin kan ketika anak saya dipanggil. Dibilangkan di panggil pakai kerudung. Kemudian anak saya ditawarkan panggil orang tua (saya). Ada juga yang bilang, Ndak usah dibilang orang tua.”

“Kan ada yang bilang ada peraturan Gubernur. Saya juga cari-cari di google nggak ada. Saya juga cari di Peraturan Menteri Pendidikan. Saya juga cari di Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terakhir kasus di Riau.”

“Hemat saya, itukan saya kembalikan yang aturan di sekolah.”



“Itu kan jilbab ini Pak, terkait Lambang agama saya Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Yak an? Dimana Hak Asasi saya?”

“Yang lain wajib di pake.”

“Seakan-akan saya bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke Yayasan lain, klo ini yayasan nggak masalah bagi saya kalau itu aturan. Ini kan Negeri. Karena ada temannya sekali di SMA 10 dari SD, dari SMP 1, tidak pake. Sama-sama kelas 1 sampai sekarang.”

“Satu lagi pertanyaan saya sama Bapak, Apakah ini himbauan atau hanya kewajiban?”

**Pihak sekolah (wakasek Bidang Kesiswaan) :**

“Bagi SMK 2, ini adalah kewajiban. Karena sudah tertuang dalam peraturan. Bapak lihat tadi sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diperbaharui setiap tahun.”

**Elianu :**

“Trus kalau solusinya, klo dia tidak siap (pakai kerudung), apa tindakan sekolah?”

**Pihak sekolah (wakasek Bidang Kesiswaan) :**

“Karena kita berada dibawah Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, maka dalam hal ini...”

“Sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan proses tentunya kita minta si Jeni dalam hal ini dan kemudian diketahui oleh orang tua, kita minta tanda tangan ini (sambil menyodorkan kertas/Surat Pernyataan).”

**Elianu :**

“Boleh kita Baca dulu Pak”

**Pihak sekolah (wakasek Bidang Kesiswaan) :**

“Silahkan.”

**Jeni :**

“Namanya Salah”

**Elianu:**

“Nama saya Alianu bukan Eliano”

“Ini suratnya lho (sambil menunjukkan ke kamera)”

“Nanti minta satu Pak”

**Pihak sekolah (wakasek Bidang Kesiswaan) :**

“Silahkan, satu buat pegangan.”

“Karena peraturan sekolah kita setelah ditandatangani Kepala Sekolah, kita kasih tembusan ke Dinas Pendidikan. makanya kita berani memajang.”

“Kalau juga kita tidak lakukan proses, tentunya juga menjadi tanda Tanya.”



**Eliau :**

“Tidak masalah.”

“Bagus kalau ada ini Pak (sambil menunjukkan surat pernyataan).”

“Menurut saya ini sangat bagus. Berarti pintu terbuka bagi yang lain. Sehingga aturan sekolah yang salah itu bisa diluruskan. Klo diwajibkan itu kan aturan syariah. Klo menurut saya. Tapi bisa kita luruskan.”

“Bapak tembuskan ke Dinas, saya juga nanti tembuskan ke Komnas HAM. Berarti Kita Sama-sama.” “Berarti ini pengen lurus, tidak ada apa diantara kita. Demi kita carikan, demi solusi yang baik. Sehingga marwah smk 2 itu kan ada. Tidak ada kita membedakan. Kita sepakati ya apapun resiko nya..Bapak proses, saya juga proses.”



Lampiran 5. *Script* Wawancara dengan Johnedy Kambang

Hari/tanggal : Kamis/7 April 2022  
 Waktu : 16.00 WIB  
 Lokasi : Komplek Azizi, Padang

Variabel	Sub Variabel	Wawancara	
Faktor yang mempengaruhi pemberitaan	Individual	<p>Lebih soal hati nurani. Saya dalam kasus seperti ini selalu menggunakan nurani. Ketika wartawan mulai mengetik satu kalimat, dua kalimat pembuka saja, sudah <i>diframing</i> pikirannya. Bahwa tujuannya membuat berita, ini. Tidak ada namanya independen, lurus-lurus saja. Ada tujuan awalnya ketika membuat berita, bagaimana agar supaya orang tidak ribut, atau bagaimana supaya orang ribut, bagaimana agar berita ini dibaca. Artinya dari sisi itu, wartawan tidak pernah independen. Cuma bagaimana memanfaatkan ketidak independenan itu dengan cara yang lebih baik atau baik.</p>	
	<i>Media Routines</i>	<p>Di redaksi, kami di daerah itu kami dibiarkan berekspresi. Tidak ada pula aturan di redaksi itu bahwa tujuan pemberitaan itu ke sini. Lebih banyak mempercayakan ke orang-orangnya di daerah. Tidak ada rel-rel khususnya.</p>	
	Organisasi	<p>Lebih soal hati nurani. Saya dalam kasus seperti ini selalu menggunakan nurani. Ketika wartawan mulai mengetik satu kalimat, dua kalimat pembuka saja, sudah <i>diframing</i> pikirannya. Bahwa tujuannya membuat berita, ini. Tidak ada namanya independen, lurus-lurus saja. Ada tujuan awalnya ketika membuat berita, bagaimana agar supaya orang tidak ribut, atau bagaimana supaya orang ribut, bagaimana agar berita ini dibaca. Artinya dari sisi itu, wartawan tidak pernah independen. Cuma bagaimana memanfaatkan ketidak independenan itu dengan cara yang lebih baik atau baik.</p>	
	<i>Extra Media</i>	Sumber Berita	<p>Tergantung pemilihan narasumber. Dari sisi mana kita memframing, terlihat dari pihak mana narasumber yang dominan. Semuanya diberi</p>

Variabel	Sub Variabel	Wawancara
		ruang, tapi tidak dominan
	Sumber Penghasilan Media	Sumber penghasilan media dalam hal ini lebih banyak viewer. Semakin banyak viewer maka berita semakin naik.
	Pemerintah	Sejauh ini tidak ada. Hanya mungkin ada beberapa pihak yang mengingatkan seperti yang saya pikirkan ujungnya kasus ini seperti ini, dampaknya begana-begini seperti yang saya pikirkan juga. Yang mempengaruhi ini dihentikan, tidak ada.
	Lingkungan Bisnis	Setiap pemberitaan kalau di detik.com, klo dicermati, setiap pemberitaan itu ada kolom komentar, setiap komentar ketiga dan kelipatannya, itu ada iklan otomatis. Semakin banyak orang berkomentar akan semakin banyak iklan-iklan baris yang muncul. Iklan baris kalau di nasional itu harganya 3.5 sampai 5 juta sekali tayang sehari. Jadi itu ketika viewernya semakin bagus, berita itu masuk ke dalam terpopuler. Yang terpopuler, komentarnya pasti banyak.
	Ideologi	Ideologi pasti selama saya bekerja sebenarnya nggak pernah terlalu banyak disinggung. Tapi, yang selalu diutamakan adalah akurasi, pertama kita jadi reporter di sana yang selalu dikedepankan adalah akurasi dan sebisa mungkin jangan terpengaruh apa kalau ada intervensi dari siapapun, tentu sangat berpengaruh terhadap pekerjaan sehari-hari, karena reporter pada akhirnya tidak mengandalkan editor untuk verifikasi data, tetapi, reporter yang punya andil kuat untuk memastikan data yang dibawa kemudian ditulis dalam artikel bisa dipertanggungjawabkan.
Rubrik Round-Up		Sebuah berita kalau pembaca artinya berita tu menjadi terpopuler pada hari itu da jam itu di beberapa kesempatan setiap berita itu

Variabel	Sub Variabel	Wawancara
		<p>yang berkaitan dengan jilbab dan SMK 2 itu lalu masuk dalam trending di sisi kanan kalau dilihat di layar web itu kalo posisinya bukan dilihat di handphone ya, dibagian kanan itu ada terpopuler, most comment, most popular, itu selalu posisinya kalau tidak posisi 1 , posisi 2. Itu selalu setiap pemberitaan soal jilbab, menjadi trending.klo sudah masuk posisi 1 sampai 10, itu setidaknya itu pembacanya angkanya sudah jutaan. Artinya berita itu akan selalu muncul dan akan selalu dicari orang, dikomentari, dibaca, dibagikan dan segala macam, itu viewer nyo lah sangat tinggi. Ketika viewer itu tinggi, apa yang bisa dilakukan dek redaksi, salah satu solusi Round-Up atau mengulang pemberitaan sebelumnya kadang-kadang ditambahkan dua atau tiga berita kemudian digabung informasi2/potongan2 informasi itu kemudian disarikan kembali walaupun sesungguhnya itu belum ada informasi yang baru. Jadi infonya tetap berita2 yang lamo, kemudian itu diramu ulang. 2 atau 3 berita dijadikan satu. Itu ang kemudian yang dimunculkan kembali.artinya Viewer, pembacanya masih cukup tinggi. Itu strategi media sebenarnya sambil menunggu adanya informasi atau pemberitaan baru. Ketika ada pemberitaan baru kondisinya sama, itu di Round-Up sehingga orang2 yang belum sempat membaca, itu membaca kembali. Strategi media sebenarnya. Artinya pemberitaan tentang jilbab tu dicari orang. Terpopuler 1 dan terpopuler 2. Apapun yang berkaitan dengan Jilbab SMK 2, itu jadi pencarian utama di mesin pencarian.</p>



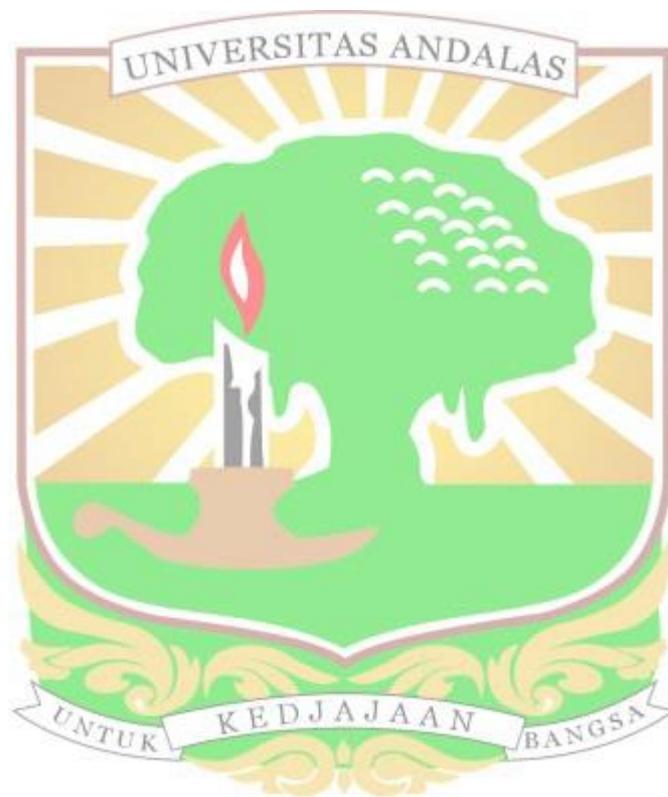
Lampiran 6. *Script* Wawancara dengan Febrian Fachri

Hari/tanggal : Jum'at/25 Maret 2022  
 Waktu : 21.30 WIB  
 Lokasi : Hotel Golden Palace, Lombok

Variabel	Sub Variabel	Wawancara
Faktor yang mempengaruhi pemberitaan	Individual	<p>Kalau saya akui, memang ada pengaruh individual, meskipun Republika ini lebih pro kepada kearifan lokal yang berbau Islam. Tapi tidak semua orang Republika seperti itu. Tetap wartawan itu diberi ruang untuk mendengarkan hati nuraninya. Nurani orang-kan berbeda. Kalau lah yang ditarok oleh Republika jurnalisnya untuk Sumatera Barat itu adalah orang Jogja (seperti jurnalis sebelumnya), belum tentu sama berita yang dia tulis. Memang ada pengaruh individual, wartawan memang diberi ruang untuk itu. Karena wartawan yang di lapangan. Dia yang tahu realitas.</p> <p>Kenapa angel saya seperti itu, karena saya orang Minang, saya orang Islam. Walaupun <i>nggak</i> taat-taat banget, saya tidak ingin agama saya diinjak-injak, tidak ingin suku Minang saya diinjak-injak. Itulah sudut pandang saya.</p>
	Media Routines	<p>Yang <i>pertama</i>, cari dulu sumber masalahnya, apa yang terjadi. Kita belum membayangkan kemana berita ini diarahkan. Kita pengen tahu dulu apa yang terjadi, supaya tidak bias. Dalam kasus ini blunder pihak sekolah digoreng oleh Buzzer di Jakarta, hatternya Sumbar. Dan saya tidak suka isu soal sumbar dikomentari Jakarta dan dia tidak pernah ke sini (sumbar) mencari tahu apa masalahnya. Kita yang tahu di sini.</p> <p>Cari narasumber dari segala sisi. Kalau dalam kasus ini, dari pihak yang membuat masalah, sumber masalah. Harusnya kami dapat. Tapi karena menghargai privasi, melalui pengacara ya pengacara. Lalu pihak sekola yaitu Kepala Sekolah. Siswa, siswa aktif. Alumni. Itu yang pokok bang.</p> <p><i>Cover boot side</i>. Seluruh pihak kita kasih ruang untuk ngomong di media kita.</p> <p>Setelah itu, untuk meramaikan berita, politisi/pembuat/pemangku kebijakan : kepala dinas</p>

Variabel	Sub Variabel	Wawancara
		pendidikan, gubernur dan mantan walikota yang membuat kebijakan, ketua LKAAM Sumbar.
	Organisasi	<p>Gak bisa dibilang semuanya ya. Misalnya gini Pak Erik kan punya Inter Milan ya pasti dalam hal-hal itu mempengaruhi. Tapi kalau di berita lain, sebenarnya sangat jarang. Beliau paling mengingatkan kita saja. Misalnya di media lain begini dia bilang tolong jangan ikut-ikutan kayak gitu paling itu saja. Dia tidak pernah mencampuri sampai ke teknis. Hal yang teknis banget mungkin lebih banyak ke urusan sama redpel.</p> <p>Perintah dari kantor. Perintah <i>pertama</i>, pantau aja dulu. Isu ini barang panas ini. Kelihatannya bakal rame. Karena sudah dimainin sama <i>buzzer</i>. Ini isu sudah kemana-mana. Sumbar terdiskreditkan secara negatif. Koordinasi dengan atasan, kita disini bela Sumbar. Karena ini isu 'digoreng' <i>buzzer</i>, yang masih ada dendam-dendam dari <i>buzzer-buzzer</i> pro pemerintah terhadap Sumatera Barat. Kita disini posisi Republika adalah membela kearifan lokal Sumatera Barat. Jadi posisi Republika menjelaskan itu.</p>
	<i>Extra Media</i>	<p>Sumber Berita</p> <p>Kita memilih narasumber itu, kita sudah mengarahkan sebenarnya. Dikasih ruang, <i>statement</i> narasumber itu yang mengarahkan kita. Tapi memang ada beberapa media itu yang sengaja diarahkan.</p>
	Sumber Penghasilan Media	Kita di Republika untuk masalah ini tidak, namun untuk beberapa isu mungkin ada. <i>Pure</i> ini berita andalannya Republika. Republika menjalankan fungsinya di sini. Bukan karena pengaruh faktor dari luar.
	Pemerintah	Tidak. Karena dalam kasus ini justru Republika berseberangan dengan Pemerintah.
	Lingkungan Bisnis	Mempengaruhi. Karena pembaca Republika adalah umat Islam. Republika koran favoritnya orang Sumbar. Banyak yang saya temui tokoh-tokoh Sumbar itu percayanya ya sama Republika.
	Ideologi	Nyawa medianya yang menentukan. Republika itu

Variabel	Sub Variabel	Wawancara
		nyawa medianya membela umat islam. Membela kepentingan umat islam. Kalau ada yang menginjak-injak Islam, Republika berdiri di depan. Dan Minang sangat dekat dengan islam. Jadi Republika akan selalu bela kearifan Minang.



Lampiran 7. Photo Wawancara

